



**Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi
(Studi di Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

**USWATUN HASANAH
NIM : 3312416007**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Juni 2020

Pembimbing Skripsi,



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 19640608 198803 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan PKn UNNES



UNNES Dr. Iijan, M.Si
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juni 2020

Penguji I



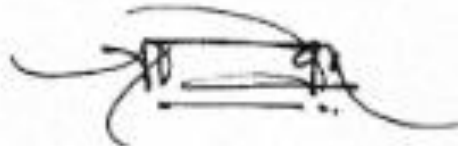
Dr. Ngabiyanto, M.Si
NIP. 19650103 199002 1 001

Penguji II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 19761011 200604 1 002

Penguji III



Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP.19640608 198803 1 001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial,



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 19630802 198803 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juni 2020



Uswatun Hasanah
NIM 3312416007

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)
- ❖ “Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas, tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda selalu sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah” (B.J. Habibie)
- ❖ “*Dreams never hurt anybody if he keeps working right behind the dream to make as much of it come real as he can* (Mimpi tidak pernah menyakiti siapapun jika dia terus bekerja tepat di belakang mimpinya untuk mewujudkannya semaksimal mungkin)” (F. W. Woolworth)

PERSEMBAHAN :

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Sukarman dan Ibu Partini atas segala cinta kasih dan sayangnya.
2. Kakaku Tercinta, Ema Sulistiyo Wardani dan Achmad Sukeni dan si kecil Abdullah Arsyad Maulana atas dukungan dan motivasinya.
3. Dosen Pembimbing, Dr. Eko Handoyo, M.Si., yang telah sabar dalam memberikan arahan, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Rekan dan Sahabat saya tercinta, Ardi, Enjel, Hani, Rochmah terima kasih atas perhatian, motivasi, dan doa agar saya dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
5. Kawan-kawan Solspatu Ilmu Politik 2016 dan seluruh kawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan UNNES yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
6. Almamater Universitas Negeri Semarang atas kesempatan dan ilmu yang diberikan.

SARI

Hasanah, Uswatun. 2020. **“Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo)”** Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Eko Handoyo, M.Si. 164 halaman
Kata kunci : Pemberdayaan Usaha Mikro Gula Semut, Kapasitas Petani Penderes Nira, Kesejahteraan Sosial Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi Wanita Srikandi memberikan kontribusi proses belajar sosial melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal dengan bentuk kegiatan pelatihan, pendampingan, monitoring, dan pemasaran produk kepada petani penderes nira di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pemberdayaan masyarakat melalui peranan Koperasi Wanita Srikandi dapat mempercepat tersampainya program-program pengembangan potensi usaha mikro daerah di Kabupaten Purworejo. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis : (1) bentuk kegiatan pemberdayaan petani penderes nira terhadap pengembangan potensi usaha mikro melalui pemanfaatan nira di desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo; (2) dampak pemberdayaan terhadap kehidupan sosial ekonomi petani penderes nira di Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Sumber data penelitian adalah data primer berupa wawancara, sedangkan untuk data sekunder berupa dokumen-dokumen dan laporan. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber. Metode analisis data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) bentuk kegiatan pemberdayaan petani penderes meliputi sosialisasi/rembug warga (tingkat desa, pedukuhan, dan dasa wisma), pendaftaran anggota penderes, pendataan petani penderes sebanyak 68 petani penderes, penerbitan sertifikasi organic *Controls union*, pelatihan pembuatan gula semut organik, pemberian sarana produksi berupa pongkor *food grade*, ayakan, wajan, dan ember tampung. Kemudian, pendampingan petani penderes untuk jaminan kualitas gula, pemberian jaminan sosial, evaluasi monitoring oleh ICS setiap *selapanan* (35 hari), dan distribusi pemasaran produk gula semut organik. (2) Berdampak pada peningkatan penghasilan petani penderes dengan hasil jual gula semut organik naik dari harga Rp 13.500 sampai Rp 17.500 per-kilogramnya, bertambahnya mitra usaha, serta mobilisasi modal sosial dengan sistem bagi hasil yaitu *maro* dan *diparo*, serta peningkatan kapasitas kelompok tani melalui Gapoktan “Ardha Laukha” dan KWT “Laras”.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini yakni: (1) perlu adanya bantuan teknis dan peningkatan fasilitas yang memadai untuk keberlanjutan usaha mikro gula semut (3) dalam pengembangan potensi asli daerah harus lebih koordinatif dan tidak parsial baik dari segi *stakeholder* terkait yaitu pemerintah daerah, pemerintah desa maupun swasta.

ABSTRACT

Hasanah, Uswatun. 2020. "Empowering Brown Coconut Sugar Farmers Through The Utilization of Rural Local Resource Potentials By Srikandi Women Cooperative (study in Ngasinan village Bener District Purworejo Regency)" Department of Political and Civic, Faculty of Social Science, Semarang State University. Mentor of Dr. Eko Handoyo, M.Si. 164 pages.

Keywords: *empowering coconut sugar micro-enterprises, coconut sugar farmer capacity sufferes, social-economics welfare*

Empowering the community through the cooperative women of Srikandi contributes to the social learning process through the utilization of local resources potential with the form of training activities, mentoring, monitoring, and marketing of products to farmers Nira donors in the village of Ngasinan, Bener District, Purworejo Regency. Community empowerment through the role of women cooperative Srikandi can accelerate the expansion of potential development programs of regional micro enterprises in Purworejo District. The purpose of this research is to analyze: (1) The form of activities of empowering coconut sugar farmers to develop potential micro enterprises through the use of sugar palm in the village Ngasinan District Bener District Purworejo; (2) The impact of empowerment on the socio-economic life of farmers Nira donors in the village Ngasinan Bener District Purworejo.

In this study used qualitative research. Location of research in village Ngasinan Bener District Purworejo. The source of the research data is the primary data of interviews, while for secondary data are documents and reports. Data collection methods include observation, live interviews, and documentation. Data validity is done with source triangulation. Data analysis methods use interactive models.

The results showed that: (1) The form of donor empowerment activities include the socializatio, registration of members of the donors, data collection as much as 68 farmers, the issuance of Organic Controls Union certification, training of organic ant sugar making, the provision of production facilities in the form of palm nectar place food grade, sieve, frying pan, Then, mentoring farmers to guarantee the quality of sugar, the provision of social security, evaluation of monitoring by ICS every (35 days), and the marketing distribution of organic ant sugar products. (2) impact on the increase in the income of farmers with the result of selling organic ant sugar from the price of Rp 13,500 to Rp 17,500/kilogram, increased business partners, and the mobilization of social capital with the result of a system for the results are Maro and Diparo, as well as the capacity to increase the farmer group through Combined Farmer Group "Ardha Laukha" and Women Farmer Group "Laras"

The suggestions presented in this study are: (1) There must be technical assistance and adequate facilities to improve the sustainability of micro sugar ants (3) in the development of indigenous potentials must be more coordinated and not partial in terms of the related stakeholders i.e. local government, village and private governments.

PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo).**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus konservasi ini.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan dukungan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M.Si., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kelancaran administrasi di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
4. Dr. Eko Handoyo., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Dr. Ngabiyanto, M.Si., Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, serta arahan.
6. Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si., Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran, serta arahan.

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan serta seluruh staf, karyawan Jurusan PKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang yang telah membekali ilmu dan membantu dalam administrasi selama kuliah di Universitas Negeri Semarang.
8. Rimi Ani, S.E, Kepala Sie Kelembagaan Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin dan memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
9. Nur Hadi Trionggo, S.H, MAP., Kepala Sie Kelembagaan Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin dan memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
10. Andi S.K, S.T, Kepala Sie Promosi dan Jaringan Usaha Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin dan memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
11. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Wilayah Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin dan memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
12. Sri Susilowati, S.E., Ketua Koperasi Wanita Srikandi Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
13. Seluruh Staf, Admin, dan ICS Koperasi Wanita Srikandi Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan segala informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
14. Seluruh Jajaran Aparat Pemerintah Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
15. Turijan, selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani “ARDHA LAUKHA” Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.

16. Seluruh anggota petani dan pengrajin gula semut organik Desa Ngasinan Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yang telah memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian ini.
17. Kedua orang tua penulis, terima kasih atas segala dukungan materiil dan immateriil yang telah diberikan.
18. Sahabat-sahabat terbaikku dan seluruh teman Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang angkatan 2016, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doa'anya.
19. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, atas bantuannya selama pelaksanaannya penelitian sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal kebaikan yang diberikan kepada penulis.

Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, Juni 2020



Uswatun Hasanah

NIM. 3312416007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KELULUSAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
SARI	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
Daftar Singkatan Teknis dan Tanda.....	xiv
Daftar Tabel	xv
Daftar Diagram	xv
Daftar Grafik.....	xv
Daftar Gambar.....	xvi
Daftar Lampiran.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Batasan Istilah.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Landasan Teoretis	11
1. Konsep Kebijakan Publik	11
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	14
3. Konsep Implementasi Kebijakan oleh David C. Korten.....	17
4. Pengertian Koperasi.....	22
5. Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM).....	25
6. Kajian Tentang Pemberdayaan	29

7. Teori Kesejahteraan Masyarakat	37
8. Kajian Tentang Dampak	40
9. Konsep Sosial Ekonomi.....	42
B. Penelitian Yang Relevan.....	43
C. Kerangka Berpikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Latar Penelitian	61
B. Fokus Penelitian.....	63
C. Sumber Data	64
D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	66
E. Uji Validitas Data	72
F. Teknik Analisis Data	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Hasil Penelitian	77
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	77
a. Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo	77
b. Gambaran Umum Desa Ngasinan.....	79
c. Gambaran Umum Koperasi Wanita Srikandi	90
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi.....	95
3. Pendampingan UKM dan Koperasi oleh Dinas KUKMP Kab. Purworejo.....	118
4. Dampak Pemberdayaan Terhadap Sosial Ekonomi Petani Penderes	123
B. Pembahasan	140
1. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi ..	140
2. Dampak Kegiatan Pemberdayaan Terhadap Sosial Ekonomi Petani Penderes Nira.....	145
BAB V PENUTUP.....	152
A. Simpulan	152
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155

Daftar Singkatan Teknis dan Tanda

Kopwan	:	Koperasi Wanita Srikandi
DINKUKMP	:	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
GKP	:	Gula Kering Petani
GKO	:	Gula Kering Oven
NIB	:	Nomor Izin Berusaha
P-IRT	:	Perizinan Produk Industri Rumah Tangga
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil Menengah
RKT	:	Rencana Kerja Tahunan
RENSTRA	:	Rencana Strategis
RAB	:	Rencana Anggaran Belanja

Daftar Tabel

Tabel 1. Peran tiga aktor dalam pemberdayaan masyarakat

Tabel 2. Sumber data primer/informan utama

Tabel 3. Teknik pengumpulan data

Tabel 4. Data Demografi Berdasar Populasi Per-Wilayah

Tabel 5. Keterangan Tingkat Pendidikan

Tabel 6. Jumlah Petani Sertifikasi di Koperasi Wanita Srikandi

Tabel 7. Data Populasi Menurut Pekerjaan

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Kopwan Srikandi

Tabel 9. Pembuatan Gula Kelapa Organik

Tabel 10. Materi Pendampingan dan monitoring petani penderes

Tabel 11. Susunan Kepengurusan Kelompok Tani Ardha Lauka Tahun 2019-2020

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purworejo Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2018

Tabel 13. Status Kebun Kelapa Yang Dideres

Tabel 14. Tahapan Kegiatan Program Pemberdayaan

Daftar Diagram

Diagram 1. Data Tingkat Pendidikan

Daftar Grafik

Grafik 1. Perbandingan harga gula cetak dan gula semut (per-kilogram)

Grafik 2. Jumlah Tenaga Kerja

Daftar Gambar

- Gambar 1. Formulasi kebijakan Thomas R. dye
- Gambar 2. Proses implementasi kebijakan publik
- Gambar 3. Implementasi kebijakan David C. Korten
- Gambar 4. Kerangka berpikir
- Gambar 5. Teknik analisis data Miles and Haberman
- Gambar 6. Struktur organisasi Dinas
- Gambar 7. Peta desa Ngasinan
- Gambar 8. Susunan perangkat desa Ngasinan
- Gambar 9. Susunan Kepengurusan BPD desa Ngasinan
- Gambar 10. Susunan Kepengurusan LPMD
- Gambar 11. Susunan Kepengurusan RW
- Gambar 12. Susunan Kepengurusan RT
- Gambar 13. Susunan Kepengurusan PKK Desa Ngasinan
- Gambar 14. Susunan Kepengurusan Karang Taruna
- Gambar 15. Struktur Organisasi
- Gambar 16. Pelatihan Pembuatan Gula Semut oleh ICS Kopwan Srikandi
- Gambar 17. Alur Pemberdayaan Masyarakat
- Gambar 18. Sosialisasi Keorganikan dan ToT oleh ICS Kopwan Srikandi
- Gambar 19.. Daftar hadir peserta
- Gambar 20. Susunan kegiatan ToT TA. 2020 di desa Ngasinan oleh Kopwan Srikandi
- Gambar 21. *Farm list*
- Gambar 22. *Farmer agreement*
- Gambar 23. Sertifikat Keorganikan *Controls Union*
- Gambar 24. Peta Sertifikasi Petani Blok G-28 Desa Ngasinan
- Gambar 25. Pelatihan Pembuatan Gula Semut
- Gambar 26. Sosialisasi Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik
- Gambar 27. Teknik Ember Tumpuk dalam Pembuatan Pupuk Organik
- Gambar 28. Penyuluhan tentang Perkoperasian TA. 2019
- Gambar. 29 Alokasi Dana Desa Ngasinan TA. 2019-2020

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 Rancangan Instrumen Wawancara
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3. Pedoman Observasi
- Lampiran 4. Transkripsi Wawancara
- Lampiran 5. Surat izin Penelitian
- Lampiran 6. Surat Balasan dari Instansi Terkait
- Lampiran 7. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa yang besar dengan segala potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah tentu banyak tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti adanya persaingan ekonomi global yang semakin menguat dan berdampak pada perubahan-perubahan terhadap arah kebijakan ekonomi dan politik. Dengan adanya perubahan kebijakan ekonomi dan politik di suatu negara, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Problema muncul ketika masyarakat di suatu wilayah tidak memperoleh kesempatan yang sama dan tidak terlibat langsung dalam rumusan suatu kebijakan sehingga menyebabkan ketimpangan. Muncul suatu ketimpangan yaitu tentang ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memperoleh kesempatan yang sama dari segi kehidupan seperti keadilan ekonomi, sosial, dan politik.

Masyarakat sesungguhnya menginginkan kondisi kehidupan yang ideal, namun kondisi untuk saat ini masih berada dalam zona merah kemiskinan dan menyebabkan kurang tumbuhnya keberdayaan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bentuk pemanfaatan potensi yang di dalam masyarakat bertujuan untuk mengolah daya/kekuatan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Bentuk sinergi (*political will*) seperti, program dan kebijakan dibuat untuk menyelaraskan dengan penanganan masalah-masalah tersebut. Setiap daerah diberikan otonomi atau kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri mulai dari urusan wajib hingga urusan pilihan.

Di Kabupaten Purworejo bentuk peraturan untuk menumbuhkan iklim usaha di kalangan masyarakat melalui ekonomi yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Menurut pasal 12 ayat 2, bahwa koperasi, usaha kecil, dan menengah merupakan urusan wajib pemerintah daerah. Pemerintah daerah melalui peraturan daerah harus bisa menentukan arah dan muara dari adanya suatu persoalan yang terkait dengan koperasi, usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Purworejo.

Sebuah program percepatan penumbuhan iklim usaha daerah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru di kalangan masyarakat. Namun, apakah program tersebut sudah sampai pada ranah masyarakat, apakah ada formulasi atau kebijakan khusus yang ditempuh untuk mempercepat proses tersampainya program, dan apakah akan membawa dampak yang baik kepada masyarakat sebagai sebuah “**inkubasi bisnis**” (Trionggo, 2020). Untuk tetap bertahan hidup, maka harus mengadakan perbaikan ekonomi dan sosialnya melalui usaha. Usaha yang dijalankan dengan usaha kecil rumahan yang sering dikenal dengan *home industry* berbasis rumah tangga. Namun, banyak hal yang menghambat pengembangan dari usaha yang telah dijalankan seperti akses permodalan, akses pemasaran, akses teknologi, akses perizinan dan lain-lain. Seiring dengan perubahan arah kebijakan politik dan ekonomi, masyarakat desa berupaya untuk mengembangkan sektor pengolahan bahan-bahan industri berbasis pertanian melalui sektor produksi pangan unggulan. Ide pembangunan sering kali dikaitkan dengan konsep modernitas (*up to date*). Menurut Iskandar (2009:36) dalam Handoyo (2016:235) :

“Pembangunan sebagai usaha terencana untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan warga masyarakat. Pembangunan dalam hal ini dilihat sebagai usaha terencana untuk mengubah kebudayaan suatu masyarakat yang semula kurang efektif dan kurang

efisien dalam hal kegunaannya untuk pemenuhan kebutuhan dan taraf kesejahteraan para pendukungnya, menjadi lebih efektif dan efisien dalam kegunaannya untuk memanfaatkan sumber daya energi yang ada dalam lingkungannya untuk peningkatan kesejahteraan manusia.”

Pemerintah pusat menekankan pada pembangunan ekonomi regional melalui peningkatan nilai tambah produk dengan menggunakan sumberdaya lokal yang tersedia melalui pengolahan, kontrol mutu, dan pemasaran. Sumberdaya lokal yang terbilang cukup banyak ini dapat meningkatkan kualitas hidup suatu individu maupun kelompok jika mampu untuk mengelolanya. Kabupaten Purworejo merupakan kawasan pengembangan Agroindustri karena komoditas atau potensi sumber daya alam yang banyak ditemui di kawasan ini.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah. Penumbuhan koperasi dan UKM yang mandiri di daerah, penguatan koperasi dan UKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan nasional serta peningkatan perolehan nilai tambah produk unggulan untuk meningkatkan pendapatan. Pemberdayaan masyarakat berbasis pada potensi lokal merupakan strategi jitu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan memiliki dua tujuan yaitu, melepaskan dari belenggu kemiskinan dan memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Bentuk pemberdayaan perlu sesuai dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat lokal sekaligus sebagai upaya untuk mempertahankan hidup yaitu melalui mata pencaharian. Dilansir dari laman berita www.metrotimes.news pada tanggal 5 Januari 2020 pukul 20.34 WIB :

“Produk UMKM kami banyak, ternak dan hasil pertanian juga melimpah, akan tetapi masyarakat terkendala distribusi dan pemasaran. Selain itu kemudahan mengakses

informasi seperti perizinan, bantuan modal, dan alat juga kami butuhkan, ujar Hamron Kepala Desa Ngasinan, Kec. Bener, Kab. Purworejo.”

Nira merupakan cairan bening yang keluar dari bunga kelapa dan aren yang pucuknya belum membuka, cairan ini merupakan bahan baku untuk pembuatan gula jawa atau gula merah. Nira dalam istilah bahasa jawa disebut dengan “*legen*” yang berasal dari kata *legi* atau manis. Dalam keadaan segar, nira mempunyai rasa manis berbau harum, dan tidak berwarna. Selain sebagai bahan baku pembuatan gula, nira juga dapat digunakan sebagai bahan makanan lainnya seperti minuman keras (tuak), asam cuka, dan minuman segar (Muchtadi dan Sugiono, 1992).

Menderes/menyadap nira sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian bagi petani penderes di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Komoditas kelapa (*coconus nucifera*) memang sangat banyak di kawasan pegunungan seperti di desa Ngasinan. Desa Ngasinan merupakan desa yang terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang dengan jumlah penduduk sekitar 2.272 jiwa yang terbagi di enam dusun. Namun, karena letak wilayah yang jauh dari pusat kota menyebabkan beberapa kendala terhadap akses. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dapatkan dari hasil membuat gula kelapa cetak yang kemudian di jual ke pasar lokal. Upaya pemberdayaan dengan kegiatan pelatihan pembuatan gula semut yang nantinya dapat untuk menambah nilai tambah dari produk gula kelapa itu sendiri. Realitasnya tidak sedikit usaha mikro, kecil atau *home industry* di Kabupaten Purworejo memiliki produk yang bagus dan bernilai tinggi, namun mereka sulit untuk memasarkan produknya. Pemasaran produk di samping terkait dengan kualitas produk, pengemasan, promosi, serta perizinan sangatlah menentukan. Sehingga, pelaku usaha kecil perlu memiliki

kemampuan dalam segi pengemasan, promosi, pemenuhan perizinan dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pendampingan dan pelatihan secara kontinu oleh pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam pengembangan potensi daerah seperti pada pemberdayaan pada Koperasi Wanita Srikandi merupakan upaya untuk membuka lapangan kerja, pengentasan angka kemiskinan, keberdayaan, dan kapabilitas petani penderes nira atau pengrajin gula semut di Kabupaten Purworejo serta meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah.

Petani penderes sebagai pemegang peranan dalam usaha agroindustri pengolahan nira kelapa yang nantinya diolah menjadi gula kelapa yang lebih dikenal oleh masyarakat kita dengan sebutan gula semut. Namun, masih menjadi problema ketika produk petani anggota yang memasarkan gula semut diperoleh dengan harga yang masih belum stabil, sedangkan untuk mengolah gula semut bukanlah perkara mudah. Dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pun masih bergantung kepada penghasilan dari pengolahan gula semut tersebut. Terkadang pengrajin gula semut lebih banyak beralih ke gula cetak sampai menunggu harga stabil kembali. Bentuk jaminan perlindungan nilai jual dari pemasaran gula semut petani belum bisa dikatakan konsisten, karena tergantung pada permintaan pasar pula, sedangkan untuk pemasaran, blok petani desa Ngasinan hanya kepada Koperasi Wanita Srikandi dan memang belum memperluas kemitraan dalam pengembangan produknya. Sebagai wadah penggerak perekonomian rakyat, tentunya koperasi harus mampu menjalankan sebuah inisiatif bisnis dengan tetap mempertahankan asas-asas dalam perkoperasiannya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono Adi Purnomo

(2013) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten (Studi pengecoran logam di Kecamatan Ceper) menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan UMKM sektor Pengecoran Logam di desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dilakukan oleh Diskoperindag sebagai pelaksana kebijakan dengan langkah memberikan motivasi dan semangat berupa pemberian daya dapat berupa peningkatan kapasitas SDM dan bantuan anggaran. Implementasi kebijakan dilakukan dengan menghilangkan segala hambatan-hambatan seperti daya saing rendah dan SDM yang belum memadai digantikan dengan upaya keseriusan pemerintah daerah yang memposisikan diri sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan pemberdayaan UMKM, sehingga memberikan peluang UMKM pengecoran di Kecamatan Ceper dapat memperoleh daya saing yang tinggi dalam pangsa pasar yang lebih luas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono Adi Purnomo (2013) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten (Studi pengecoran logam di Kecamatan Ceper) menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan UMKM sektor Pengecoran Logam di desa Batur Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten dilakukan oleh Diskoperindag sebagai pelaksana kebijakan dengan langkah memberikan motivasi dan semangat berupa pemberian daya dapat berupa peningkatan kapasitas SDM dan bantuan anggaran. Implementasi kebijakan dilakukan dengan menghilangkan segala hambatan-hambatan seperti daya saing rendah dan SDM yang belum memadai digantikan dengan upaya keseriusan pemerintah daerah yang memposisikan diri sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan pemberdayaan UMKM, sehingga memberikan peluang UMKM

pengecoran di Kecamatan Ceper dapat memperoleh daya saing yang tinggi dalam pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh. Wuri Aryati (2015) tentang Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tangan Rumput Aji Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di Dusun Tanjunggunung Desa Tanjungharjo Nanggulan Kulon Progo. Dalam penelitian disimpulkan bahwa dampak pemberdayaan melalui usaha kerajinan tangan rumput Aji dengan mengembangkan dan membangun potensi yang ada di wilayah desa Tanjungharjo mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat pemberdayaan yaitu menambah pendapatan ekonomi dan menciptakan produk lokal dengan mengedepankan bahan alami yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan. Bentuk keterlibatan masyarakat, pemerintah menjadi penting mengingat adanya bentuk hambatan dalam setiap pelaksanaan upaya pemberdayaan sehingga perlu siasat dan langkah-langkah strategis untuk memberikan solusi pada hambatan yang ada.

Berdasarkan dari latar belakang serta penelitian yang membahas mengenai upaya Koperasi Wanita Srikandi bersama pemerintah daerah dalam upaya pengembangan potensi lokal, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bentuk pemberdayaan kepada petani penderes nira yang memiliki prospek untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dengan pemanfaatan sumber daya lokal serta prospek untuk mewujudkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Sehingga peneliti ingin memfokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah daerah khususnya pada bentuk pemberdayaan kepada petani penderes nira di desa Ngasinan melalui sentra Koperasi Wanita Srikandi terkait pengolahan nira kelapa

(*coconus nucifera*). Sehingga, mampu melihat secara jelas upaya-upaya dalam kegiatan penumbuhan, pendampingan, dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah bersama Koperasi Wanita Srikandi dalam upaya pemberdayaan petani penderes nira melalui kegiatan usaha kecil menengah pengrajin gula semut organik.

Peneliti ingin melihat sejauhmana peran Koperasi Wanita Srikandi dalam memberdayakan masyarakat desa khususnya petani penderes nira dalam mengembangkan potensi lokal yakni pemanfaatan sumber daya alam berupa nira agar nantinya produk yang dihasilkan dan usaha yang dirintis dapat maju dan memiliki daya saing unggul sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat desa Ngasinan khususnya dan kontribusi kepada perekonomian daerah di Kabupaten Purworejo. Hingga pada dampak manfaat (hasil) kegiatan pemberdayaan dalam pencapaian kesejahteraan sosial ekonomi petani penderes nira. Kemudian, peneliti menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pemberdayaan terhadap petani penderes nira dalam pengembangan potensi sumber daya lokal di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo?

2. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap kehidupan sosial ekonomi petani penderes nira di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bentuk pemberdayaan terhadap petani penderes nira dalam pengembangan potensi sumber daya lokal di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
2. Menganalisis dampak pemberdayaan terhadap kehidupan sosial ekonomi petani penderes nira di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan implementasi kebijakan dalam pengembangan usaha mikro gula semut organik melalui kegiatan pemberdayaan petani penderes nira oleh Koperasi Wanita Srikandi dan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo sebagai fasilitator dalam perspektif Implementasi Kebijakan dengan pendekatan *People Centered Development* oleh David C. Korten.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat memberikan gambaran implementasi peraturan daerah mengenai perkembangan dan pemberdayaan dalam usaha mikro gula semut bagi para petani penderes atau pengrajin gula

kelapa dan menjalin koordinasi antar dinas agar bersinergi dalam memajukan usaha mikro.

- 2) Bagi agen pemberdayaan, yakni Koperasi Wanita Srikandi dapat menjadi refleksi untuk lebih berpartisipasi aktif dan memberikan akses kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha usaha mikro gula semut yakni petani penderes nira yang ada di Kabupaten Purworejo.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk memberikan masukan sebagai pedoman khususnya bagi petani penderes atau pengrajin gula semut untuk menjalankan usaha gula semut selaras dengan peraturan daerah dan agen pemberdayaan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan pengertian dan menghindari kesalahan dalam penafsiran oleh sebab itu diperlukan batasan istilah sebagai berikut.

1) Implementasi Kebijakan

Korten dan Syahrir (1980) Implementasi kebijakan dilihat dari “kesesuaian” faktor-faktor determinan suatu kebijakan. Keefektifan suatu kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan kelompok penerima pemanfaat, antara program dengan organisasi pelaksana serta antara organisasi pelaksana dengan kelompok penerima pemanfaat. Selain itu, kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lainnya.

2) Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

3) Koperasi Wanita Srikandi

Koperasi sebagai roda perekonomian rakyat, dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi Wanita Srikandi melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang produksi olahan pohon kelapa dan turunannya yang meliputi minyak kelapa murni (ZICO), gula kelapa kristal organik atau gula semut, sabun Az-zico dan lain-lain.

4) Dampak

Dampak berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran atau program yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, ketidakmampuan) menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan).

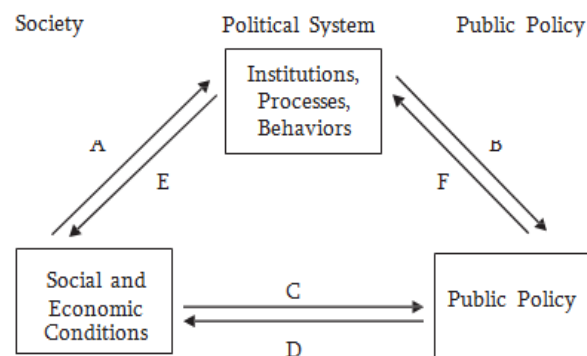
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), kebijakan (*policy*) berbeda dengan kebijaksanaan (*wisdom*,) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh berbagai pejabat di daerah. Secara khusus kebijakan publik sering dipahami sebagai keputusan pemerintah atau eksekutor. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang perseorangan ataupun golongan. Menurut pandangan Dye, (2002:5) dalam Handoyo (2012:12), menggambarkan kaitan tiga komponen formulasi kebijakan di atas seperti dalam gambar berikut :



Gambar 1. Formulasi Kebijakan Thomas R. Dye

Berdasarkan gambar di atas, kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, dan pengangguran, pencapaian

pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan dan usia hidup, ketidaksamaan dan diskriminasi. Kebijakan publik yang dihasilkan dari kondisi masyarakat yang direspon dan diolah dalam sistem politik, dapat berupa hak-hak sipil, kebijakan pendidikan, kebijakan kesejahteraan, kebijakan pemeliharaan kesehatan, keadilan kriminal, perpajakan, belanja dan defisit anggaran, kebijakan pertahanan, dan peraturan-peraturan. Garis panah yang ditunjukkan oleh garis A, B, C, D, E, dan F pada gambar di atas, menunjukkan adanya pengaruh atau dampak dari satu komponen terhadap komponen lainnya, misalnya garis A menggambarkan tentang pengaruh kondisi sosial ekonomi masyarakat terhadap lembaga, proses, dan perilaku politik dan pemerintahan. Demikian pula, garis B menggambarkan pengaruh dari lembaga-lembaga politik dan pemerintah, proses, dan perilakunya terhadap kebijakan publik yang diambil. Segitiga kebijakan Dye dapat juga dipakai untuk memotret bagaimana kebijakan publik di Indonesia dirancang dan diimplementasikan.

Di Indonesia, kebijakan publik yang ditetapkan dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, baik berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, kualitas hidupnya, maupun tingkat daya saingnya. Kelembagaan dan sistem politik Indonesia memengaruhi dan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Kelembagaan tersebut sangat rumit, mencakupi sistem hukum, sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem kultural. Dalam kelembagaan ini turut bermain partai politik, pemerintah (pusat dan daerah), birokrasi, parlemen, dan organisasi. Mereka menentukan kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah. Keluaran (*output*)

kebijakan bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun Peraturan Daerah, baik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, finansial, maupun bidang-bidang lain yang menyentuh kehidupan masyarakat atau publik. Partai politik dan birokrasi dinilai yang paling menonjol dalam menentukan suatu kebijakan publik. Menurut Winarno (2012:16) secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

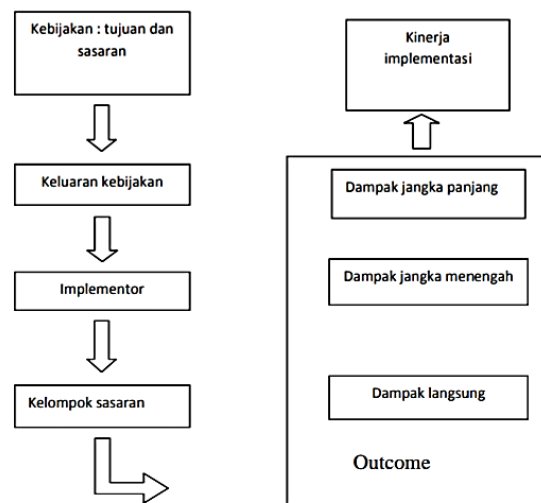
Kebijakan publik yang terbaik adalah yang mendorong setiap warga masyarakatnya untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskannya ke dalam pola ketergantungan (Dwijowijoto, 2006:22). Tahir (2015:22) berpendapat bahwa setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan, sedangkan kebijakan tentang pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Purworejo adalah suatu kebijakan sosial yang dibuat pemerintah untuk

mengatur tentang penumbuhkembangan iklim usaha mikro agar keberadaan usaha mikro berbasis pemberdayaan masyarakat dapat terealisasikan guna mendukung pengembangan daya saing usaha mikro daerah serta kapasitas dari petani penderes gula semut.

2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik dan sering bertentangan dengan apa yang diharapkan. Sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, menurut Saefullah dalam Tachjan (2006) bahwa studi kebijakan politik dapat dipahami dari dua perspektif yakni perspektif politik dan administrasi, pertama perspektif politik bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakikatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, misi, harapan, dan prioritas yang ingin diwujudkan.

Kedua, perspektif administrasi bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal yang berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik (*official officer*) di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dapat dicapai. Berikut merupakan proses implementasi kebijakan untuk mewujudkan tujuan kebijakan.



Gambar 2. Proses Implementasi Kebijakan Publik
 Sumber : E.A. Purwanto & D.R. Sulistyastuti (2012:72)

Gambar 3. menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program, untuk mencapai tujuan dari program tersebut maka dibutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*). Input yang berupa anggaran yang dikelola oleh pemerintah atau dikonversikan menjadi keluaran kebijakan (*policy output*) berupa instrumen kebijakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. *Policy output* tidak akan sampai pada kelompok sasaran tanpa dilakukannya kegiatan berupa realisasi kegiatan atau distribusi bantuan. Kegiatan ini menghantarkan *policy output* kepada kelompok sasaran yang menjadi tugas *implementing agency* yaitu birokrasi pemerintahan atau eksekutif.

Namun, seiring dengan perkembangan konsep *governance*, lembaga yang diberi tugas untuk mengimplementasikan kebijakan tidak hanya dimonopoli oleh eksekutif melainkan dapat secara terbuka dan inklusif dalam memberikan ruang bagi *Civil Society Organizations* (CSOs) dan sektor swasta untuk terlibat dalam implementasi suatu kebijakan. Ketika *policy output* sudah sampai kepada kelompok

sasaran maka akan menimbulkan *policy effect* (sefek suatu kebijakan) atau menurut para ahli sering disebut dengan *initial outcome* dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran ketika ada kegiatan *delivery activities* suatu *policy output* kepada kelompok sasaran (Cole and Partson dalam Purwanto, 2012:72-77). Menurut Dunn (1981:56), ***policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which essentially theoretical*** bahwa implementasi kebijakan publik berkaitan dengan proses politik dan administrasi, karena terkait dengan tujuan diadakannya kebijakan (*goals*) dan berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, di samping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya, ini berarti antara pengambilan kebijakan dengan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Ada dua perspektif memahami keberhasilan implementasi yaitu, keberhasilan implementasi sebagai kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (undang-undang, peraturan-peraturan). Kemudian, yang kedua adalah tidak hanya memahami implementasi dari aspek kepatuhan saja dalam mengikuti *standard operating procedure* (SOP), namun berusaha untuk memahami implementasi secara luas. Seperti, diukur dari keberhasilan mereka dalam merealisasikan tujuan-tujuan kebijakan yang wujud nyatanya berupa munculnya dampak kebijakan dan upaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan (Purwanto,dkk. 2012:69-70). Menurut Nugroho dalam Tahir (2015:55), implementasi sebagai upaya

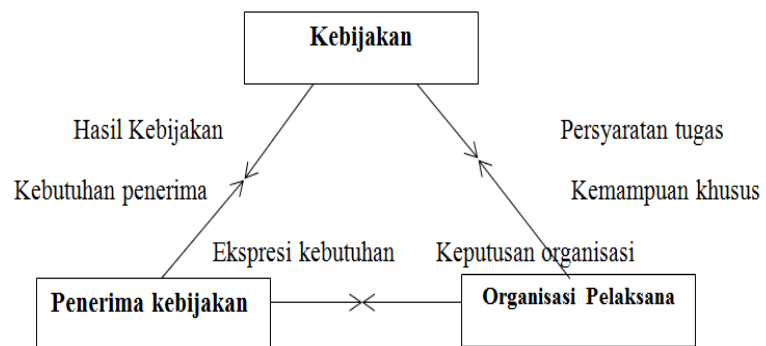
melaksanakan keputusan kebijakan, hal ini sejalan dengan pandangan Salusu (2003:hal. 409) yang mengartikan bahwa implementasi sebagai operasional dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran manajemen puncak sampai pada karyawan terbawah. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan, Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari tiga perspektif yang berbeda yaitu, pembuat kebijakan, pejabat pelaksana di lapangan, dan aktor individu selaku kelompok target. Uraian di atas menunjukkan bahwa inti dari implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Penting juga untuk diperhatikan adanya pedoman yang dapat menggerakkan ruang gerak dari pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom di dalam batas wewenangnya.

3. Konsep Implementasi Kebijakan oleh David C. Korten

Bahwa implementasi kebijakan sebagai cara untuk menyampaikan layanan-layanan pemerintah kepada masyarakat. Implementasi kebijakan dipandang sebagai proses belajar sosial yang bersifat kolaboratif antara birokrasi dengan suatu komunitas dengan tujuan agar komunitas tersebut mencapai peningkatan kapasitas diri (*self sustaining capacity*). Dikutip dari pernyataan Subarsono (2013), bahwa ada suatu pendekatan yang diajukan oleh Korten (1988) yakni keberhasilan suatu program akan ditentukan oleh hubungan tiga aspek, yakni jenis program, *beneficiaries* (penerima program), dan organisasi pelaksana program. Pendekatan ini melihat implementasi kebijakan sebagai cara untuk menyampaikan layanan-layanan pemerintah dan dipandang sebagai proses belajar sosial yang bersifat

kolaboratif antara birokrasi di tingkat lokal dengan suatu komunitas dengan tujuan agar komunitas dapat mencapai *self sustaining capacity*.

Konsep yang digagas oleh David C. Korten yaitu “*people centered development*” merupakan penempatan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan bukan sekadar memaksimalkan manfaat. Proses interaktif kolaboratif untuk mencapai kesesuaian satu sama lain dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Implementasi Kebijakan Korten

Sumber : Korten (1988) dalam A.G. Subarsono (2012)

Adapun tiga unsur implementasi program menurut David C. Korten (Sarah, 2017) :

a. Kebijakan atau Program

Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Asumsi faktual maupun preferensi nilai para pendukung visi pembangunan berpusat rakyat memegang peran penting dalam menentukan preferensi kebijakan. Visi berpusat rakyat memilih kesejahteraan manusia dan berkelanjutannya lingkungan hidup di atas penambahan dalam masukan ekonomi, pasaran domestik di atas pasaran luar negeri, pembiayaan dan kepemilikan lokal di atas pinjaman dan investasi asing serta kemandirian dalam bidang ekonomi di atas ketergantungan pada sistem perdagangan

internasional. Menyambut partisipasi dalam masyarakat global tetapi dalam posisi dengan kekuatan mandiri bukan dengan ketergantungan pada pihak lain (Korten, 1993 :116). Adapun indikator suatu program yang baik memuat beberapa aspek :

- a) adanya tujuan yang jelas
- b) adanya kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c) adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- d) adanya strategi dalam pelaksanaan

b. Organisasi Pelaksana

Menurut Korten, dalam pelaksanaan program harus ada kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program yang dibawa. Oleh karena itu, kemampuan implementor sangat menentukan keberhasilan suatu program/kebijakan. Organisasi pelaksana kebijakan terus merumuskan apa yang menjadi ekspresi kebutuhan calon penerima kebijakan atau kelompok sasaran (*target group*). Ini dimaksudkan agar penerima kebijakan merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap suatu kebijakan. Suatu kebijakan memerlukan persyaratan teknis yang berbeda sesuai dengan sifat kebijakan. Oleh karena itu, organisasi pelaksana harus memiliki kompetensi untuk menangani suatu jenis kebijakan agar dapat berhasil.

c. Kelompok Sasaran

Untuk mencapai hasil dari suatu program maka harus ada kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Selanjutnya untuk *outcome* dari suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima kebijakan

atau *target group*, agar kebijakan tersebut dapat dirasakan manfaatnya. Apabila *outcome* kebijakan tidak seperti yang dikehendaki oleh masyarakat penerima kebijakan, maka akan terjadi pemborosan biaya kebijakan. Dikutip dari pernyataan Nugroho dalam Sarah (2017) adapun prinsip-prinsip dalam implementasi yang efektif harus memenuhi lima tepat implementasi yakni.

- 1) Tepat kebijakan atau sejauh mana program yang ada telah memuat hal-hal yang memang mampu memecahkan masalah. Kemudian program yang dirumuskan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat/sasaran kelompok. Serta kewenangan untuk membuat program adalah dari organisasi yang sesuai dengan karakteristik program.
- 2) Tepat pelaksanaannya artinya aktor implementasi sesuai dengan program yang akan dijalankan. Program pemberdayaan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau lembaga yang berwenang akan program tersebut.
- 3) Tepat target, yaitu target yang diintervensi sesuai dengan rencana dan tidak tumpang tindih. Target dalam kondisi siap untuk diintervensi. Serta target sasaran mendukung implementasi program yang bersifat baru atau memperbarui implementasi program yang sebelumnya.
- 4) Tepat lingkungan, yaitu program yang direncanakan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada disekitaran kelompok sasaran atau dengan kata lain sesuai dengan karakteristik sumber daya yang akan dikelola. Serta adanya kesesuaian interaksi di dalam lingkungan dan di luar lingkungan.

5) Tepat proses, artinya lembaga atau organisasi pelaksana dengan masyarakat saling membutuhkan dan memahami aturan main dalam kebijakan suatu program.

Visi pembangunan berpusat pada rakyat melihat bumi sebagai ruang kehidupan yang harus mempertahankan kehidupan dengan cadangan sumberdaya fisik yang terbatas. Menurut Korten (1993) :

“Bahwa pembangunan adalah proses di mana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan atau institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi mereka.”

Strategi yang digunakan untuk mencapai kualitas masyarakat secara teoritik, menurut Mardikanto (2013:17-18) mendeskripsikan mengenai ciri-ciri pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered*):

- a) prakarsa dan pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tahap demi tahap harus diletakkan pada masyarakat itu sendiri.
- b) fokus utama kebijakannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasikan sumber-sumber yang terdapat di komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.
- c) pendekatan ini mentoleransi variasi lokal dan kreasinya dan bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi lokal.
- d) di dalam pelaksanaan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses *social learning* yang terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan komunitas masyarakat mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan mendasarkan saling belajar.
- e) proses pembentukan jaringan (*networking*) antara birokrasi dan LSM, satuan organisasi tradisional yang mandiri untuk meningkatkan kemampuan dan mengelola berbagai sumber-sumber yang dimiliki.

4. Pengertian Koperasi

a. Konsep Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berasaskan atas dasar asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pencapaian kesejahteraan. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UKM menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap perekonomian rakyat (LAKIP Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2010).

Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu :

- 1) Kekeluargaan
- 2) Menolong diri sendiri
- 3) Bertanggung jawab
- 4) Demokrasi
- 5) Persamaan
- 6) Berkeadilan, dan
- 7) Kemandirian

Koperasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah, pemberdayaan koperasi berkaitan dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*pro poor*), potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UKM berperan dalam pembangunan, khususnya dalam perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*). Koperasi merupakan organisasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya, seperti BUMN/D atau organisasi pemerintah. Menurut Palupi (2011:12-13):

“Bahwa koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda yang bermakna anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, selain itu dalam fungsi pencarian dan perolehan dana, koperasi berpegang pada prinsip swadaya artinya diupayakan modal berasal dari kemampuan sendiri yang ada dalam koperasi, namun apabila diperlukan maka dapat mengambil dana dari luar.”

Berdasarkan omzet koperasi diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu, koperasi besar, koperasi menengah, dan koperasi kecil.

- a. Koperasi besar yaitu memiliki omzet (volume usaha) di atas Rp 1 Milyar dalam 1 (satu) tahun.
- b. Koperasi menengah yaitu memiliki omzet (volume usaha) antara Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 Milyar dalam 1 (satu) tahun.
- c. Koperasi kecil yaitu memiliki omzet (volume usaha) kurang dari Rp 500 juta dalam 1 (satu) tahun.

Koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki daerah secara optimal, ke depan koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (*supply chain*) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota. Sasaran peningkatan daya saing diukur dari peningkatan produktivitas per unit usaha, proporsi yang memiliki rekening di bank sebagai indikator akses pada pembiayaan formal, dan jumlah

koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (data LAKIP Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2016). Koperasi sebagai gerakan ekonomi yaitu sebagai sebuah gerakan yang bertumpu pada kekuatan rakyat.

Menurut Basri (2009) dalam Tanjung (2017:64) menyatakan bahwa identitas koperasi sebagai wadah untuk mengorganisasikan kekuatan rakyat yang berserakan, koperasi bukan sekadar sosok bangun usaha, melainkan suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan rakyat, terutama di pedesaan. Sebagai sebuah gerakan rakyat, maka harus disesuaikan dengan potensi lokal yang dimiliki oleh warga setempat, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM), maupun sumber-sumber ekonomi lainnya. Terdapat 3 (tiga) pilar kekuatan ekonomi yang meliputi :

- 1) Meningkatkan produksi yang mengacu pada peningkatan produktivitas dan kemandirian.
- 2) Membangun “serikat dagang rakyat” sebagai wadah UMKM.
- 3) Mendorong Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan membentuk LKM Induk (semacam *holding company*) agar perputaran dana semakin meluas.

Koperasi Wanita Srikandi bergerak melaksanakan berbagai kegiatan usaha serta kegiatan perekonomian rakyat sesuai dengan motto koperasi sebagai “**Agen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal**”. Kegiatan utama Koperasi Wanita Srikandi melaksanakan pemberdayaan masyarakat dibidang produksi olahan pohon kelapa dan turunannya yang meliputi minyak kelapa murni (ZICO), gula kelapa kristal organik, sabun Az-zico dll. Program sertifikasi organik yang telah dilaksanakan oleh Kopwan Srikandi telah berjalan 6 kali dan akan berjalan 7 kali di tahun 2020. Koperasi

Wanita Srikandi memiliki jaringan petani penderes dari beberapa wilayah di Kabupaten Purworejo, Wonosobo, dan Kebumen sejak tahun 2014 silam. Kopwan Srikandi bergerak aktif sebagai agen pemberdayaan melalui bentuk kegiatan pemberdayaan untuk petani-petani penderes nira.

5. Definisi Usaha Kecil Menengah (UKM)

a. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu, kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UKM yang melibatkan banyak kelompok. Kriteria usaha yang termasuk dalam UKM telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, Kecil, dan menengah (UKM). Terdapat beberapa kriteria yakni.

- a. Usaha Mikro yakni, usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00.
- b. Usaha kecil yakni, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan hasil tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
- c. Usaha menengah yakni, usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kekayaan bersih penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan untuk penghasilan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar).

Adanya UKM didasarkan pada prinsip bahwa UKM merupakan penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Dengan adanya kemandirian maka, masyarakat akan lebih diuji kekreatifannya dalam mengelola usaha yang dikembangkan berdasarkan ide ataupun prakarsa diri sendiri. Selain kemandirian, masyarakat di daerah juga dituntut untuk bekerja sama dalam membangun ekonomi kreatif di dalam kelompok, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah, masyarakat bisa memunculkan ide-ide kemajuan untuk daerahnya.

Kemudian, UKM ada karena sebagai perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Adanya kebijakan dari pemerintah tentunya akan mendorong semangat para pelaku usaha di daerah agar terciptanya tujuan-tujuan yang berkeadilan. Potensi usaha lokal dan berorientasi pasar diarahkan sesuai kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah.

b. Jenis-Jenis UKM

Secara umum UKM bergerak dalam 2 (dua) bidang, yaitu bidang perindustrian dan bidang perdagangan barang dan jasa. Adapun bidang atau

jenis usaha yang terbuka bagi usaha kecil dan menengah di bidang industri dan perdagangan sesuai Keppres No. 127 Tahun 2001 adalah sebagai berikut.

- a) Industri makanan dan minuman olahan yang melakukan pengawetan dengan proses pengasinan, penggaraman, pemanisan, pengasapan, pengeringan, perebusan, penggorengan dan fermentasi dengan cara-cara tradisional.
- b) Industri penyempurnaan benang dari serat alam maupun serat buatan menjadi benang bermotif/celup, ikat dengan menggunakan alat yang digunakan oleh tangan.
- c) Industri tekstil meliputi pertenenan, perajutan, pembatikan, dan pembordiran yang memiliki ciri dikerjakan dengan ATBM, atau alat yang digerakkan tangan termasuk batik, peci, kopiah, dan lainnya.
- d) Pengolahan hasil hutan dan kebun golongan non pangan: Bahan bangunan atau rumah tangga, bambu, NIBah, sirap, arang, sabut.
- e) Bahan industri : getah-getahan, kulit kayu, sutra alam, gambir.
- f) Industri perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan.
- g) Industri perkakas tangan untuk pertanian yang diperlukan untuk persiapan lahan, proses produksi, pemanenan, pasca panen dan pengolahan, kecuali cangkul dan sekop.
- h) Industri barang dari tanah liat, baik yang diglasir maupun yang tidak diglasir untuk keperluan rumah tangga.
- i) Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan yang meliputi otomotif, kapal di bawah 30 GT, elektronik dan peralatan rumah tangga yang dikerjakan secara manual atau semi otomatis.
- j) Industri kerajinan yang memiliki kekayaan khasanah budaya daerah, nilai seni yang menggunakan bahan baku alamiah maupun imitasi.
- k) Perdagangan dengan skala kecil dan informasi.

Adanya peran UKM dapat memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Perlu dipahami potensi apa yang dapat dikembangkan, apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan diferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu memperhatikan potensi lokal dan kearifan-kearifan lokal. Pelaku usaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan terkait perbankan/*bankable* karena untuk mengakses penambahan modal usaha. Kemampuan yang mendorong untuk berpikir dan berperilaku inovatif sangat

diperlukan, mengingat persaingan global yang ada. Realitasnya tidak sedikit usaha mikro, kecil atau menengah yang memiliki produk yang bagus dan bernilai tinggi namun, mereka sulit untuk memasarkan produknya.

Pemasaran produk di samping terkait dengan kualitas produk, juga pengemasan dan promosi sangatlah menentukan. Sehingga, pelaku usaha perlu memiliki kemampuan dalam segi pengemasan, promosi, dan pemasaran produknya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan dan pelatihan secara kontinu oleh pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat dalam hal pengembangan usaha dalam skala mikro, kecil, dan menengah. Pembentukan kelompok usaha sangat perlu dilakukan, guna menguatkan kerjasama baik dalam produksi, pemasaran, serta meningkatkan daya saing usaha.

Pelaku usaha kadang sulit untuk mengakses penambahan modal, biasanya mereka dihadapkan oleh jaminan atau agunan yang kurang layak secara perbankan. Perspektif partisipasi hendaknya diarahkan untuk keberdayaan masyarakat bukan untuk mobilisasi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Tjokrowinoto (1987:44-45) yakni ‘partisipasi telah cukup lama menjadi acuan pembangunan masyarakat, akan tetapi makna partisipasi itu sendiri seringkali samar dan kabur’. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat ‘terbatas’ pada implementasi atau penerapan program masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil. Dengan demikian, pemberdayaan adalah partisipasi aktif, nyata, dan mengutamakan potensi-potensi masyarakat

yang dinamis dan hasilnya benar-benar terukur, sehingga pemberdayaan menjadi upaya korektif terhadap konsep pemberdayaan yang pasif tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hakikat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa, mereka dapat menggerakkan potensi yang dimilikinya. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, kultural dalam proses pemberdayaan masyarakat di samping domain politik.

6. Kajian Tentang Pemberdayaan

a. Konsep Pemberdayaan

Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Siagian dalam Kurniawati (2010:hal.10) bahwa pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas, dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi yaitu bahwa proses pemberdayaan yang memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan

atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Priyono dan Onny 1996:42). Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel. **Pemberdayaan adalah sebuah ‘proses menjadi’ bukan ‘proses instan’.** Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu, penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan (Wrintnolo dan Dwidjowijoto, 2007:25 dalam Mardikanto (2013).

Dalam wacana pembangunan, pemberdayaan masyarakat selalu dihubungkan dengan kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Weber (1946) mengatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri. Menurut Parsons (1994) dalam M.Anwas, (2013:49) :

“Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.”

Sedangkan, menurut Ife (1995) :

“Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri.”

Menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* (dalam

Maryati, 2016:13), *empower* mengandung dua pengertian :

- a. *To give ability or enable to*, yang diterjemahkan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan, serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.
- b. *To give power or authority to*, yang berarti memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain yang kurang atau belum berdaya.

Kemudian, istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksestabilitas terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial dan lainnya. Oleh karena itu, *World Bank* (2001) mengartikan :

“Pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan, serta kemampuannya untuk memilih (*choice*) sesuatu yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.”

Berkenaan dengan pemahaman konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (dalam Sulistyani, 2004:79) mengungkapkan bahwa :

“Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.”

Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas. Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi ketrampilan, pengalaman individu, sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Pemberdayaan yang bersifat komunitas berarti proses meningkatkan kemampuan dari suatu komunitas tertentu untuk dapat mengatur komunitasnya secara pribadi. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan hanya pada hasil (*output*). Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat.

Mengutip pernyataan dari Suyono dalam M.Anwas, (2013:51) :

“Bahwa pemberdayaan bukan membentuk superman, tetapi dalam pemberdayaan perlu membentuk “supertim”. Meskipun pemberdayaan bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan untuk tujuan pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar meningkatkan pendapatan, tetapi juga menyangkut aspek kehidupan seperti, gizi dan kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah keluarga, dan anggota, tingkat pendidikan, lingkungan.”

Menurut Tampubolon (2004) dalam Anwas (2013), tujuan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik, mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Anwas (2013) menyatakan bahwa prinsip-prinsip ini menjadi acuan sehingga pemberdayaan dapat dilakukan secara benar, mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

- a) kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi sasaran. hakikatnya manusia memiliki kebutuhan dan potensi yang ada pada dirinya.
- b) sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan. oleh karena itu, sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- c) pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat seperti sifat gotong royong. kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, sebagai jati diri masyarakat yang perlu dikembangkan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- d) pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. partisipasi ini mulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
- e) pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsur pemerintah, tokoh, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan, dan anggota masyarakat lainnya sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan berbagai pendekatan, menurut Kartasasmita (1997) dalam Mardikanto (2013:163), bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan sendiri.

Tabel 1. Peran Tiga Aktor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam pemberdayaan	Bentuk output peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan <i>policy</i> , implementasi Monitoring, dan evaluasi mediasi	Kebijakan : politik, umum, khusus/departemental/sektoral penganggaran, Juknis dan Juklak, penetapan indikator keberhasilan, Peraturan Hukum, penyelesaian sengketa	Dana, jaminan sosial, alat, teknologi, <i>network</i> , sistem manajemen informasi, edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi monitoring, evaluasi	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/ <i>policy action</i> implementasi, donatur, <i>private investment</i> pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi, implementasi monitoring dan evaluasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan, dukungan dalam formulasi kebijakan, <i>policy action</i> , dana swadaya menjadi obyek, partisipan, perilaku utama/subyek, menghidupkan fungsi <i>social control</i> .	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik, dan setengah terlatih.

Sumber : Ambar (2017:97)

b. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Menurut Aryati (2015) diperlukan berbagai program agar tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Adapun program pemberdayaan menurut (Ndraha, 2003:132) dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan Politik, bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar yang diperintah terhadap pemerintah, sehingga yang diperintah mendapatkan apa

yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

- 2) Pemberdayaan Ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah urus, pemikul beban pembangunan.
- 3) Pemberdayaan Sosial Budaya, bertujuan meningkatkan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan *human dignity* (nilai manusia), *human utilization* (penggunaan), dan perlakuan seadil-adilnya.
- 4) Pemberdayaan Lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar antara pemerintah dan lingkungannya mempunyai hubungan saling menguntungkan.

Sedangkan menurut Suharto dalam Mardikanto (2013:170), terdapat lima aspek penting dalam sebuah pemberdayaan yaitu :

- 1) Motivasi
- 2) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan
- 3) Manajemen diri
- 4) Mobilisasi sumber daya
- 5) Pembangunan dan pengembangan jaringan

Adapun bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi adalah dengan memberikan pelatihan pembuatan gula semut organik yang memberikan nilai tambah pada gula kelapa cetak. Dengan jaminan sertifikasi organik di mana petani penderes nira diberikan pengetahuan

melalui proses belajar sosial untuk bisa menyeimbangkan antara tingkat keberhasilan produk dan pelestarian lingkungan serta jaminan untuk kesehatan.

c. Tahapan dalam Pemberdayaan

Dalam melaksanakan perubahan terhadap komunitas atau sistem sosial, agen pemberdayaan menggunakan falsafah membakar sampah yang disampaikan oleh Prof. Pang Asngari dari IPB Bogor :

“Di mana dalam membakar sampah, dimulai dari memilih sampah yang kering, kemudian sampah kering ini mulai membakar. Jika yang kering sudah terbakar, sampah basah lama-kelamaan akan mengering dan terbakar pula. Apabila sampah itu basah semua, maka diperlukan minyak tanah supaya bisa terbakar. Filosofi membakar sampah ini dapat diterapkan ketika agen pemberdayaan melakukan perubahan terencana kepada sasaran.”

Tahap awal, pilihlah sasaran yang mudah dipengaruhi untuk melakukan perubahan. Dalam setiap masyarakat realitasnya selalu ada individu, baik tokoh atau anggota masyarakat biasa. Kemudian lakukan pendekatan dan berikan penjelasan secukupnya tentang proses dan manfaat perubahan sehingga mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan perubahan tersebut. Namun, apabila agen pemberdayaan sulit untuk dipengaruhi, maka diperlukan bantuan lain bentuk lain untuk seperti kemudahan, hadiah, bantuan, dan bentuk insentif lainnya.

Pemberdayaan sangat berkaitan erat dengan demokrasi atau kebebasan individu atau masyarakat yang dimulai dengan adanya kesadaran akan kebutuhan dan potensinya. Partisipasi juga bukan sekadar sebagai alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan

pembangunan. Makna partisipasi dalam pemberdayaan menurut Asngari (2006) yakni, individu atau masyarakat yang secara aktif terlibat dalam :

(1) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, (2) Keterlibatan dalam pengawasan, (3) Keterlibatan di mana masyarakat mendapatkan manfaat dan penghargaan, (4) Partisipasi sebagai proses pemberdayaan (Empowerment), (5) Partisipasi bermakna kerja kemitraan (*Partnership*), (6) Partisipasi sebagai akibat dari pengaruh *Stakeholder* menyangkut pengambilan keputusan, pengawasan, mendapatkan manfaat atau penghargaan dari hasil pembangunan tersebut, serta bermitra dengan berbagai pihak yang terkait.

Menciptakan kesempatan berpartisipasi antara lain melalui, pengembangan sumber daya alam yang tersedia, memfasilitasi pasar yang terbuka, membantu membangun sarana dan prasarana, termasuk mendorong untuk menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan. Kesempatan lapangan pekerjaan menjadi sangat penting mengingat kesempatan bekerja merupakan indikator dalam meningkatkan keberdayaan, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih rinci menurut Suyono (2009), untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlu ditempuh beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

- (1) **Tahapan awal** disebut sebagai perluasan jangkauan. Dalam tahapan ini, upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana, dan mampu dipahami oleh banyak orang. Semua orang mampu mengerti dan mengikuti sehingga akhirnya bisa memahami walaupun kadarnya berbeda-beda. Komunikasi yang digunakan adalah bersifat massal atau komunikasi massa. Dalam tahapan ini perlu dilakukan pendekatan terhadap pemimpin formal ataupun informal, karena akan mampu mempengaruhi atau dijadikan sebagai contoh.
- (2) **Tahapan pembinaan (*maintenance*)**, yaitu setelah komunikasi itu berlangsung, tentunya akan ada respon oleh masyarakat. Kemudian dilakukannya pembagian sasaran yang jelas berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan potensi.
- (3) **Tahapan pelebagaan atau pembudayaan**, pada tahapan ini informasi tidak datang dari pemerintah, tetapi dari anggota atau

kelompok masing-masing. Di sini muncul beragam tingkatan dari masyarakat untuk mencari padanan informasi.

- (4) **Tahapan terakhir** adalah umpan balik atau reward. Reward ditujukan untuk memberikan apresiasi atau sebagai perangsang. Dalam perubahan sosial jangan sampai ada hukuman, karena hukuman akan mengeliminir partisipasi. Jika ada kelompok yang belum berhasil, maka harus ada pendekatan oleh anggota lain yang sudah berhasil.

7. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Sari, dkk (2018) menyebutkan bahwa kesejahteraan terbagi menjadi dua aspek utama yaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial meliputi aspek perumahan, hubungan sosial, administrasi, keamanan, keterlibatan sosial, kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan keluarga. Menurut Embong (2005), UNDP telah memperkenalkan tiga konsep pembangunan yang meliputi perwujudan kesejahteraan hidup komunitas yaitu : (1) pekerjaan, (2) pendapatan, dan (3) Kesehatan. Kesejahteraan ekonomi meliputi aspek transportasi, komunikasi, pendapatan dan karir. Kesejahteraan hidup dapat dijadikan dua kategori yaitu objektif dan subjektif. Kesejahteraan hidup objektif merupakan keperluan hidup yang dapat dicapai oleh individu dan dapat dilihat secara luaran seperti pendapatan, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kesejahteraan subjektif dinilai berdasarkan kepuasan dan nikat hidup yang dirasakan oleh individu seperti merasa senang dan bersyukur karena mempunyai pekerjaan yang baik, anak-anak yang sukses dan mempunyai keluarga yang bahagia (Norizan, 2003 dalam Publikasi BPS tahun 2019). Kesejahteraan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dinyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar mampu hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Indikator kesejahteraan rakyat adalah kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, dan sosial lainnya (BPS, 2017).

Dijelaskan dalam Soetomo (2012) bahwa pembangunan masyarakat merupakan proses perubahan menuju pada kondisi yang lebih baik. Kondisi tersebut juga disebut sebagai peningkatan taraf hidup serta tujuan pembangunan masyarakat. Untuk menentukan atau mengklasifikasikan kelompok miskin dalam lapisan masyarakat digunakan konsep garis kemiskinan. Menurut Suharto (2009) tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan baik karena kondisi internal maupun kondisi eksternal. Beberapa kelompok yang dikategorikan sebagai kelompok lemah/tidak berdaya meliputi :

- a. kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, dan masyarakat terasing.
- c. kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Menurut Berger dan Nienhaus dan Nisbet (dalam Suharto, 2009) menjelaskan bahwa struktur-struktur penghubung (*mediating structures*) yang memungkinkan kelompok-kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosial yang lebih luas, kini cenderung melemah. Adapun ketidakberdayaan berasal dari penilaian negatif pada diri sendiri, interaksi negatif dengan lingkungannya, dan blokade serta hambatan yang berasal

dari lingkungan yang lebih besar (Suharto (2009). Menurut Solih dalam Rini (2019) keluarga yang sejahtera dan bahagia adalah keluarga yang dapat mencapai kesuksesan di dalam hidupnya baik materiil, maupun spiritual, dan sosial. Indikator keluarga sejahtera rumah tangga menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Rini (2019) ada beberapa variabel yaitu :

- a. Pendapatan rumah tangga adalah seluruh penghasilan atau penerimaan berupa uang atau barang dari semua anggota rumah tangga yang diperoleh baik berupa upah atau gaji, pendapatan dari usaha rumah tangga, maupun penerimaan transfer.
- b. Konsumsi makanan rumah adalah makanan yang dikonsumsi anggota rumah tangga tanpa memperhatikan asalnya.
- c. Keadaan rumah tinggal adalah kondisi tempat tinggal seperti, kondisi bangunan, ruangan, bahan bangunan yang digunakan serta keadaan sanitasi.
- d. Fasilitas tempat tinggal adalah sarana untuk mendukung kelengkapan tempat tinggal seperti fasilitas air, minum, jamban, listrik, telepon, dan perabot rumah tangga.
- e. Pakaian anggota rumah tangga adalah pakaian/bahan pakaian yang dipakai seperti kemeja, celana, dan sebagainya yang dilihat mutunya.
- f. Kesehatan anggota rumah tangga adalah kondisi kesehatan anggota rumah tangga dilihat dari segi seringnya mengalami gangguan kesehatan, baik gangguan penyakit menahun (kronis) maupun gangguan kesehatan lainnya yang dapat mengganggu aktivitasnya.
- g. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi adalah kebaikan kemudahan baik dari segi ongkos transport terjangkau dan fasilitas kendaraan memadai.
- h. Kemudahan memasukkan anak ke SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan Tinggi, karena terjangkau biaya sekolah, jarak ke sekolah.
- i. Rasa aman dari kamtibmas seperti, rasa aman dari segala kejahatan seperti penodongan, perampokan, dan pemerasan.
- j. Kemudahan mendapatkan bacaan (surat kabar, majalah, dan sebagainya).
- k. Kehidupan beragama adalah kebebasan menjalankan/menunaikan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, termasuk adanya sarana, kerukunan, dan suasananya.

Definisi yang diberikan oleh *World Bank* dalam Sarah (2017) bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara atau menyuarkan pendapat, ide, atau gagasan-gagasan serta kemampuan dan

keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk) yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. dengan kata lain, bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat yang mengandung arti untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat dalam arti :

- a. perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan
- b. perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan)
- c. kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
- d. terjaminnya keamanan
- e. terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa takut dan kekhawatiran.

8. Kajian Tentang Dampak

Agustina dan Ricka (2016) mendefinisikan bahwa teori perubahan sosial sebagai awal mula munculnya teori tentang dampak sosial dan ekonomi. Dampak secara etimologis berarti pelanggaran, tubrukan, atau benturan (Soekanto, 2012:378). Dampak timbul akibat interaksi sosial dan perilaku sosial dalam masyarakat. dampak itu sendiri bisa berarti konsekwensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'. Dampak sosial menurut Surto dalam Agustina dkk (2016) memiliki beberapa indikator seperti (1) perubahan sistem sosial, (2) nilai-nilai individu dan kelompok, (3) perilaku hubungan sosial, (4) gaya hidup dan ekspresi mode, (5) struktur masyarakat. Sedangkan untuk dampak ekonomi menurut Cohen (1995) dalam Purwanto (2015) terdiri dari (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Pengertian sosial ekonomi yaitu suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan

menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat (Ismail, 2018).

Dampak bisa berarti konsekwensi sebelum dan sesudah adanya 'sesuatu'. Dampak pemberdayaan mengarah pada perubahan sosial yaitu mengarah pada 'kemajuan' (progress), masyarakat mendapatkan dampak dari adanya kegiatan sebagaimana kedudukannya sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan masyarakat. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:110), hasil atau dampak pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan keluarga, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan lainnya) menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, derajat kesehatan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok). Dampak pemberdayaan mengarah pada perubahan sosial yaitu mengarah pada 'kemajuan' (progress), masyarakat mendapatkan dampak dari adanya kegiatan sebagaimana kedudukannya sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:110), hasil atau dampak pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan keluarga, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan lainnya) menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, derajat kesehatan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok). Pemberian posisi ini disertai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkat sosial

merupakan faktor non ekonomi seperti budaya, pendidikan, umur dan kelamin, sedangkan faktor ekonomi seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan, dan investasi.

9. Konsep Sosial Ekonomi

Adile, dkk (2015) sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, usia, jenis rumah tinggal, dan kekayaan yang dimilikinya. Adapun faktor-faktor sosial ekonomi selalu berkaitan dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut.

a. Pendidikan

Dikutip dari Kusnaedi (2013) dalam Adile, dkk (2015) pendidikan merupakan proses perkembangan pribadi, proses sosial, *professional course*, serta seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang dikembangkan masa lampau oleh setiap generasi bangsa.

b. Status sosial

Ukuran paling relevan dari perbedaan kelas atau status yang ditemukan di dalam pola interaksi suatu kelompok, karena kriteria interaksi yang tepat dari status sosial.

c. Pendapatan

Menurut Reksoprayitno dalam Rini (2019:23) pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan seperti kesehatan dan pensiunan. Sedangkan pendapatan keluarga merupakan jumlah penghasilan riil dari seluruh

anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga.

d. Alokasi pendapatan

Menurut Djojohadikusumo (1985) dalam Adile (2015:4) bahwa alokasi pendapatan secara merata dalam suatu kebutuhan ekonomi keluarga diarahkan untuk mengurangi pemborosan dan dialihkan kepada upaya meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dengan memperluas gerak anggota keluarga agar mereka dapat memberikan nilai pada kegiatan ekonomi produktif.

Sehingga dalam penelitian ini, akan memfokuskan pada dampak pemberdayaan petani penderes melalui koperasi dalam bidang kesejahteraan yang dilihat dari dua aspek yaitu sosial ekonomi pada :

- a. penyerapan tenaga kerja/membuka kesempatan kerja bagi masyarakat desa Ngasinan
- b. perubahan penghasilan pada hasil usaha gula semut
- c. berkembangnya nilai-nilai budaya pada masyarakat desa Ngasinan

B. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian relevan yang terkait dengan “Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)” adalah sebagai berikut.

- 1) Penelitian yang dilakukan Sulistyio Adi P. (2013) tentang Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Klaten (Studi Pengecoran Logam di Kecamatan Ceper), menyimpulkan bahwa Disperindagkop Kabupaten Klaten melakukan dua tahapan dalam pemberdayaan yaitu, pencerahan dan pemberian

daya sebagai bantuan dalam meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelaku usaha. Kemudian, faktor yang mendukung kebijakan pemberdayaan UMKM sektor pengecoran logam adalah terdapat komitmen yang tinggi dari pihak pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha pengecoran logam, sehingga berbagai kelemahan dari pelaku usaha akan dikelola sebaik mungkin.

- 2) Penelitian yang dilakukan Muh. Ridwan (2014) tentang Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustri, Perdagangan, Koperasi, Dan UMKM Kota Bontang, dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang sangat bermanfaat terhadap pengembangan usaha pelaku IKM. Adapun faktor yang menghambat terhadap pembinaan industri kecil dan menengah pada Dinas perindagkop dan UMKM Kota Bontang adalah kurangnya jumlah aparat Pembina IKM khususnya tenaga penyuluh dan pendamping, sebagian aparat Pembina IKM yang ada di Dinas Perindagkop dan UMKM Kota Bontang tidak sesuai dengan kompetensi (*basic* pendidikan yang dimiliki), terbatasnya kemampuan aparat pembina IKM, terbatasnya alokasi anggaran untuk keperluan kegiatan pembinaan IKM sehingga tidak semua program kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana, adanya sikap dan perilaku IKM yang terkesan manja sehingga selalu mengharapkan bantuan pemerintah, karakteristik dan pola pikir pelaku IKM tidak mudah untuk berubah, kurangnya perencanaan secara matang dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Penelitian yang dilakukan Pradnya Paramita H. (2014) tentang Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu) menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Usaha Kecil Menengah (UKM) berperan penting dalam perekonomian daerah khususnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja. Hal ini didasarkan pada kenyataannya bahwa, di satu pihak jika jumlah pengangguran meningkat mengikuti jumlah penambahan penduduk tiap tahunnya, maka harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru yang mendukung, seperti UKM. Jenis UKM yang relatif padat karya, sehingga memungkinkan membantu penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap. Dari potensi alam yang mendukung Kota Batu memiliki kriteria untuk penumbuhan iklim usaha UKM. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa faktor Modal UKM dan laba UKM berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batu. Untuk itu diperlukan dukungan dari pemerintah untuk membantu kemudahan akses permodalan khususnya untuk pembinaan UKM.

- 4) Penelitian yang dilakukan Moch Rochjadi H. (2014) tentang Strategi Pemberdayaan UMKM berbasis "*Community Based Economic Development*" (Studi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)" menyimpulkan bahwa dalam Strategi pemberdayaan UMKM yang perlu dilakukan di Kecamatan Sukodono oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah yang berbasis "*Community Based Economic Development.*" Dimana yang merupakan prioritas penting dan mendesak (Prioritas I) adalah dilakukan pada pelaku UMKM/komunitas usaha pada skala Mikro karena pada jenis UMKM ini di Kecamatan Sukodono jumlahnya paling banyak, kemudian masalah sumber daya manusianya, problema yang dihadapi oleh para pelaku UMKM pada skala

kecil ini yang perlu dipikirkan adalah masalah permodalan dan pemasaran. Strategi pemberdayaan UMKM di Kecamatan Sukodono yang akan dilakukan lebih baik dan tepat sasaran, maka perlu didukung pula dengan pendataan yang lebih baik.

- 5) Penelitian yang dilakukan Bagus Suryolaksono (2015) tentang Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (*Handycraft*) Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya menyimpulkan bahwa kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Disperindag Kota Surabaya merupakan hasil implementasi dari rencana strategis yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya. Upaya yang dilakukan adalah dengan pembinaan terhadap 329 UKM dan 15 sentra kampung unggulan *handycraft*. Dalam program tersebut diadakan pelatihan-pelatihan, pameran, dan pendampingan kepada pelaku usaha. Sehingga dengan adanya program dari Disperindag maka akan menambah omzet penjualan dan turut mengembangkan potensi sumber daya manusianya yakni para pelaku usaha.
- 6) Penelitian yang dilakukan A. Muhammad Farid S. (2015) tentang Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperindag Kabupaten Maros (Studi Pada Sektor Perdagangan), dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa adanya formulasi strategi dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Adanya faktor Partisipasi masyarakat Maros tinggi terhadap program yang dikeluarkan oleh Dinas, sementara fase emansitoris menunjukkan bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Maros

pada fase ini sudah semakin berkembang dengan jumlah asset, volume, dan sisa hasil usaha yang cukup besar.

- 7) Penelitian yang dilakukan Wuri Aryati (2015) tentang Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tangan Rumput Aji Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di Dusun Tanjunggunung Desa Tanjungharjo Nanggulan Kulon Progo. Dalam penelitian disimpulkan bahwa dampak pemberdayaan melalui usaha kerajinan tangan rumput Aji dengan mengembangkan dan membangun potensi yang ada di wilayah desa Tanjungharjo mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun manfaat pemberdayaan yaitu menambah pendapatan ekonomi dan menciptakan produk lokal dengan mengedapankan bahan alami yang ramah lingkungan. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam upaya pemberdayaan. Bentuk keterlibatan masyarakat, pemerintah menjadi penting mengingat adanya bentuk hambatan dalam setiap pelaksanaan upaya pemberdayaan sehingga perlu siasat dan langkah-langkah strategis untuk memberikan solusi pada hambatan yang ada.
- 8) Penelitian yang dilakukan Alexander Phuk Tjilen, Et Al (2016) "*Implementation of the Economic Program Empowerment of Local Communities in Sota District, Merauke Sub District*". Disimpulkan dari hasil penelitian, bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal akan berhasil apabila ditangani secara spesifik dengan memperhatikan budaya yang dianut oleh masyarakat lokal. Sumber daya manusia adalah unsur fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat yang sudah seharusnya dibiayai dengan dana yang lebih besar dari program

lainnya dan masyarakat perlu mendapat pendampingan yang tinggal bersama mereka dan mengerti dengan pemanfaatan sumber daya alam.

- 9) Penelitian yang dilakukan Mutiara Pradipta (2017) tentang Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa indikator-indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga petani padi. Sebaiknya ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah kepada para petani padi dalam hal efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan lahan pertanian karena lahan yang sempit merupakan penyebab keluarga petani padi kesulitan mencapai kesejahteraan yang diinginkan.
- 10) Penelitian yang dilakukan Hamami Cahya Prastika (2017) tentang Peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pelaku usaha mikro kecil, menengah (UKM) dalam upaya pengembangan kerajinan kulit di kabupaten Magetan, dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah daerah Magetan sebagai Fasilitator, Regulator, katalisator bagi perkembangan industri kerajinan kulit di Magetan sudah menjalankan sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2008, adanya bentuk dukungan penuh/partisipasi masyarakat terhadap pemerintah daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil.
- 11) Penelitian yang dilakukan Ambar Pertiwi (2018) tentang Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM kota Malang berjalan maksimal dan merata dikarenakan ada

faktor lain yaitu, ketidakvalidan data mengenai jumlah seluruh UKM yang tergabung dalam Paguyuban di bawah naungan dinas. Faktor pendukung kemajuan UKM adalah dengan adanya *e-bussiness*, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan SDM, anggaran, kesulitan permodalan UKM, dan masalah teknis UKM.

- 12) Penelitian yang dilakukan Dinna Pangestuti (2018) tentang Pengaruh Citra, Kualitas Layanan, dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Anggota Pada Koperasi Wanita Srikandi Kabupaten Purworejo menyimpulkan bahwa citra, kualitas layanan, dan kepercayaan secara bersama-sama dan parsial mempengaruhi kepuasan anggota. Saran dari penelitian ini adalah (1) dalam rangka meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan, koperasi harus memperhatikan masyarakat sekitar dengan memberikan pengadaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), misalnya dengan memberikan bantuan dana untuk sekolah PAUD di sekitar koperasi, (2) dalam rangka meningkatkan reliability, koperasi harus mengadakan pelatihan kerja supaya sumber daya kepengurusan dalam mengelola manajemen usaha simpan pinjam dapat lebih baik lagi, (3) dalam rangka meningkatkan kesetiaan anggota, koperasi harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada anggota saat bertransaksi.
- 13) Penelitian yang dilakukan Vegy Dwi Hartanti (2018) tentang Penerapan *Social Entrepreneurship* Pada Koperasi Wanita Srikandi, menyimpulkan bahwa (1) Dalam pendiriannya Koperasi Wanita Srikadi dilatar belakangi oleh kesadaran pendiri dalam melihat dan mengenali permasalahan yang ada di masyarakat yang kemudian dituangkan dalam sebuah badan usaha yaitu koperasi yang didalamnya

diselipkan sebuah misi sosial yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. (2) Koperasi Wanita Srikandi memiliki dua unit usaha yaitu unit simpan pinjam dan unit produksi, dimana keduanya sama-sama menerapkan kewirausahaan sosial. Hal ini terlihat dari adanya sosok wirausaha koperasi dan bentuk kegiatan yang mengandung nilai-nilai sosial. (3) Dampak sosial yang terlihat dengan keberadaan Koperasi Wanita Srikandi adalah peningkatan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya alam lokal di Purworejo, dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

- 14) Penelitian yang dilakukan Sudjinar (2018) tentang Pemberdayaan Potensi Masyarakat Melalui Pendampingan UMKM dan Koperasi DI Kelurahan Telaga Sari Kota Balikpapan, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan UMKM dan Koperasi sangat membantu dalam pengembangan usaha. Upaya pendampingan dapat memberikan inovasi dan strategi baru dalam pemasaran produk, dan juga bantuan permodalan yang sangat penting dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Telagasari kota Balikpapan.
- 15) Penelitian yang dilakukan Mustangin, dkk (2018) tentang Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Komunitas Petani di Daerah Cepogo, dalam penelitian tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam Tekun) kepada petani bertujuan untuk memudahkan akses permodalan. Dengan adanya kerja sama antara Koperasi dan komunitas petani, sehingga akses untuk permodalan sebagai operasional usaha pertanian dan peternakan dapat berjalan

dengan baik sehingga dapat mencapai target kesejahteraan anggota suatu kelompok dalam masyarakat yakni komunitas petani di daerah Cepogo, Boyolali. Selain itu dampak dari adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Kospin Tekun dapat terlihat dari segi ekonomi yaitu pengembangan usaha, selain itu kontribusi untuk masyarakatnya adalah terjaganya tradisi masyarakat dengan mengurangi beban pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan bersih desa.

- 16) Penelitian yang dilakukan Azis, A.N, (2019) tentang Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Tulungagung (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Tulungagung). Dalam penelitian ini kemiskinan dimaknai sebagai suatu permasalahan sosial yang tidak hanya disebabkan oleh masalah ekonomi melainkan juga masalah politik, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri. Di sisi lain kemiskinan yang terjadi Kabupaten Tulungagung terutama yang dirasakan oleh pelaku UMKM ini lebih mengarah pada dimensi ke dua yaitu Ketidakberdayaan (*powerless*) yang disebabkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama ini seperti; rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatasnya akses permodalan, iklim usaha yang belum kondusif dan terbatasnya akses pemasaran.
- 17) Penelitian yang dilakukan Marhaeni, A. A. I. N., Et Al. (2019). "*Empowering Small Industry Of Wood Carving Handicraft in Bangli District.*" Dalam penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan industri kerajinan kayu skala kecil di Kabupaten Bangli dipengaruhi oleh modal sosial dan sumber daya manusia. Sementara itu, modal sosial mempengaruhi sumber daya manusia dan

biaya transaksi. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah harus meningkatkan sumber daya manusia dan modal sosialnya untuk meningkatkan pemberdayaan industri kerajinan kayu skala kecil. Para pengrajin perlu lebih meningkatkan keterampilan mereka untuk meningkatkan peran sumber daya yang mereka miliki. Peran pemerintah perlu ditingkatkan, terutama dalam memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan berinovasi agar dapat meningkatkan pemberdayaan industri kerajinan kayu kecil di Kabupaten Bangli. Mempertahankan kepercayaan, kejujuran, dan kerja sama timbal balik untuk menekan kemungkinan biaya transaksi.

- 18) Penelitian yang dilakukan Alexander Phuk Tjilen, Et Al (2018), “*CSR Impelementation in Empowering Local Palm Community in District Merauke (Case Study of Merauke Integrated Food-Energy Estate Project/MIFEE)*”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan evaluasi pemerintah tentang kebijakan CSR yang harus dijalankan oleh investor dapat menciptakan suatu model implementasi CSR yang sesuai untuk masyarakat lokal yakni masyarakat asli Papua.

Mengacu pada penelitian terdahulu mengenai upaya pengembangan usaha kecil menengah (UKM), penelitian ini dilakukan dalam rangka melengkapi penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam penelitian ini terdapatnya perbedaan dan persamaannya, untuk persamaannya adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui Dinas koperasi, UKM, dan perdagangan dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah daerah agar lebih maju dan berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peraturan daerah dan program-program yang

kedudukannya untuk mengangkat potensi unggulan berdasarkan pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing wilayah.

Kemudian, bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi dalam menggerakkan komponen masyarakat yaitu khususnya petani penderes nira untuk mengolah potensi lokal pedesaan agar program yang dibawa tepat sasaran dan berdampak positif pada perekonomian warga desa. Peranan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan menjadi acuan untuk bertindak dalam mengatasi permasalahan terkait usaha mikro daerah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah terkait teori implementasi kebijakan yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menggunakan pendekatan kesesuaian yang digagas oleh David C.Korten dengan perspektif *People Centered Development* (Pembangunan Berbasis Rakyat). Sehingga, peneliti ingin menguraikan tentang bentuk kegiatan dalam mengembangkan potensi nira kelapa oleh penderes nira melalui pemberdayaan petani penderes, agar produk yang diolah menjadi produk unggulan dan dapat menambah nilai tambah produk yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani penderes dan merawat nilai-nilai sosial dalam masyarakat local desa Ngasinan. Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Koperasi Wanita Srikandi sebagai pihak swasta sekaligus mencapai upaya untuk menumbuhkan iklim bisnis usaha melalui kemandirian koperasi daerah.

Koperasi Wanita Srikandi sebagai agen pemberdayaan terhadap petani penderes nira juga dilihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan untuk tetap dapat menjalankan pembangunan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Sehingga keterkaitan antara tiga aktor pemberdayaan bisa tercipta

korelasi dan koordinasi yang tepat sehingga segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat bisa teratasi dengan baik. Sehingga bentuk kesesuaian antara jenis kebijakan (program yang dibawa), organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran dalam penelitian ini sesuai dengan bentuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, sehingga dapat mengembangkan kapasitas yang dimiliki oleh suatu masyarakat yakni kesejahteraan sosial ekonomi petani penderes nira di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

C. Kerangka Berpikir

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pemerintah dalam menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu faktor penentu pencapaian kesejahteraan. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan usaha mikro menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian terhadap perekonomian rakyat. Kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang klasikal, di mana ketidakberdayaan itu menjadikan masyarakat rentan untuk masuk dalam jurang kemiskinan. Sebagai pendekatan dalam pembangunan masyarakat, perlu adanya daya dukung untuk memperbaiki perekonomian, dimulai dari dunia usaha untuk menciptakan lapangan kerja, melalui usaha mikro masyarakat mampu untuk memanfaatkan potensi daerahnya. Koperasi memiliki karakteristik yang sesuai untuk dapat mengelola berbagai potensi yang dimiliki daerah secara optimal, ke depan koperasi perlu difasilitasi untuk terlibat aktif dalam rantai pasok (*supply chain*) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya anggota. Sasaran peningkatan daya saing diukur dari

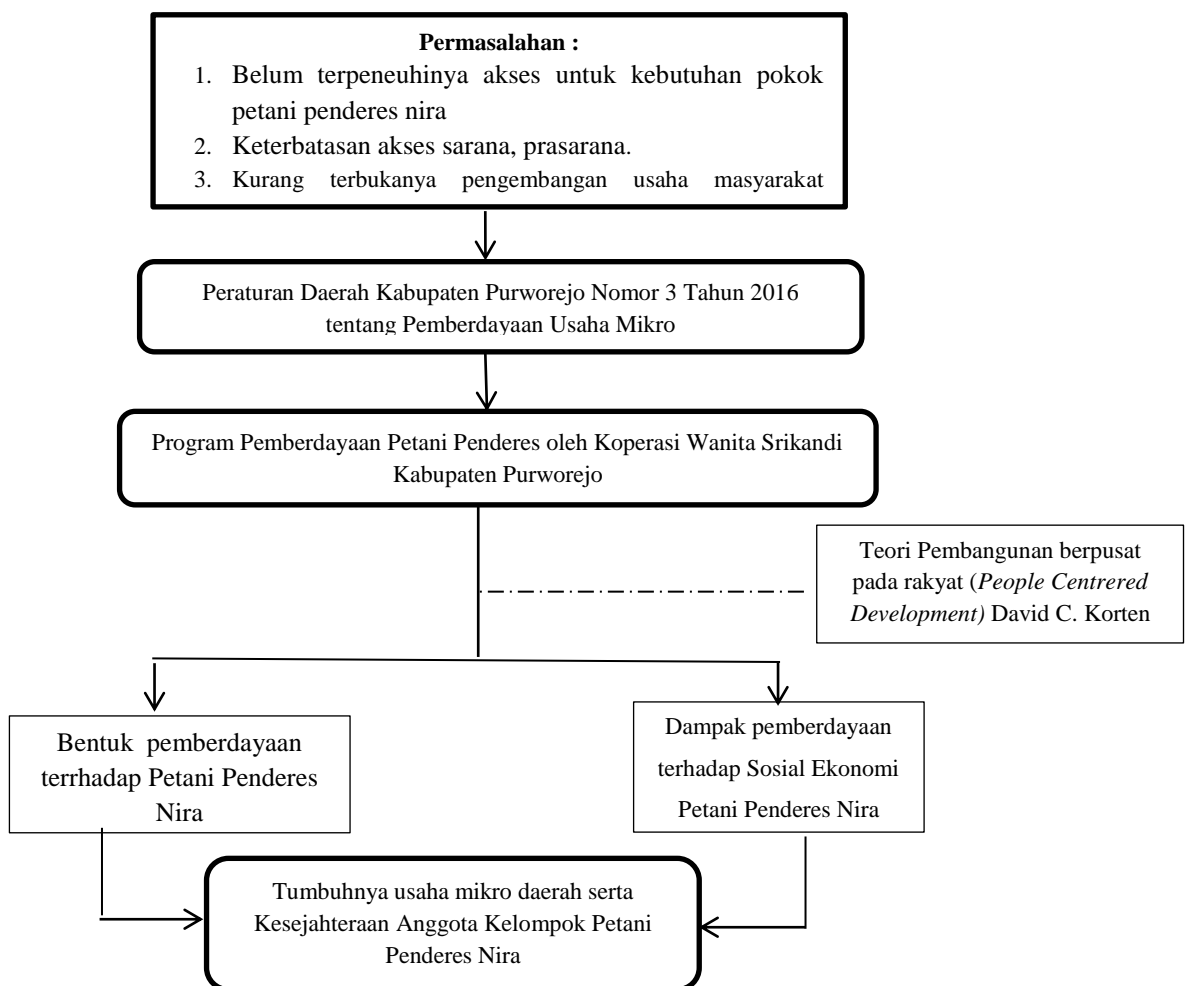
peningkatan produktivitas per unit usaha, proporsi yang memiliki rekening di bank sebagai indikator akses pada pembiayaan formal, dan jumlah Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pendekatan implementasi kebijakan yang digagas oleh David C. Korten untuk menganalisis keterkaitan tiga faktor utama dalam implementasi kebijakan yang meliputi kesesuaian antara jenis kebijakan atau program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Sehingga dapat dilihat sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui konsep pembangunan berpusat pada rakyat (*people centered development*). Karena usaha kecil mampu mendorong kemampuan masyarakat untuk maju dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bersamaan dengan upaya untuk menumbuhkan iklim usaha berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha unggulan. Koperasi Wanita Srikandi mengembangkan potensi pembuatan gula semut organik harus terus ditingkatkan untuk mencapai pembangunan masyarakat dengan prakarsa pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri. Menderes/menyadap nira merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo untuk memulai usaha gula semut karena letak geografisnya yang sangat potensial mulai dari keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia (SDM), keadaan kelompok masyarakat, sarana dan prasarana, dan potensi ekonomi serta keunggulan lokal lainnya. Kemudian, sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap kemunculan dan inovasi suatu produk.

Dalam hal ini, aspek kesehatan dan keorganikan serta nilai kepraktisan suatu produk sangat menentukan, sehingga muncul ide untuk pembuatan gula kristal organik atau gula semut. Gula dengan bentuk serbuk kristal tersebut lebih mudah untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan tambahan makanan, selain mengandung banyak vitamin dan baik untuk kesehatan. Produk gula semut selain menambah nilai tambah dari gula cetak, juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari semisal untuk membeli beras, sembako dan kebutuhan rumah tangga lain karena adanya perbedaan selisih harga. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi terhadap para petani penderes nira sejauhmana perannya dalam menciptakan keberdayaan dalam suatu masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan yang berada pada konteks implementasi kebijakan daerah.

Kemudian, perolehan dampak manfaat pada kesejahteraan petani penderes setelah adanya kegiatan pemberdayaan apakah kesejahteraan bisa diurai sejak menjadi bagian dari koperasi, atau justru berada posisi yang stagnan untuk pencapaian kesejahteraan tersebut sehingga bisa dilihat dari faktor-faktor apa saja yang sekiranya menghambat ataupun mendukung dalam pengembangan potensi sumber daya lokal oleh petani penderes nira. Kegiatan pemberdayaan yang akan bermuara pada pencapaian kesejahteraan melalui daya saing serta *brand image* agen pemberdayaan harus dilaksanakan dengan jalan kerja sama dan sinergi dalam membangun kemajuan dan pengembangan pola pikir untuk penguatan masyarakat sehingga kata “berdaya” dapat terwujud melalui kegiatan pemberdayaan. Konsep pemberdayaan pada penelitian ini, menggunakan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat di mana

rakyat dijadikan sebagai subyek dan tidak hanya sebagai obyek yang menerima program tanpa ada niatan untuk mengembangkan daya atau potensi yang mereka miliki. Pembangunan merupakan proses untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai aspirasi mereka yakni petani penderes nira atau dalam arti kedaulatan berada di tangan rakyat. Kerangka berpikir dari penelitian ini secara singkat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Kerangka berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pemberdayaan terhadap petani penderes nira dalam rangka memajukan potensi lokal di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo yaitu gula semut organik yang berasal dari hasil nira. Kebijakan yang ditujukan untuk memajukan usaha mikro melalui koperasi daerah yang mandiri dan produktif sehingga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di pedesaan dengan bentuk keterlibatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo dalam memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan AD/ART sesuai jati diri koperasi melalui Petugas Penyuluh Lapangan Koperasi (PPKL). Pemberdayaan dilakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi kelompok penderes di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada. Atau merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka, untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong, 2017:hal.5-6). Karena penelitian ini mengacu pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi kepada petani penderes nira di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo,

kemudian pandangan umum terkait pelaksanaan program dan kebijakan untuk mengatur pengembangan usaha gula semut yang turut mengangkat potensi unggulan daerah yang sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016:14). Pendekatan penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap data yang ada di lapangan dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan sesuatu seperti apa yang ada di lapangan dan menghubungkan sebab akibat terhadap sesuatu yang terjadi pada saat penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realitas mengenai bentuk pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi guna memberikan penguatan kapasitas kepada petani penderes nira/pengrajin gula semut organik. Bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan dengan dukungan seluruh unsur baik masyarakat, pemerintah dan swasta.

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo Jalan Jenderal Sudirman No. 22, Ngupasan, Pangen Juru Tengah, Purworejo, Kantor Koperasi Wanita Srikandi di Jalan Magelang Km. 01, Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo, Kantor Kepala Desa Ngasinan, serta pada kelompok petani penderes nira/pengrajin gula semut di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Peneliti tertarik karena adanya temuan fakta-fakta di lapangan ataupun di pemberitaan media lokal atau nasional terhadap kurangnya keberdayagunaan potensi usaha mikro daerah terutama gula semut atau gula kelapa bubuk di Purworejo, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan harapan dari penelitian ini dapat meningkatkan kinerja kegiatan yang

dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan produksi gula semut organik agar lebih berdaya dan maju.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada upaya yang ditempuh Koperasi Wanita Srikandi dalam mengembangkan potensi daerah melalui pemberdayaan petani penderes nira. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan agar petani penderes nira dapat berdaya dan mampu mengembangkan potensi sumber daya lokal di sekitar mereka dengan baik dan memperoleh nilai tambah dari setiap pengolahannya. Kemudian, dampak ataupun hasil yang diperoleh dari adanya pemberdayaan tersebut yang berpeluang untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi petani penderes nira dengan memunculkan ekonomi baru di desa Ngasinan. Serta dampak setelah penerapan program terkait pencapaian pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan daya saing potensi unggulan daerah dan mengembangkan nilai-nilai sosial yang tercipta di dalam masyarakat desa Ngasinan. Pada dasarnya penentuan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Masalah dikatakan *feasible* apabila terdapat berbagai sumber daya untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk menilai masalah tersebut penting, urgen, *feasible*, maka perlu dilakukan melalui analisis masalah (Sugiyono, 2016:207).

Dalam penelitian kualitatif, terdapat dua maksud dalam penetapan fokus penelitian yaitu sebuah upaya membatasi studi dan berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-ekslusi suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Penetapan fokus sebagai sebagai pokok masalah penelitian dalam usaha menemukan batas penelitian (Moleong, 2017:12). Fokus penelitian yang dilakukan adalah mengenai implementasi

kebijakan dalam pemberdayaan usaha mikro gula semut di Kabupaten Purworejo melalui Koperasi Wanita Srikandi. Di mana peneliti dapat mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah yang dijalankan dalam upaya pemberdayaan usaha mikro gula semut serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan usaha mikro gula semut yaitu melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal yang sesuai dengan *motto* dan AD/ART Koperasi Wanita Srikandi.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data primer dalam penelitian ini adalah memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:225). Sumber data primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi. Informasi yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan kemudian akan di analisis mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan daya saing usaha mikro dan keterlibatan Koperasi Wanita Srikandi sebagai agen pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Purworejo. Informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2. Sumber Data Primer/Informan Utama

No.	Informan	Keterangan
1.	Rimi Ani, SE	Kasie Kelembagaan Bid.Koperasi Dinas KUKMP Kab. Purworejo
2.	Nur Hadi Trionggo, SH,	Kasie Kelembagaan Bid. UMKM

	M.AP	Dinas KUKMP Kab. Purworejo
3.	Defry Maulana, S.Pd	PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan)
4.	Andi Septo K., S.T.	Kasie Promosi dan Jaringan Usaha Bid. UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo
5.	Sri Susilowati, SE	Ketua Koperasi Wanita Srikandi
6.	Hanggoro Susanto, S.P., MM	<i>General Manager</i> Koperasi Wanita Srikandi
7.	Budiyanto	ICS/ <i>internal control system</i> (Pendamping Lapangan) Koperasi Wanita Srikandi
8.	Antoko	Sekretaris Desa Ngasinan
9.	Turijan	Ketua Kelompok Petani & Pengrajin Gula Semut
10.	Neriyo Suwito	Anggota Kelompok Petani & Pengrajin Gula Semut
11.	Irpan	Anggota Kelompok Petani & Pengrajin Gula Semut
12.	Sobiah	Anggota Kelompok Petani & Pengrajin Gula Semut
13.	Intarti	Anggota Kelompok Petani & Pengrajin Gula Semut

***Sumber diolah peneliti**

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013:225). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diambil dari dokumentasi, buku, Undang-undang, jurnal, berita online dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder dapat berupa data mengenai data perkembangan usaha kecil menengah gula semut di Kabupaten Purworejo, data PDRB dari BPS Kabupaten Purworejo, data dari Koperasi Wanita Srikandi berupa *company profile*, buku panduan tata kelola gula kelapa organik, data

jumlah petani per-blok Ngasinan dll. Kemudian, data dari Kantor Kepala Desa Ngasinan berupa data demografi berdasarkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan jumlah penduduk. Serta data dari Dinas KUKMP kabupaten Purworejo berupa instrumen data perkembangan Koperasi, produk OVOP unggulan Kabupaten Purworejo, dan data dokumentasi lainnya.

D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2016:224). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2017:186). Terdapat dua macam jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, jawaban telah dipersiapkan sehingga tinggal mengategorikan alternatif jawaban yang telah disediakan. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, jawaban tidak perlu dipersiapkan sehingga narasumber bebas dalam mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan seperti Kasie

Kelembagaan Bidang Koperasi, Kasie Kelembagaan Bidang UMKM Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), Koperasi Wanita Srikandi, Aparat Pemerintah Desa Ngasinan, dan Kelompok Petani Penderes Nira/Pengrajin Gula Semut sehingga peneliti dapat mengetahui informasi yang lebih mendetail tentang bagaimana bentuk pemberdayaan terhadap petani penderes nira serta keterlibatan dan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah desa dan kabupaten sebagai fasilitator.

b) Observasi

Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui peranserta dan yang tanpa peranserta. Pengamatan peran serta yaitu pengamatan melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan alat bantu berupa buku catatan, kamera, dan *recorder* (perekam). Metode ini digunakan peneliti untuk melihat dan mendengarkan secara langsung bagaimana upaya yang ditempuh oleh Koperasi Wanita Srikandi dalam memberdayakan petani penderes nira pada UKM Gula Semut di desa Ngasinan, Bener, Purworejo.

Kemudian, wujud keterlibatan pemerintah yakni pemerintah desa dan kabupaten dalam partisipasi pengembangan sebagai fasilitator untuk mendukung kegiatan pemberdayaan. Data observasi untuk mendukung penelitian adalah peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi mulai

dari kegiatan sosialisasi, pendataan, penyampaian materi TOT (*Training of trainer*), pelatihan pembuatan gula semut sampai pada evaluasi dan monitoring. Kemudian pengamatan yang digunakan sebagai dasar untuk mengambil data terkait dampak pemberdayaan dan kesejahteraan petani dan keluarga petani terhadap pembuatan gula cetak ke gula semut seperti kondisi bangunan rumah, sarana dan prasarana, penggunaan telekomunikasi yang digunakan, transportasi, perabotan rumah tangga.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang berbentuk dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016:240). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data-data dari Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo arsip-arsip serta data-data yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu perkembangan sertifikasi organik petani penderes. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data perkembangan UMKM gula semut seperti data jumlah petani penderes yang disertifikasi, perkembangan produk unggulan berbasis OVOP, jumlah tenaga kerja, tabel PDRB dari sektor industri olahan dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat apa yang terjadi di lapangan pada saat wawancara. Alat dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini dapat dirangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Teknik Pengumpulan Data

No.	Data yang dibutuhkan	Indikator	Alat dan Teknik Pengumpulan data	Subjek
1.	Bentuk pemberdayaan terhadap Petani Penderes Nira	Awal mula pembentukan kelompok Pemberdayaan Petani Sertifikasi	Wawancara	a. Ketua Koperasi Wanita Srikandi b. <i>General Manager</i> Kopwan Srikandi c. ICS Kopwan Srikandi d. Ketua Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
		Jenis Produk Pemanfaatan Sumberdaya potensial	Wawancara, observasi, dokumentasi	a. Ketua Koperasi Wanita Srikandi b. <i>General Manager</i> Kopwan Srikandi c. ICS Kopwan Srikandi
		Faktor Pendukung dan penghambat berkembangnya Kegiatan	Wawancara	Ketua Kopwan Srikandi, <i>General Manager</i> Kopwan Srikandi
		Sumber pendanaann	Wawancara	Ketua Kopwan Srikandi, <i>General Manager</i> Kopwan Srikandi
		Bentuk keterlibatan Pemerintah daerah	Wawancara	Ketua Kopwan Srikandi, <i>General Manager</i> Kopwan Srikandi
		Kontribusi Produk UMKM Olahan Kelapa terhadap PDRB Kabupaten	Wawancara	Ketua Kopwan Srikandi
		Perencanaan Pemberdayaan	Wawancara	a. Ketua Koperasi Wanita Srikandi b. <i>General Manager</i> Kopwan Srikandi c. ICS Kopwan Srikandi
	Peran serta Koperasi sebagai agen pemberdayaan masyarakat	Bentuk Kegiatan Pemberdayaan	Wawancara dan Observasi	<i>General Manager</i> , ICS/Penyuluh Kopwan Srikandi
		Partisipasi Petani Penderes	Wawancara, Observasi	ICS/Penyuluh Kopwan Srikandi Ketua kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
			Dokumentasi	Dokumen Perpanjangan

				Sertifikasi CU per-tahun blok Ngasinan
	Tahapan Kegiatan Pemberdayaan	Observasi		ICS/Penyuluh Kopwan Srikandi Ketua kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Keterlaksanaan Program Pemberdayaan	Observasi		ICS/Penyuluh Kopwan Srikandi Ketua Kelompok Petani Penderes Blok Ngasinan
	Koordinasi antara Penyuluh dan Petani Penderes Nira	Wawancara dan Observasi	dan	ICS/Penyuluh Kopwan Srikandi Ketua Kelompok Petani Penderes Blok Ngasinan
	Tanggung Jawab Penyuluh terhadap keberhasilan program	Wawancara		ICS/Penyuluh Kopwan Srikandi
	Kuantitas dan kualitas Produksi gula semut	Wawancara		ICS/penyuluh Kopwan Srikandi Ketua Kelompok Petani Penderes Nira/Pengepul
	Proses Produksi	Wawancara dan Observasi	dan	Anggota kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
Keterlibatan Pemerintah Desa	Bentuk Dukungan Pemerintah Desa	Wawancara		Sekretaris Desa Ngasinan, Bener, Purworejo
	Sumber Pendanaan	Wawancara		Sekretaris Desa Ngasinan, Bener, Purworejo
	Keterlaksanaan anggaran/dana	Dokumentasi		Dokumen Pelaksanaan ADD Desa Ngasinan
Keterlibatan Dinas KUKMP Kab. Purworejo	Pelaksanaan TUPOKSI	Wawancara		Kasie Kelembagaan bid Koperasi dan Kasie Kelembagaan Bid. UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo
	Perencanaan Program dan Kegiatan	Dokumentasi		Dokumen Renstra dan Renja Dinas KUKMP Kab. Purworejo
	Pembinaan dan Pendampingan Koperasi dan UKM di Kab. Purworejo	Wawancara, Observasi		Kasie Kelembagaan bid Koperasi Dinas KUKMP Kab. Purworejo Kasie Kelembagaan Bid. UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo

				PPKL
	Produk unggulan Kabupaten berbasis OVOP	Dokumentasi		Instrumen Produk Bid. UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo
	Sumber Pendanaan	Wawancara		Kasie KelembagaanBid. UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo
2.	Dampak pemberdayaan terhadap kehidupan sosial-ekonomi Petani Penderes Nira	Hasil Kebermanfaatan Program Pemberdayaan	Wawancara	Ketua dan anggota Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Perolehan Jaminan/Asuransi Jiwa	Wawancara		<i>General Manager</i> Kopwan Srikandi, Anggota Kelompok Petani Penderes Nira blok Ngasinan
	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Petani Penderes Nira	Wawancara dan observasi		Anggota Kelompok Petani Penderes Nira blok Ngasinan
	Pendapatan Petani Penderes Nira	Wawancara		Ketua dan anggota Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Akses Permodalan Usaha Mikro Gula Semut	Wawancara		Ketua dan anggota Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Akses Lahan untuk Usaha Petani Penderes Nira	Dokumentasi		Data Sertifikasi CU oleh Koperasi Wanita Srikandi
	Akses Kesehatan Keluarga Petani Penderes Nira	Wawancara		Anggota Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Akses Pendidikan Keluarga Petani Penderes Nira	Wawancara		Anggota Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Akses sarana dan Prasarana keluarga Petani Penderes Nira	Wawancara dan Observasi		Anggota Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Tingkat Partisipasi Warga terhadap Program/kegiatan	Wawancara		Ketua Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan
	Akses	Observasi		Ketua Kelompok Petani

Penyampaian pendapat dalam forum	Penderes Nira Blok Ngasinan
----------------------------------	-----------------------------

***Diolah oleh peneliti**

E. Uji Validitas Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan suatu alat untuk memeriksa data yang akurat. Teknik triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan data. Menurut Sugiyono (2016:hal.330) dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. **Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.** Menurut Moleong (2017:330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dicapai dengan jalan:

(1) Membandingkan data hasil pengamatan mengenai instruksi yang dilakukan Koperasi Wanita Srikandi saat melaksanakan komunikasi dan apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi dan Petani Penderes Nira (2) membandingkan apa yang dikatakan dari pihak Koperasi Wanita Srikandi saat memberikan pelatihan dan pendampingan dan apa yang dikatakan Koperasi Wanita Srikandi mengenai fasilitasi ataupun pendampingan koperasi dari Dinas KUKMP Kab. Purworejo (3) membandingkan apa yang dikatakan oleh Petani Penderes mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan apa saja yang akan dilakukan dan melihat program pengembangan dalam pemberdayaan petani penderes nira di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo (4) membandingkan apa yang disampaikan oleh DINKUKMP Kab. Purworejo dengan

petani penderes dalam keikutsertaannya dalam pengembangan Usaha Mikro gula semut yaitu pada saat melakukan pelatihan dan pendampingan; (5) membandingkan apa saja yang diharapkan Koperasi Wanita Srikandi dan petani penderes Nira terkait pelaksanaan kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah di lapangan (Sugiyono, 2013:hal 245). Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya (Moleong, 2017). Dikutip dari (Miles dan Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2013:246), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil *interview* di lapangan. Pengumpulan data yang dimaksud dalam hal ini adalah peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pengurus dan penyuluh lapangan Koperasi Wanita Srikandi Purworejo, pegawai dan PPKL Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo serta anggota kelompok petani penderes desa Ngasinan mengenai pemberdayaan terhadap

petani penderes nira dan melihat data dokumentasi mengenai bentuk pemberdayaan yang dilakukan, hasil pendataan, agenda-agenda kegiatan monitoring, yang telah dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi data, peneliti memilah data yang sesuai dengan keperluan penelitian, yaitu mengenai data-data yang berhubungan dengan perkembangan jumlah petani penderes yang ikut dalam sertifikasi organik, PDRB dari sektor industri yang diakses di laman BPS Kabupaten Purworejo, Renstra atau RKT dari dinas terkait, serta AD/ART Koperasi Wanita Srikandi.

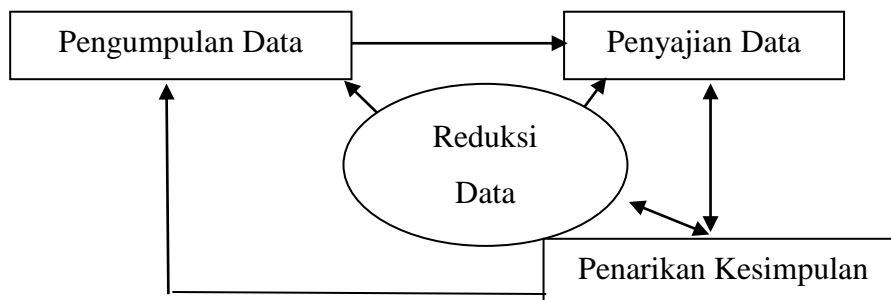
3. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2013:hal.249). Data dalam penelitian ini berbentuk kata-kata yang merupakan penjabaran dari reduksi data.

4. Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan data baru dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada reduksi dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan tersebut merupakan keseluruhan data yang terkumpul pada proses penelitian yang

terlaksana yaitu apa saja hal yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi dalam melakukan pemberdayaan terhadap petani penderes nira/pengrajin gula semut terkait pada pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut serta dampak terhadap kesejahteraan petani penderes nira. Tahapan dalam analisis data dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Teknik Analisis Data Miles and Haberman

(Sumber: Sugiyono, 2016:247)

Keterangan gambar : beberapa tahapan diperoleh untuk pengecekan derajat kepercayaan (kredibilitas) penemuan hasil penelitian dengan menelaah beberapa teknik pengumpulan data, sumber data, dengan metode yang sama.

BAB IV

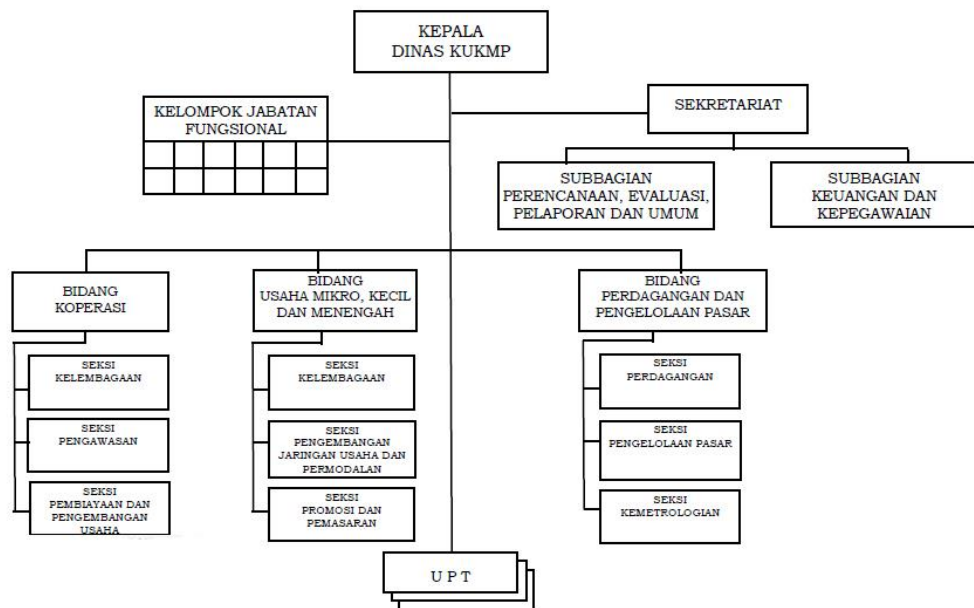
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo memiliki sebuah alur standar pelaksanaan melalui struktur organisasi sebagai berikut.



Gambar 6. Struktur Organisasi

Sumber: Website Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo

Terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 22, Ngupasan, Pangen Juru Tengah, Purworejo, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah di

bidang koperasi, UMKM sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang meliputi koperasi, usaha kecil, menengah, serta perdagangan dan pengelolaan pasar. Dikutip dari dokumen rencana kerja (Renja) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, bentuk pelaksanaan fungsi Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.
- 2) Penyusunan dan pelaksanaan perencanaan program kerja Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.
- 3) Pembinaan dan pengendalian teknis dan bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.
- 4) Penyelenggaraan Perijinan dan Pelayanan Umum yang meliputi penyuluhan dan penyebaran informasi di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.
- 5) Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan bidang

perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.

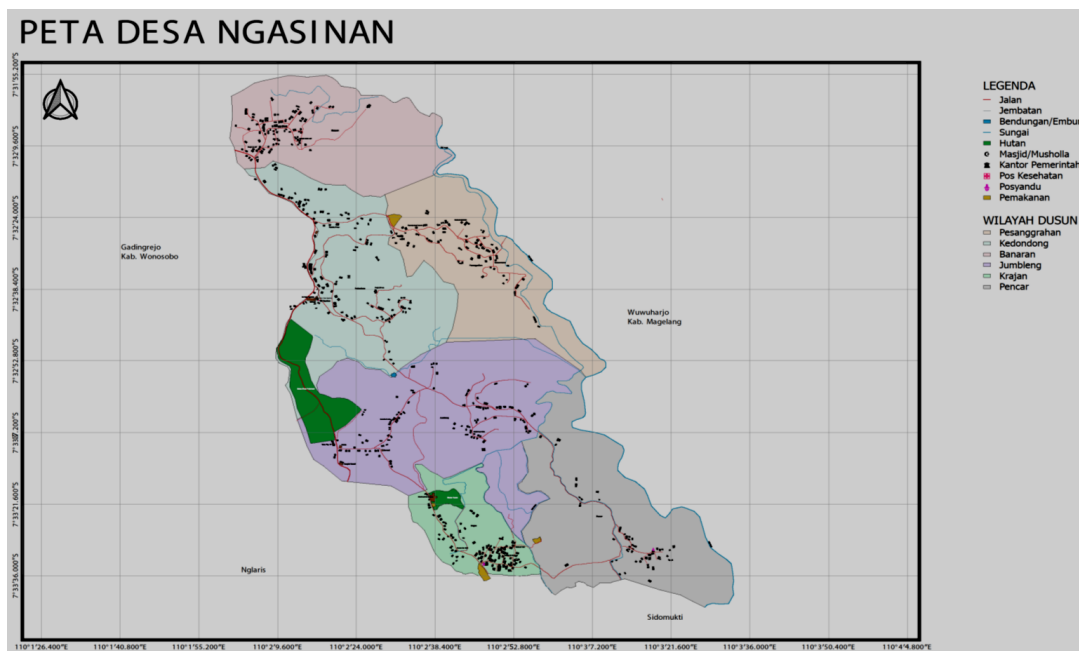
- 6) Pembinaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 7) Penyelenggaraan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang koperasi usaha kecil menengah dan bidang perdagangan yang meliputi Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta perdagangan dan pengelolaan pasar.
- 8) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

b. Gambaran Umum Desa Ngasinan

1) Letak dan Kondisi Geografis

Desa Ngasinan merupakan sebuah desa yang terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Desa Ngasinan berada pada administratif Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Ngasinan terdiri dari enam dusun yakni :

- a. Dusun Banaran
- b. Dusun Kedondong
- c. Dusun Pesanggrahan
- d. Dusun Jumbleng
- e. Dusun Krajan
- f. Dusun Pencar



Gambar 7. Peta Desa Ngasinan
Sumber : Website Desa Ngasinan

Desa Ngasinan berbatasan langsung dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Berikut adalah batas-batas wilayah desa Ngasinan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Nglaris dan Desa Sidomukti
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang

2) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Dye (2002) dalam (Handoyo, 2012), bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam kaitan formulasi kebijakan publik meliputi kesejahteraan dan pendapatan, inflasi, resesi, pengangguran, pencapaian pendidikan, kualitas lingkungan, kemiskinan, komposisi rasial, profil agama dan etnik, kesehatan, usia hidup, ketidak samaan, serta diskriminasi. Bentuk pemberdayaan dalam masyarakat disesuaikan dengan

potensi sumber daya yang ada di sekelilingnya, baik sumber daya alam, sumber daya sosial, maupun sumber daya manusia. Menurut Utami (2019:68) Potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu potensi fisik dan potensi non fisik

a) Potensi Fisik

Potensi fisik merupakan potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di desa Ngasinan yang meliputi :

1) Tanah

Terletak di dataran tinggi yang berbukit membuat daerah ini tumbuh subur berbagai macam tanaman seperti buah-buahan, hasil hutan dan lainnya. Desa Ngasinan memiliki luas wilayah 399 Ha dengan perincian sebagai berikut.

- a. Tanah Sawah : 85 Ha
 - 1) Irigasi teknis : 65 Ha
 - 2) Irigasi sederhana : 10 Ha
 - 3) Tadah hujan/sawah rendengan : 10 Ha
- b. Tanah Kering : 301, 561 Ha
 - 1) Pekarangan/bangunan/emplacement : 102,561 Ha
 - 2) Tegak/kebun : 199 Ha
 - 3) Ladang/tanah huma : - Ha
- c. Tanah Perkebunan : 12 Ha
 - 1) Perkebunan negara : 12 Ha
- d. Tanah Keperluan Sosial : 0,439 Ha
 - 1) Masjid/mushola/langgar : 0,13 Ha
 - 2) Sarana pendidikan : 0,3 Ha

Kemudian untuk bentuk wilayahnya, datar sampai berombak 6%, untuk berombak sampai berbukit 69%, dan berbukit sampai bergunung mencapai 25%.

2) Air

Di desa Ngasinan potensi air bersih sangat melimpah baik yang berasal dari tanah, penimbunan, pemompaan, dan mata air. Air berfungsi sebagai pendukung kehidupan masyarakat di desa Ngasinan baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

3) Iklim

Desa Ngasinan terletak pada ketinggian rata-rata 600 dpl, dengan suhu minimum 25 derajat celsius dan suhu maksimum 32 derajat celsius.

4) Lingkungan geografis

Secara garis besar Desa Ngasinan yang terletak di dataran tinggi cukup menjadikan daerah ini sebagai wilayah yang potensial akan hasil-hasil alamnya. Hasil-hasil hutan seperti kayu albasia, komoditas buah-buahan mulai dari salak, manggis, nangka, durian dan alpukat, perkebunan seperti pohon kelapa banyak ditemui di wilayah desa Ngasinan. Sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang cukup penting yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah menjadi berkah tersendiri untuk komunitas masyarakat yang mendiami suatu wilayah. Karena berpeluang untuk dijadikan sebagai potensi perbaikan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di desa Ngasinan banyak

ditemukan pohon kelapa (*nucifera*) yang dijadikan sebagai olahan agroindustri masyarakat Desa Ngasinan.

b) Potensi Non-fisik

Potensi non-fisik merupakan segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya berupa lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat, dan budaya. Adapun potensi desa non fisik di desa Ngasinan antara lain :

1) Jumlah dan kepadatan penduduk

Berikut adalah data penduduk masyarakat desa Ngasinan per-2018 :

Tabel 4. Data Demografi Berdasar Populasi Per-Wilayah

No.	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Lk	Pr
1.	Banaran	Sunaji	3	120	391	196	195
2.	Jumbleng	Slamet Riyadi	5	159	506	265	241
3.	Kedondong	Surip	4	149	514	269	245
4.	Krajan	Mardi	3	102	337	166	171
5.	Pencar	Irpan	2	69	216	102	114
6.	Pesangrahan	Suharno	3	97	308	159	149
		TOTAL	20	696	2272	1157	1115

Sumber : *Website* Administrasi Desa Ngasinan tahun 2018

2) Keragaman penduduk menurut tingkat pendidikan

Keberdayaan suatu komunitas ataupun individu dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang mereka tempuh. Karena tingginya tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seseorang untuk mampu mengembangkan dan berpikir maju. Namun tingkat pendidikan yang sudah ditempuh oleh masyarakat di desa Ngasinan masih paling

banyak pada tingkatan lulusan SD yakni sekitar 1.251 jiwa atau 55.6%. Diagram Data Populasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut.

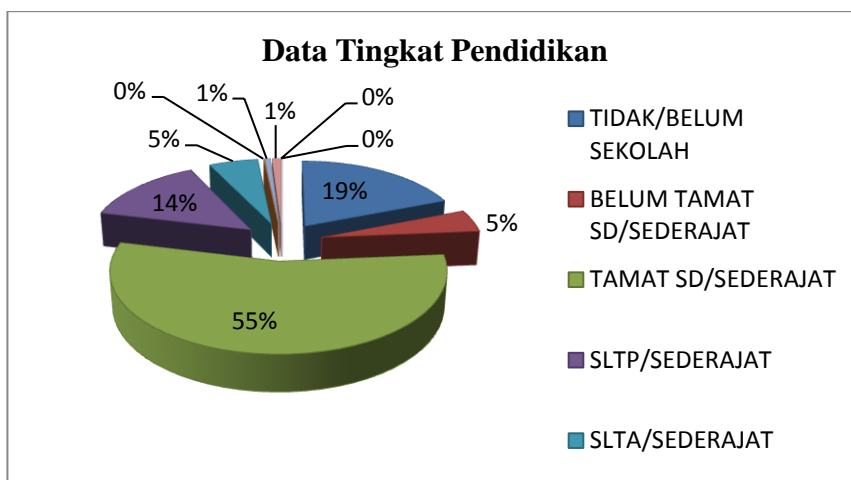


Diagram 1. Data Tingkat Pendidikan

Tabel. 5 Keterangan Tingkat Pendidikan

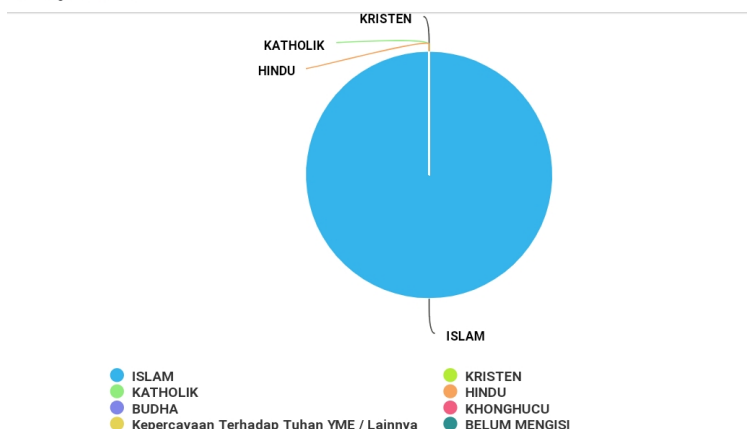
No.	Nama Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	N	%	n	%
1.	TIDAK/BELUM SEKOLAH BELUM TAMAT	435	19.13%	221	9.72%	214	9.41%
2.	SD/SEDERAJAT	106	4.66%	55	2.42%	51	2.24%
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	1251	55.06%	629	27.68%	622	27.38%
4.	SLTP/SEDERAJAT	318	14.00%	166	7.31%	152	6.69%
5.	SLTA/SEDERAJAT	126	5.55%	65	2.86%	61	2.68%
6.	DIPLOMA I/II	1	0.04%	0	0.00%	1	0.04%
7.	AKADEMI/DIPLOMA III	14	0.62%	8	0.35%	6	0.26%
8.	DIPLOMA IV/S I	23	1.01%	14	0.62%	9	0.40%
9.	STRATA II	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10.	STRATA III	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	JUMLAH	2271	99.96%	1156	50.88%	1115	49.08%
	BELUM MENGINI	1	0.04%	1	0.04%	0	0.00%
	TOTAL	2272	100%	1157	50.92%	1115	49.08%

Sumber : Website Administrasi Desa Ngasinan tahun 2019

3) Agama dan Kelompok Sosial

Nilai-nilai sosial budaya termasuk agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat desa Ngasinan, seperti pada tabel berikut ini.

Pemerintah Desa Ngasinan
desa-ngasinan.com



Tabel Agama

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	ISLAM	2274	100.00%	1158	50.92%	1116	49.08%
	JUMLAH	2274	100.00%	1158	50.92%	1116	49.08%
	BELUM MENGISI	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	TOTAL	2274	100.00%	1158	50.92%	1116	49.08%

Gambar 8. Agama yang dianut
Sumber : desa-ngasinan.com

Adapun untuk menampung aspirasi dari para petani-petani yang ada di desa Ngasinan, maka dibentuklah **Gabungan Kelompok Petani (GAPOKTAN) Ardha Lauka** dan untuk **kelompok wanita 'KWT (Kelompok Wanita Tani) LARAS'**. Gapoktan Ardha Lauka merupakan gabungan kelompok petani yang menekuni beberapa bidang pertanian dan perkebunan di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo seperti, pertanian kelapa, pertanian padi, pertanian buah-buahan, sayur-sayuran dan komoditas pertanian lainnya. Sedangkan jumlahnya sekitar 220 Personil dari masing-masing wilayah dusun. Namun, hanya beberapa yang tergabung dalam

keanggotan Koperasi Wanita Srikandi yaitu sekitar 71 Petani Penderes dan tahun 2020 ini ditargetkan bisa naik mencapai 83 Petani Penderes.

Berikut adalah jumlah petani penderes yang terdaftar dalam sertifikasi organik Koperasi Wanita Srikandi

Tabel 6 Jumlah Petani Kelapa yang Memiliki Sertifikasi di Koperasi Wanita Srikandi

No	Tahun	Sertifikasi	Jumlah	Wilayah
1.	2014	Sertifikasi 1	200	Kab. Purworejo
2.	2015	Sertifikasi 2	700	Kab. Purworejo
3.	2016	Sertifikasi 3	1.200	Kab. Purworejo
4.	2017	Sertifikasi 4	2.750	Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Kebumen
5.	2018	Sertifikasi 5	966	Kab. Purworejo Kab. Wonosobo
6.	2019	Sertifikasi 6	1820	Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Kebumen

Sumber : Dokumen Sertifikasi Organik Koperasi Wanita Srikandi 2019

4) Mata pencaharian/pekerjaan penduduk

Selain itu, data tentang pekerjaan atau mata pencaharian oleh penduduk di desa Ngasinan adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Data Populasi Menurut Pekerjaan

No.	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	N	%	N	%
1.	Belum/tdk bekerja	435	19,15%	224	9.86%	211	9.11%
2.	Mengurus Tangga Rumah	109	4.80%	0	0.00%	109	4.80%
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	9	0.40%	6	0,26%	3	0,13%
4.	Perdagangan	9	0,40%	3	0,13%	6	0,26%
5.	Petani/pekebun	975	42.91%	470	20,69%	505	22,23%
6.	Karyawan swasta	75	3,30%	51	2,24%	24	1,06%
7.	Buruh Harian Lepas	133	5,85%	97	4,27%	36	1,58%
8.	Guru	10	0,44%	5	0,22%	5	0,22%

9.	Wiraswasta	160	7,04%	105	4,62%	55	2,42%
10.	Pelajar/mahasiswa	337	14,83%	181	7,97%	156	6,87%
11.	Lain-lain	21	0,88%	9	0,40%	3	0,13%
	Belum mengisi	1	0,04%	1	0,04%	0	0,00%
	Jumlah	2.272	100%	1.157	50,92%	1.115	49,08%

Sumber : Website Administrasi Desa Ngasinan Tahun 2018

Penderes atau istilah lain penyadap nira kelapa merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat di desa Ngasinan. Bekerja sebagai petani penderes dengan memanfaatkan olahan kelapa melalui nira merupakan kunci utama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Masyarakat desa Ngasinan memanfaatkan luas lahan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan.

5) Tata Pemerintahan dan Lembaga Sosial Desa

Kelembagaan sosial yang berkaitan langsung dengan kegiatan kemasyarakatan seperti kelompok tani, PKK, Karang Taruna di desa Ngasinan. Struktur pemerintahan desa yang meliputi :

(a) Pemerintahan Desa

Perangkat Desa

No	Nama	L/P	Jabatan
1	M. Hamron Rosadi	L	Kepala Desa
2	Antoko	L	Sekretaris Desa
3	Turijan	L	Kasi Pemerintahan
4	Eko Budi Siswanto	L	Kasi Kesejahteraan
5	Sujianto	L	Kasi Pelayanan
6	Niryo Suwito	L	Kaur Perencanaan
7	Andriawan	L	Kaur Keuangan
8	Wiji Puspita Sari	L	Kaur Tata Usaha dan Umum
9	Suharno	L	Kadus I
10	Surip	L	Kadus II
11	Sunaji	L	Kadus III
12	Slamet Riyadi	L	Kadus IV
13	Mardi	L	Kadus V
14	Irpan	L	Kadus VI

Gambar 8. Susunan perangkat desa Ngasinan

(b) Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

No	Nama	L/P	Jabatan
1	Sandi Purnomo	L	Ketua
2	Endah Dwi Astuti	L	Sekretaris
3	Subur Hartanto	L	Bendahara
4	Muh Khotib	L	Anggota
5	Imawan Budiyanto	P	Anggota
6	Rofik	P	Anggota
7	Kozin	L	Anggota

Gambar 9. Susunan Kepengurusan BPD desa Ngasinan

(c) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

No	Nama	L/P	Jabatan
1	Muh Muktafil Kirom	L	Ketua
2	Samijan	L	Sekretaris
3	Ahmad Zaenudin	L	Bendahara
4	Sutarto	L	Humas
5	Suryokoco	L	Seksi Pendidikan

Gambar 10. Susunan Kepengurusan LPMD Desa Ngasinan

(d) Rukun Warga

Ketua Rukun Warga (RW)

No	Nama	L/P	Jabatan
1	Ngadiyanto	L	Ketua RW 1
2	Khamim Subagiyo	L	Ketua RW 2
3	Jismanto	L	Ketua RW 3
4	Somat	L	Ketua RW 4
5	Puryono	L	Ketua RW 5
6	Ngadimi	L	Ketua RW 6

Gambar 11. Susunan Kepengurusan RW

(e) Rukun Tetangga

Ketua Rukun Tetangga (RT)

NoNama	L/PJabatan
1 Rubiyono	L Ketua RT 001 / 01
2 Sunaryanto	L Ketua RT 002 / 01
3 Ngatiman	L Ketua RT 003 / 01
4 Nurkamto	L Ketua RT 001 / 02
5 Amiyono	L Ketua RT 002 / 02
6 Heruwanto	L Ketua RT 003 / 02
7 Jemikin Dahari	L Ketua RT 004 / 02
8 Turaihan	L Ketua RT 001 / 03
9 Muh. Janatu	L Ketua RT 002 / 03
10 Sugiyono	L Ketua RT 003 / 03
11 Ngadiman	L Ketua RT 001 / 04
12 Slamet Sujono	L Ketua RT 002 / 04
13 Purnoto	L Ketua RT 003 / 04
14 Paijan	L Ketua RT 004 / 04
15 Nuryadi	L Ketua RT 005 / 04
16 Bejo Setiyono	L Ketua RT 001 / 05
17 Budiyanto	L Ketua RT 002 / 05
18 Tuter	L Ketua RT 003 / 05
19 Ngadimi	L Ketua RT 001 / 06
20 Tukio	L Ketua RT 002 / 06

Gambar 12. Susunan Kepengurusan RT

(f) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Tim Penggerak PKK

NoNama	L/PJabatan
1 Maratin Fatmawati	P Ketua TP PKK
2 Surati	P Wakil Ketua
3 Suprijati	P Sekretaris
4 Asli	P Wakil Sekretaris
5 Nur Wahidah	P Bendahara
6 Kun Munajiyah	P Wakil Bendahara
7 Zunika	P Ketua Pokja I
8 Asminah	P Anggota Pokja I
9 Unarti	P Anggota Pokja I
10 Daryati	P Ketua Pokja II
11 Saropah	P Anggota Pokja II
12 Sarwiyati	P Anggota Pokja II
13 Irniyatun	P Ketua Pokja III
14 Tarmiyah	P Anggota Pokja III
15 Imronah	P Anggota Pokja III
16 Lukas Ardina Kusuma Watina	P Ketua Pokja IV
17 Ayem	P Anggota Pokja IV
18 Robaniyah	P Anggota Pokja IV
19 Sukirni	P Anggota Pokja IV

Gambar 13. Susunan Kepengurusan PKK Desa Ngasinan

(f) Karang Taruna

Karang Taruna

No>Nama	L/PJabatan
1 Suryani	L Ketua
2 Wahidi Susanto	L Wakil Ketua
3 Mujianto	L Sekretaris
4 Arman	L Bendahara
5 Sukipno	L Seksi Olahraga
6 Rowandi	L Humas
7 Asli	P Pengabdian Masyarakat
8 Eka Dwi Rahmawati	P Lingkungan Hidup

Gambar 14. Susunan Kepengurusan Karang Taruna

c. Gambaran Umum Koperasi Wanita Srikandi**1) Sejarah dan Profil Koperasi Wanita Srikandi**

Koperasi Wanita Srikandi merupakan badan usaha yang bergerak di bidang produksi dan distribusi, didirikan pada tanggal 24 Desember 2014 dengan Badan Hukum Nomor : 192/BH/XIV.31/XII/2014. Pada awal berdirinya beralamat di desa Teksongo RT 04 / RW 03, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Koperasi Wanita Srikandi mulanya pada tahun 2006 menjadi 'LSM Kartinem' dengan kegiatan pemberdayaan untuk perlindungan ibu dan anak, dengan inisiatif ketua Koperasi yakni Ibu Sri Susilowati yang menduduki kursi DPRD Kabupaten Purworejo pada tahun 2004-2009. Keinginan untuk menampung kegiatan ibu-ibu rumah tangga agar berdaya dan tidak ketergantungan dengan suami sehingga mampu untuk menghasilkan usaha dan untuk menambah penghasilan keluarga. Berikut

hasil wawancara dengan Ketua Koperasi Wanita Srikandi, Sri Susilowati (50 tahun) :

“Pembentukan koperasi diawali tahun 2006 Saat itu saya masih menjadi anggota dewan yang berfikir bahwa 2009 itu kan jabatan saya akan berakhir terus saya berpikir bahwa masyarakat di wilayah pedesaan itu masih perlu diberdayakan masih perlu didampingi. Sehingga waktu itu saya dirikan LSM yang namanya LSM Kartinem untuk kegiatannya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sehingga setelah terbentuk, memulai menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat melatih diri untuk berbicara, latihan berarti untuk mandiri dan tidak ketergantungan, kebetulan saya orang politik juga saya mengajarkan untuk mandiri dalam arti untuk memilih, karena memilih itu sebagai hak perempuan juga dan tidak harus ikut pilihan suami. mengawal untuk membuat minyak goreng kelapa dan itu berlangsung sampai tahun 2009 sampai sekarang (Wawancara, 18 Januari 2020)

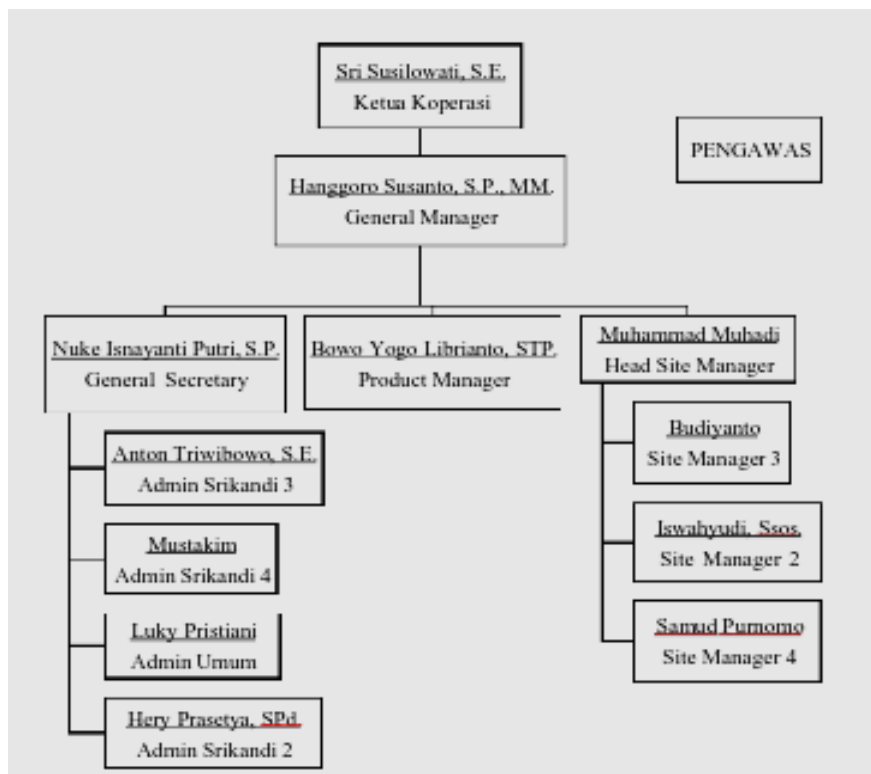
Selain itu kegiatan pemberdayaan juga diawali dengan jalan “bahwasanya perempuan harus mampu merefleksikan hak-hak politiknya sebagaimana mestinya”, ‘**koin untuk Srikandi**’ pun gencar dilakukan saat pertemuan keanggotaan tersebut selain sebagai kegiatan untuk memperoleh hati pada konstituen, kegiatan tersebut juga mampu memberdayakan ibu-ibu rumah tangga untuk mampu menjalankan praktik penyajian makanan yang sarat pada kesehatan yaitu pola 4 sehat 5 sempurna. Dengan jalan pemberdayaan di bidang perempuan dan anak, keberhasilan kelompok tersebut berhasil mendirikan Pos PAUD untuk pembelajaran anak-anak usia di bawah 5 tahun agar mampu membaca dan menulis.

Kemudian, pada tahun 2009 menjadi KUBE (kelompok usaha bersama) Mitra Sejahtera dengan inisiatif dan motivasi dari proses pembuatan minyak goreng. Pemilihan minyak goreng karena produk minyak goreng akan berguna untuk cepat laku jika untuk di pasarkan ke

ibu-ibu rumah tangga. Sejalan dengan berjalannya waktu, kegiatan usaha ini dinilai bagus oleh Diskoperindag Kab. Purworejo kala itu, sehingga diusulkan untuk pembuatan gula kelapa bubuk. Mengapa gula kelapa kristal/bubuk, karena melihat potensi sumber daya yang mendukung di wilayah Kabupaten Purworejo sehingga dengan menggandeng beberapa penyuluh lapangan untuk ikut serta dalam usaha kelompok maka akhirnya terjalin kerja sama dengan mitra petani penderes di beberapa wilayah kabupaten Purworejo, Wonosobo dan Kebumen. Jumlah petani dampingan Koperasi Wanita Srikandi sebanyak 2.602 petani penderes, 14 Kelompok dampingan pengrajin VCO, dan 3 Kelompok pengrajin minyak klentik/minyak goreng.

Sesuai dengan motto Koperasi Wanita Srikandi yaitu “**Agen Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sumber Daya Lokal**”, maka Koperasi Wanita Srikandi terus bergerak melaksanakan berbagai macam kegiatan hingga pada kegiatan ekspor ke luar negeri. Kegiatan utama Koperasi Wanita Srikandi melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang produksi olahan pohon kelapa yang meliputi minyak kelapa murni (VCO), Minyak goreng kelapa, sabun dan gula semut. Produk-produk olahan berbasis kelapa yang dikelola Koperasi Wanita Srikandi telah mendapatkan sertifikat organik internasional yang dikeluarkan oleh *Control Union* No : 853141 (Srikandi 4), dan label-label dari LPPOM Provinsi Jawa Tengah, P-IRT Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.

Berikut adalah Susunan Organisasi Kepengurusan :



Gambar 15. Struktur Organisasi

Sumber : *Company Profile* Koperasi Wanita Srikandi

Keterangan :

- | | |
|---------------------------------|--|
| a. Ketua | : Sri Susilowati,S.E |
| b. Sekertaris | : Kismiyati, S.IP |
| c. Bendahara | : Urip Komala |
| d. Pembantu umum | : Musriyatun
Dra. Riyanti Saptorini
Nurul Khotimah |
| e. <i>General Manager</i> | : Hanggoro Susanto, S.P., MM |
| f. <i>Head Site Manager</i> | : Muhamad Muhadi |
| g. <i>General Secretary</i> | : Nuke Isnayanti Putri S.P |
| h. <i>Product Manager</i> | : Bowo Yogo Librianto, S.TP |
| i. <i>Site Manager</i> Srikandi | : Budiyanto |

2) Kegiatan Unit Koperasi Wanita Srikandi

Kegiatan Koperasi Wanita Srikandi meliputi :

a) Unit Simpan Pinjam (dikelola oleh Pengurus Koperasi)

- (1) Keanggotaan berbentuk kelompok
- (2) Terdapat pertemuan rutin kelompok
- (3) Pinjaman bersifat tanggung renteng
- (4) Simpanan dilakukan dengan menabung setiap hari

b) Unit Produksi

- (1) Sertifikasi organik pada tahun 2015 yaitu di 2 (dua) desa di wilayah kecamatan Bener Kabupaten Purworejo
- (2) Sertifikasi organik pada tahun 2016 di 7 desa di Kabupaten Purworejo (2 desa di Kec. Kaligesing, 5 desa di Kec. Loano) dan 2 Desa di Kec. Kepil Kabupaten Wonosobo dengan total 716 Petani.
- (3) Sertifikasi organik pada tahun 2016 di 4 kecamatan di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah 1.804 petani.
- (4) Sertifikasi organik pada tahun 2017 di 4 kecamatan di Kabupaten Wonosobo dengan 1.217 petani.
- (5) Pelatihan pemberdayaan masyarakat di wilayah sertifikasi yang meliputi pelatihan produksi gula kristal organik/gula semut, pelatihan produksi minyak VCO.
- (6) Pendirian pusat-pusat produksi di beberapa wilayah sertifikasi untuk membantu perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
- (7) Pemberian santunan kecelakaan, kesehatan, bantuan sosial bagi petani penderes yang tergabung di Koperasi Wanita Srikandi.

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja Kopwan Srikandi

No.	Bidang	Jumlah
1.	Manajemen	6 Orang
2.	Administrasi	8 Orang
3.	Tenaga Produksi	11 Orang
4.	Tenaga lapangan	44 Orang
5.	Tenaga yang diserap dalam proses produksi	300 Orang
6.	Jumlah anggota Koperasi	208 Orang
7.	Jumlah Petani anggota	2.740 Orang

Sumber : *Company Profile Koperasi Wanita Srikandi*

Selain itu, Koperasi Wanita Srikandi juga mendapatkan sejumlah penghargaan baik dalam inovasi kepemimpinan maupun segi manajemennya, yaitu mulai dari penghargaan dari Presiden Joko Widodo, Penghargaan dari ASEAN, Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah, serta menjalin Kerja sama bidang OVOP dari perusahaan asal Korea Selatan yaitu Lottemart.

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi

Bentuk pemberdayaan perlu disesuaikan dengan jenis potensi lokal yang berkembang di masyarakat. Komoditas Kelapa (*coconus nucifera*) sangat potensial guna mendukung industri rumahan mulai dari gula kelapa, minyak kelapa murni (VCO), minyak goreng dan lainnya. Sesuai dengan AD/ART dalam pembentukan Koperasi Wanita Srikandi, bahwa program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini.

- a) Pembentukan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*bottom up*).
- b) Pengembangan kelembagaan ekonomi desa disesuaikan dengan potensi lokal yang ada
- c) Sebagai pengembangan jaringan usaha
- d) Program pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari hulu sampai ke hilir (*input, output, outcome*)

- e) Program pemberdayaan masyarakat perlu adanya pendampingan
- f) Bantuan kepada kelompok masyarakat harus benar-benar tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan dan perlu adanya intervensi terhadap bantuan yang tidak digunakan
- g) Meningkatkan koordinasi dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Senada dengan pernyataan Ketua Kopwan Srikandi, Ibu Sri Susilowati

(50 tahun) :

“Karena koperasi mengedepankan asas kekeluargaan, maka kita ingin meningkatkan kemakmuran untuk anggota kita, selain untuk pemasaran dan mitra. Jadi, kita lebih mengarah ke sosial masyarakatnya dengan memberikan pelatihan pembuatan gula semut untuk mendapatkan nilai tambah dari gula kelapa cetak sehingga masyarakat desa mampu mencapai keberdayaan” (Hasil Wawancara 18 Januari 2020)



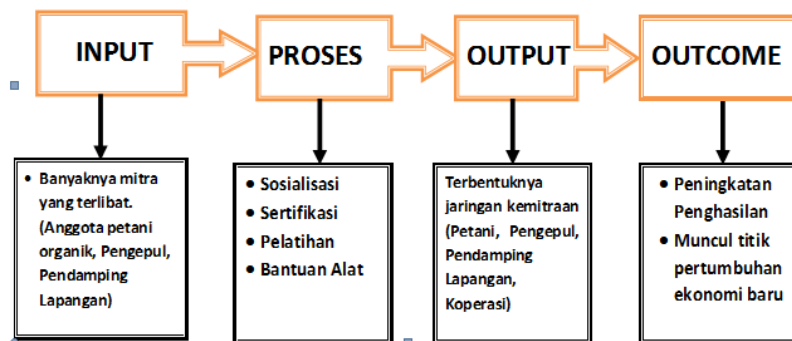
Gambar 16. Pelatihan Pembuatan Gula Semut oleh ICS Kopwan Srikandi

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Karena, mereka memiliki beberapa keunggulan seperti faktor kedekatan dengan kelompok sasaran, fleksibel, dan memiliki basis normatif kuat yang memungkinkan untuk menjadi mitra pemerintah yang dapat diandalkan dalam orientasi sosial seperti pengembangan usaha mikro. Di sini organisasi

pelaksana dalam pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Purworejo agar cepat dan menyeluruh tentu butuh pihak lainnya yaitu, Perguruan Tinggi, koperasi, swasta, ataupun pihak ketiga agar program tersebut dapat segera tersampaikan dan teralisasi kepada masyarakat desa. Sebagaimana ciri pembangunan yang berpusat pada manusia, bahwa adanya proses pembentukan jejaring (*networking*) antara birokrasi dan lembaga swadaya masyarakat, satuan organisasi-organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian yang terintegral (Tjokrowinoto dalam Mardikanto (2013). Koperasi Wanita Srikandi sebagai koperasi yang bergerak pada bidang produksi dan pemasaran menjalankan kegiatan pemberdayaan terhadap petani penderes nira dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan juga pemasaran produk.

Pemberdayaan usaha mikro bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, memunculkan titik ekonomi baru sesuai dengan potensi lokal. Adanya sertifikasi organik sebagai jaminan mutu untuk kelangsungan pertanian yang berkelanjutan diharapkan bisa menjadi sebuah motivasi untuk masyarakat desa khususnya para petani penderes nira untuk mengembangkan produknya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Berikut adalah alur kegiatan pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi :



Gambar 17. Alur Pemberdayaan Masyarakat

Sumber : Buku Pedoman Tata Kelola Kopwan Srikandi

Indikator keberhasilan suatu program pemberdayaan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Kegiatan pemberdayaan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan (Utami, 2019:21). Berikut pernyataan dari GM Kopwan Srikandi, Bp. Hanggoro S :

“...Itu awalnya kalau di pemasaran, kita bisa produk atau pasar dulu, ketika kita mencari peluang pasar dulu. Pertama kali kita dapat peluang pasar di luar negeri, mereka butuhnya apa? Kemudian, kita dapat fasilitasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dengan sertifikasi organik. Ternyata sertifikat itu sangat berguna sekali saat kita berjualan di pasar Eropa dan Amerika, terus kita mencari wilayah untuk pertama kalinya di Kecamatan Bener yaitu desa Nglaris dan Ngasinan yaitu sekitar 168 Petani, kemudian kita data dan daftarkan untuk menjadi anggota petani organik. Dan kita ajukan dari *control union* lolos, kemudian setelah lolos kita berdayakan mereka dengan cara dilatih untuk membuat gula semut karena permintaan pasar yaitu gula semut. petani kita latih, kita sosialisasi, kemudian kita berikan peralatan, setelah mereka bisa membuat gula semut kita akan beli.

“....Kalau memotivasi itu sebenarnya motif nya hanya ke ekonomi, jadi arahnya bisa ke biasa gula cetak saja kemudian beralih ke gula semut yang jelas karena harganya lebih tinggi gula semut, kita tidak hanya sosialisasi saja namun kita juga melatih untuk pembuatan gula semutnya, dan ketika itu baru kita bekali alat, mereka *pure* hanya untuk merubah saja dari cetak ke semut sampai nanti produknya kami beli” (Hasil wawancara 05 Februari 2020).

Berikut adalah tahapan kegiatan pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi.

(1) Tahap Pertama (Perluasan Jangkauan Anggota Petani Penderes)

a) Sosialisasi Materi oleh Koperasi Wanita Srikandi

Dalam tahapan ini, upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana. Berikut pernyataan ICS Kopwan Srikandi, Bp. Budiyanto (45 Tahun) :

“Pertama kita lakukan sosialisasi berupa penyampaian materi, jika untuk perpanjangan sertifikas kami melakukan dengan penyampaian temuan-temuan sebelumnya. Kemudian, kami berikan motivasi melalui *Training of trainer (ToT)* untuk memberikan motivasi dan semangat kepada petani. Kita mulai dengan mengumpulkan ICS kita yang ada di masing-masing blok, kemudian nanti polanya dibagi lagi menjadi satu forum di balaidesa, per kelompok RT/RW, dan per-dasa wisma. Kemudian, pendataan petani, setelah itu kita berikan peralatan berupa sarana untuk produksi gula semut, dan memulai untuk pelatihan-pelatihan sampai apa yang kita berikan atau ajarkan dapat diterima dengan mudah dan dipraktikan. Kemudian, dilakukannya kegiatan monitoring dari pihak sertifier eksternal dan internal untuk memastikan keorganikan baik lahan, tata kerja, dan hasil produk.” (hasil wawancara 13 November 2019)

Berikut merupakan kutipan wawancara dengan *General Manager* Kopwan Srikandi, Bapak Hanggoro Susanto (45 tahun) :

“Jadi itu setelah sertifikatnya turun, terus langsung kita adakan sosialisasi untuk pembuatan gula, kita lakukan di setiap titik mbak itu dibuat beberapa titik/blok. Jadi, petani itu sesuai kedekatan wilayah rumah petaninya” (Hasil Wawancara 05 Februari 2020)



Gambar 18. Sosialisasi Keorganikan dan ToT oleh ICS Kopwan Srikandi

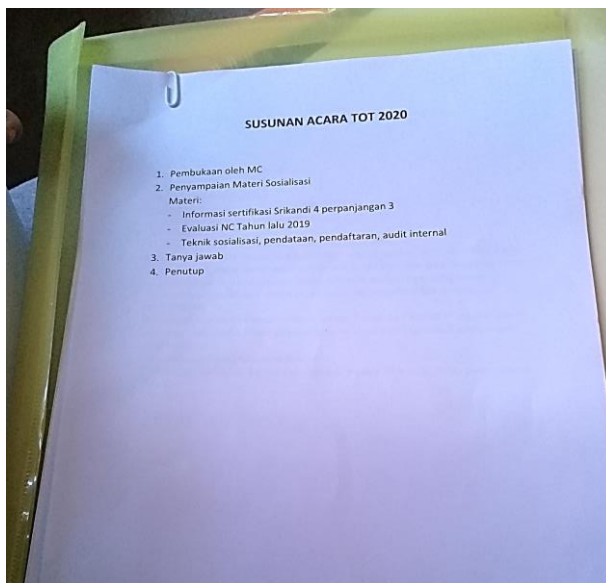
KOPERASI WANITA SRIKANDI
 GEDUNG PRADIA JL. PURWOREJO MARGELANG KM. 3 KEL. UBAHAN KESRENG.
 KEC. GAMBEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO
 PIR.INDO 0273733077, E-MAIL: kd.kopwasrikandi@gmail.com

PESERTA TOT DAN SOSIALISASI TAHUN 2020

Tempat : Rumah Bp. Widiyanto, Garingrejo
 Waktu : 10.00 - 11.30 WIB (14.01.2020)

No	Nama Peserta	Status	Tanda Tangan
1			
2	Pak Mubadi		
3	Dede Satrio		
4	Tika		
5			
6			
7			
8			
9			
10	Bpk widiyanto		
11			
12	Pak Widiyanto Gamblok		
13	Pak widiyanto Sigang		
14	Pak Fis Slamet Gadingan		
15	Ususan Hiasanah		
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Gambar 19.. Daftar hadir peserta



Gambar 20. Susunan kegiatan ToT TA. 2020 di desa Ngasinan oleh Kopwan Srikandi

Sumber : dokumentasi pribadi

Anggota petani penderes binaan Koperasi Wanita Srikandi yang sudah menjadi anggota kemudian diberikan sosialisasi arahan oleh ICS untuk mendapatkan materi tentang pentingnya sertifikasi organik. Tahapan sertifikasi CU (*Control Union*) merupakan tahapan di mana untuk mendata petani penderes yang ikut dalam program pertanian berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi memang memiliki beberapa perbedaan dalam segi kualitas, yaitu mengutamakan keorganikan yang sesuai dengan standar Internasional. Standar organik di sini berarti adanya bentuk keberlanjutan terhadap suatu kegiatan tanpa harus mengurangi ketersediaan sumber daya yaitu lingkungan yang tetap lestari.

b) Pendataan Awal Petani

Mengidentifikasi petani mulai dari nama petani, tempat tinggal dan status lahan. Kemudian jika untuk petani lama apabila tidak layak didata kembali maka, dihapus dari daftar keanggotaan. Ada format nomer untuk petani lama, apabila ada petani baru yang layak bergabung maka nomer petani baru tersebut melanjutkan nomer dari petani lama yang paling bawah. Dan petani lama yang terdata sebagai petani organik wajib didata kembali.

INDIKATOR PENILAIAN PETANI ANGGOTA INTERNAL CONTROL SYSTEM KOPERASI WANITA SRIKANDI 2020									
FORM 1									
NO	NAMA PETANI	KODE	LUAS LAHAN	TOTAL JUMLAH POHON	JUMLAH POHON YANG DIDERES	PRODUKSI GULA/HARI	JENIS TANAMAN SELA	TERAKHIR PEMUPUKAN KIMIA	PERILAKU SUKSES SUKSES
								YA	TIDAK
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

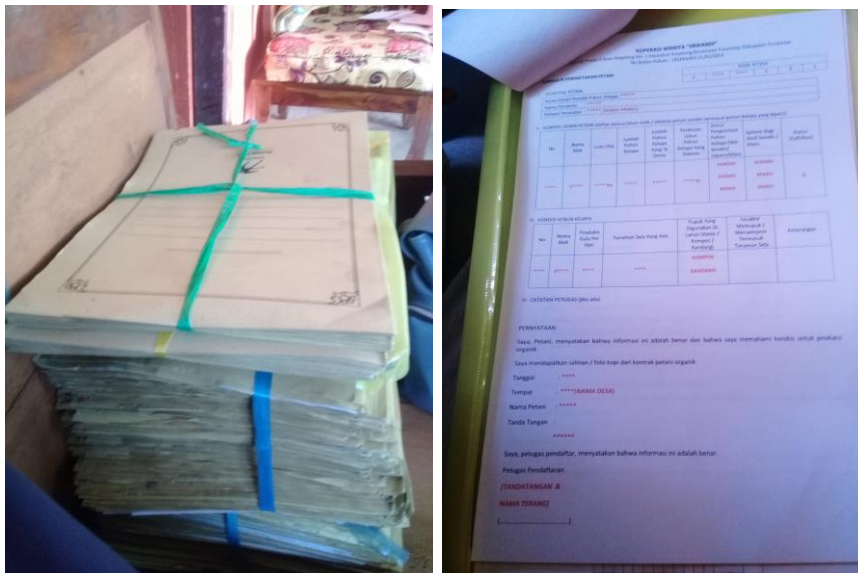
INSPEKTOR

Gambar 21. Farm list

c) Pendaftaran Petani Anggota

ICS intern melaksanakan pendataan dengan selang waktu 1 bulan sejak dilakukannya sosialisasi, kemudian kesediaan petani menjadi petani anggota organik dengan mengisi (*farmer agreement*) untuk petani lama tidak perlu tanda tangan lagi. Sedangkan untuk petani baru wajib menanda tangani *farmer agreement*. Masing-

masing ICS mendata petani lama maupun petani baru yang akan masuk dalam daftar keanggotaan sertifikasi organik.



Gambar 22. *farmer agreement*

d) **Audit Pemeriksaan Internal (Oleh Kopwan Srikandi)**

Dalam kegiatan sertifikasi organik, terdapat dua penyuluh lapangan (ICS) yaitu ICS intern dan ICS ekstern. Untuk ICS intern berasal dari ketua kelompok dalam masyarakat seperti ketua dusun atau ketua RT di wilayah desa Ngasinan. Sedangkan, untuk ICS ekstern berasal dari pihak Koperasi Wanita Srikandi sendiri. Audit dilakukan oleh ICS dengan tujuan untuk memastikan lahan yang akan disertifikasi dikelola oleh petani dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan.

e) **Audit Pemeriksaan Eksternal (oleh *controls union*)**

Dilakukan setelah adanya laporan dari pihak audit internal yaitu dari pihak ICS Koperasi Wanita Srikandi. Auditor dari sertifier CU

(*Controls Union*) mengecek langsung keberadaan lahan pertanian kelapa, kemudian pengecekan status pohon dengan lahan di sebelah daerah sertifikasi, penggunaan peralatan menyadap dan perlengkapan untuk pengolahan nira.

f) Uji Laboratorium

Gula kelapa yang sudah dikirimkan ke CPU pusat di Cangkrrep Lor, Purworejo kemudian diambil dari *batch* proses kemudian dipisahkan dengan sortir kualitas GKP (gula kering petani) dengan beberapa poin mulai dari A, B, sampai C (tingkat kecerahan gula).

g) Uji *Traceability* (runtutan asal-usul gula)

Gula semut berasal dari proses penyadapan nira yang dikurangi kadar airnya dengan tingkat air sebanyak 2-3% hingga menjadi padat melalui proses pengolahan. *Traceability* diterapkan guna mengetahui runtutan asal-usul kejelasan gula terkait terbebas dari pencemaran lingkungan dan zat-zat kimia, higienitas gula sesuai standar organik dan sertifikasi mutu pasar ekspor.

h) Terbit sertifikasi

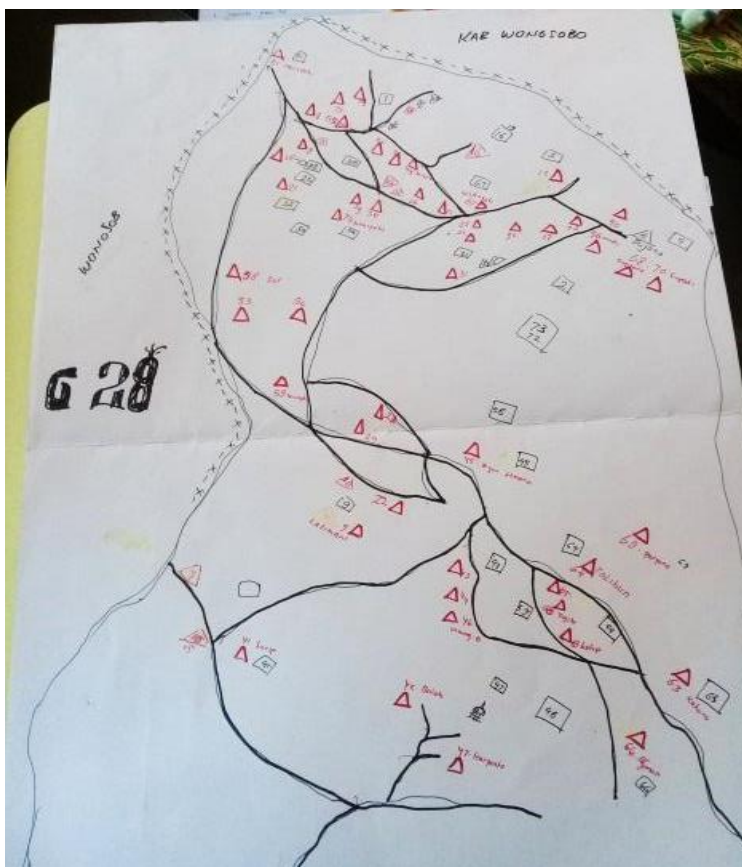
Setelah dlakukannya audit internal dan eksternal kemudian diujikan pada uji *traceabilty* maka petani yang ada dalam list pedataan dapat melaksanakan pengolahan nira setelah terbitnya sertifikasi organik dari CU. Karena kondisi geografis yang memungkinkan untuk lahan pertanian sangat minim, maka masyarakat di daerah Ngasinan lebih mengarah pada pemanfaatan hasil kebun yakni kelapa, nira yang

didapatkan dari laru diambil dan dijadikan sebagai gula jawa cetak. Namun, banyak kendala ketika warga membuat gula, namun harga yang didapatkan tidak bisa untuk membeli beras sebagai kebutuhan pokok mereka. Berikut adalah dokumen dalam sertifikasi organik *Controls Union* yang dikeluarkan untuk Koperasi Wanita Srikandi.



Gambar 23. Sertifikat Keorganikan *Controls Union*
Sumber : *Company profile* Koperasi Wanita Srikandi

Sehingga, memunculkan keinginan untuk beralih ke bentuk gula yang lebih kecil agar lebih mudah dipasarkan. Seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 24. Peta Sertifikasi Petani Blok G-28 Desa Ngasinan

Sumber : dokumentasi pribadi

Keterangan gambar di atas bahwa letak antara lahan yang disertifikasi dengan letak rumah petani harus benar-benar jelas. Sehingga memudahkan untuk ICS dalam memonitoring. Koperasi Wanita Srikandi menempatkan diri sebagai ‘agen pemberdayaan masyarakat’ dengan memanfaatkan

potensi sumber daya lokal. Sebagai agen tentu saja harus ada hal-hal atau nilai utama dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pernyataan ICS Kopwan Srikandi, Bapak Budiyanto (45 tahun) :

“Sesuai dengan yang ada di buku panduan tata kelola mbak, kami selalu mengupayakan untuk bermitra dengan baik agar selain mendapatkan jaringan anggota, kita juga memperoleh kerekatan hubungan sosial” (Hasil Wawancara 05 Februari 2020).

Senada dengan pernyataan salah satu anggota petani penderes, Bapak

Neriyo Suwito (54 tahun) :

“Sudah mb, ya tentang ketentuan organik itu tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Kalau kita memperbanyak menggunakan kimia, pelepahnya itu gampang ambrol (patah) mbak, bisa menjatuhkan penderes dan itu sama saja bunuh diri mbak kalau terus-terusan pakai kimia. Kan kalau manjatnya cepat kan otomatis jatuh, terutama untuk pupuk TS dan UREA. Daripada obat lebih baik kulit manggis mbak, itu direbus dengan tatal kayu nangka dan kapur sirih” (Hasil wawancara 04 Februari 2020)

Program sertifikasi organik membuka akses kepada petani penderes untuk mampu meningkatkan nilai tambah usahanya sebagai penderes sekaligus pengrajin gula kelapa dengan menggunakan sistem terobosan baru. Petani penderes yang dahulunya hanya mengandalkan obat saat membuat gula kelapa kini harus mampu menghindari bahkan menjadi pantangan untuk mengenal obat kimiawi.

Kegiatan dipandu oleh penyuluh lapangan/ICS dari masing-masing blok yaitu blok G-28 Ngasinan dan desa Gadingrejo. Penyampaian materi berupa penyampaian hasil-hasil temuan (NC) dari monitoring dan evaluasi terkait temuan sebelumnya seperti adanya indikasi penyalahgunaan di luar ketentuan sertifikasi seperti, adanya penggunaan pupuk kimia di kalangan petani penderes nira, penambahan gula pasir, atau adanya temuan bahwa jarak tempat produksi gula kelapa masih

berdekatan dengan kandang ternak yang menyebabkan terdiskualifikasinya petani penderes dari program sertifikasi tersebut. Kemudian, pemberian materi ToT (*Training of Trainer*) berupa materi tentang apa dan bagaimana seharusnya petani itu dapat melaksanakan sebuah *agreement* terkait pertanian organik. ICS intern diberikan map yang berisi *farm list* dan agenda untuk pengumpulan data baik pendataan petani baru maupun petani lama yang akan masuk pada daftar sertifikasi organik.

(2) Tahapan Kedua (Kegiatan Pembinaan Kepada Kelompok Petani Penderes)

a) Pelatihan Pembuatan Gula Semut Organik

Pelatihan dilakukan di balai desa Ngasinan dengan mengumpulkan masyarakat desa Ngasinan yang sehari-harinya menjadi penderes nira dan mengolah gula kelapa. Sumber daya dalam pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sumber daya alam. Seperti yang dipaparkan oleh ICS Kopwan Srikandi, Budiyanto (45) :

“Berawal dari *tagline* Koperasi Wanita Srikandi yaitu sebagai agen pemberdayaan masyarakat berbasis sumber daya lokal, jadi kita memberdayakan masyarakat yakni anggota petani penderes dengan sosialisasi, pelatihan, pembinaan, dan monitoring dengan ketentuan 1 kelompok 10 orang satu rumah wajib menyertakan 1 anggota keluarga untuk ikut serta mbak karena kalau 1 kelompok banyak anggota malah tidak jadi-jadi, namun sekarang sudah banyak yang bisa membuat per-rumah dan malah menjadi *home industry*” (Hasil wawancara 05 Februari 2020)

Pemberdayaan sebagai sebuah kegiatan yang terencana dan kolektif pastinya melibatkan banyak pihak, mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berikut adalah gambar pada saat dilakukannya pelatihan pembuatan gula semut :



Gambar 25. Pelatihan Pembuatan Gula Semut
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Sesuai buku panduan tata gula kelapa organik, masyarakat desa Ngasinan diberikan cara untuk membuat gula kelapa dengan baik dan benar mulai dari tahap persiapan bahan, alat, sampai pada cara membuat gula kelapa organik. Seperti yang dipaparkan oleh Turijan (50) :

“dimulai dari usaha pribadi, kelompok petani di batasi 25 orang, ARDHA LAUKHA, KWT LARAS. Sementara ini untuk peminjaman dana atau bantuan sarana di gapoktan, sedangkan untuk pemasarannya masih melalui Kopwan Srikandi. Kalau untuk produksi saya yakin semuanya bisa membuat gula semut, namun untuk pemasarannya belum.”
(hasil wawancara, 05 Februari 2020)

Berikut adalah tata cara pembuatan gula cetak ke gula semut :

Tabel 9. Pembuatan Gula Kelapa Organik

No.	Kelengkapan	Keterangan
1.	Bahan	Gula cetak Gerondolan
2.	Alat	Wajan, solet kayu, batok penggerus, saringan nira, ayakan, serok, penampung gula semut, plastic kemasan
3.	Cara pembuatan	<ol style="list-style-type: none"> a. Cairkan gula cetak dengan air bersih dg perbandingan 1 : 0,25. 1 untuk gula dan 0,25 untuk air. b. Saring juruh dengan saringan stainless untuk memisahkan kotoran c. Panaskan kembali gula yang telah disaring hingga mendidih, bergelembung besar dengan pengapian besar. d. Aduk secara berkala untuk menghindari gosong. e. Angkat wajan dari perapian dan letakkan di atas meja produksi. f. Masukkan grondolan gula dg perbandingan 1 : 1 (1 kg gula yang dimasak, dan 1 kg grondolan) dengan tujuan agar cepat mongering. g. Setelah tecampur, gerus dengan batok penggerus dengan gerakan membalik dann berulang. h. Setelah berbentuk bubuk, ambil gula dengan menggunakan serok dan tuang ke ayakan stainless mess 16 dan ditampung ke dalam wadah. i. Sisakan grondolan (gumpulan gula) agar tidak tercampur. j. Tunggu sampai gula mengering, dan wadahkan ke plastic dengan ketebalan minimal 0,5mm.

Sumber : Buku tata kelola gula kelapa organik Kopwan Srikandi

b) Pemberian Peralatan Sarana Produksi (saprodi)

Pemberian bantuan alat produksi (saprodi) kepada petani berupa, pemberian bumbung nira/pongkor, pemberian wajan, alat ayak gula (*stainles mess 16*). Sebagaimana pernyataan *General Manager* Kopwan Srikandi, bapak Hanggoro S. (45 tahun) :

“Jadi, untuk pemberdayaan melalui Kopwan Srikandi itu terdiri dari *input, proses, output, outcome*. Pemberdayaan masyarakat yang lengkap dan tuntas tidak sepotong-potong, kadang kalau di pemerintah itu ada fasilitas hanya sebagian pada pelatihan-pelatihan saja, kemudian pemberian alat saja ataupun hanya pada pemasaran saja namun, cara membuatnya tidak tahu bagaimana. Jadi kalau kita standarisasi alat, cara pembuatannya, kemudian mereka jual kita yang membeli. Dari dinas hanya memfasilitasi sertifikasi, kemudian kita yang mengembangkan sendiri dengan cara memberdayakan petani yang sudah disertifikasi organik. (hasil wawancara 05 Februari 2020)

Upaya untuk mencapai kondisi berdaya itu diwujudkan melalui tahapan-tahapan dalam pemberdayaan, salah satunya dengan meningkatkan faktor produksi yaitu pemberian alat produksi. pernyataan *General Manager* Kopwan Srikandi, bapak Hanggoro S. (45 tahun) :

“Kemudian kita berikan santunan kepada anak yatim piatu dari hasil kita penjualan kemudian pengajian-pengajian setiap Selasa Kliwon, kalau di kita itu ada RAB Tahunan yaitu 2,5% dikalikan dengan laba ketemu di akhir laporan untuk dana CSR, biasanya juga bentuk peralatan produksi atau saprodi untuk petani anggota seperti alat ayak gula semut (*stainles mess 16*), kemudian Pongkor khusus makanan (*food grade*) 1 petani 10 Pongkor, dan untuk tempat/ember laru” (Hasil Wawancara 05 Februari 2020).

Pemberian alat produksi sebagai upaya untuk menunjang sejumlah kegiatan petani penderes nira dalam mengolah hasil nira yang ia dapatkan. Bentuk bantuan produksi sebagai tonggak motivasi petani penderes agar terfasilitasi dalam mengembangkan

usahanya, sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya dalam membuat gula semut.

“...Kendala ada, terkadang inovasi yang kita sampaikan belum bisa diterima semuanya oleh Petani, sehingga kami terus membina dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan sampai benar-benar sesuai dengan ketentuan sertifikasi organik.” (hasil wawancara 05 Februari 2020)

c) Jaminan Sosial Petani Penderes

Berikut adalah pernyataan dari *General Manager* Kopwan Srikandi, Bapak Hanggoro Susanto (45 Tahun) :

“CSR (*Corporate Social Responsibility*) itu sebenarnya diberikan bisa perbulan atau perkejadian, misal petani jatuh, petani meninggal karena menderes. Untuk petani yang jatuh kita berikan santunan Rp 5 juta, kemudian meninggal karena sebab apapun Rp 4 juta, kemudian petani jatuh kemudian cacat tetap itu Rp 3 juta. (Hasil Wawancara 05 Februari 2020).

Jadi, pemberian jaring keamanan untuk petani penderes nira berupa pemberian santunan kepada keluarga petani penderes yang pada saat menyadap terkena halangan atau kecelakaan kerja. Koperasi memberikan santunan untuk memberikan rasa aman agar petani tetap nyaman dan merasa terlindungi. Kemudian, pernyataan dari Ketua Koperasi Wanita Srikandi, Ibu Sri Susilowati (50 tahun) :

“Karena memang awalnya kami mendirikan koperasi tujuannya untuk kegiatan masyarakat sosial untuk anak yatim itu sebelum kontainer berangkat itu saya selalu menyampaikan itu harus anak yatim itu didahulukan terus kita juga ada santunan yang ke petani yang mengalami kecelakaan kerja. Kemudian kita selalu mengadakan pengajian rutin setiap Selasa Kliwon di desa Wonoroto mbak dengan jumlah 500-600 peserta.”(hasil wawancara, 18 Januari 2020)

Karena awal dari tujuan koperasi mengarah pada kemasyarakatan yaitu LSM pada 2006 silam, maka membawa koperasi ke arah yang tujuannya lebih menghidupkan pada nilai-nilai

ekonomi yang tetap merangkul nilai-nilai sosial di dalamnya seperti pembentukan jaringan usaha melalui produksi olahan kelapa dan turunannya sehingga mampu memberikan tambahan untuk penghasilan keluarga.

(3) Tahapan Ketiga (Pendampingan dan Monitoring)

Jumlah petani penderes nira di blok Ngasinan sebanyak 71 Petani pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini terdapat 68 petani penderes nira yang lolos sertifikasi organik. Kegiatan yang merupakan bentuk koordinasi antara Koperasi Wanita Srikandi dengan beberapa *stakeholder* terkait yaitu salah satunya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Purworejo. Kegiatan temu warga dilakukan setiap 35 hari sekali atau disebut dengan *selapanan* merupakan kegiatan rutin yang diadakan untuk memberikan sosialisasi tentang pertanian berkelanjutan. Materi diberikan oleh Petugas Lapangan dari Dinas yaitu, Ibu Dhani (30 Tahun) dan Ir. Purwanto (55 tahun) dari Kasi Pertanian memberikan pengarahan terkait upaya pemanfaatan limbah atau sampah rumah tangga berupa sayur dan buah-buahan busuk untuk dijadikan sebagai sebagai pupuk organik melalui teknik ember tumpuk. Pernyataan dari Ibu Sobiah (45 tahun), anggota KWT Laras :

“Ada mbak dengan mengadakan pertemuan dengan Gapoktan setiap selapanan atau 35 Hari sekali yaitu Rabu Legi. Kalau dari Dinas lain selama ini belum ada dulu pernah kabarkabarnya mau memberikan peralatan mbak, tapi sampai sekarang belum ada” (hasil wawancara, 04 Febuari 2020)

Teknik ember tumpuk diupayakan sebagai pemberian terapan baru untuk petani dalam membuat pupuk organik secara praktis dan mudah dengan memanfaatkan sampah organik rumah tangga mulai dari sayuran sampai buah-buahan. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Purworejo ini sejalan dengan Upaya Koperasi Wanita Srikandi untuk terus mengembangkan budaya organik pada masyarakat desa Ngasinan. Kegiatan yang dilaksanakan setiap *selapanan* atau 35 hari sekali sebagai upaya peningkatan mutu gula kelapa yang nantinya akan dihasilkan oleh petani penderes.



Gambar 26. Sosialisasi Pembuatan Pupuk dan Pestisida Organik
Sumber : dokumentasi pribadi



Gambar 27. Teknik Ember Tumpuk dalam Pembuatan Pupuk Organik

Selain itu, bentuk temu petani penderes dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa temuan atau kendala dalam hal penggunaan pupuk, penyemprotan hama, atau kendala karena hasil nira yang disebabkan oleh perubahan cuaca seperti tingginya curah hujan yang berakibat pada menurunnya hasil produksi. Petani diberikan pendampingan dan monitoring dilakukan secara berkala oleh ICS melalui :

Tabel 10. Materi Pendampingan dan monitoring petani penderes

No.	Tahapan perbaikan	Keterangan
1.	Pengolahan lahan	<p>a. Perawatan kebun (Memastikan kebun atau lahan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia (Urea, Ponska, rond up) dan memastikan pohon kelapa minimal sejauh bentang tajuk pohon kelapa muda 1 meter)</p> <p>b. Pembuatan pupuk kandang (Persiapan alat dan bahan (kotoran hewan, sisa makan ternak, dedaunan, abu dapur, grajen kayu, garam, dan air))</p> <p>c. Penggunaan pupuk kandang</p>

		(pembuatan lubang minimal 50 cm, lakukan pemupukan berkala 4kali dalam setahun.
2.	Pembuatan, penggunaan, dan penyimpanan laru	(Penggunaan kapur sirih yang tidak mengandung bahan pemutih)
3.	Perawatan alat	a. Bumbung/pongkor (harus selalu steril, dan tidak menggunakan barang bekas) b. Pisau/sabit
4.	Pemeliharaan <i>wolo</i> /manggar bung kelapa	(Memastikan agar bunga kelapa/manggar selalu dalam posisi 90 derajat dari vertical pohon)
5.	Perilaku menyadap	a. Menurunkan nira lebih dari 12 jam atau bahkan hanya sekali dalam 24 jam. b. Menaikkan atau menurunkan satu bumbung pada sebatang pohon dengan dua sadapan. c. Menutup bumbung dengan kain atau sejenisnya

Sumber : Buku Panduan Tata Kelola Gula Kelapa Organik Kopwan Srikandi

Selain untuk meningkatkan mutu gula, namun juga memberikan ide-ide pembelajaran bagi petani penderes untuk mampu lepas dari unsur-unsur kimiawi dalam perilaku bisnis atau memastikan prinsip-prinsip pertanian yang berkelanjutan. Sesuai dengan SOP (*standard operating procedure*) oleh petani anggota organik yang sudah dicanangkan oleh Koperasi Wanita Srikandi. Berikut hasil wawancara dengan *General Manager* Kopwan Srikandi, Bp. Hanggoro Susanto (45 tahun) :

“...Kita mulai dengan identifikasi masalahnya dulu dari petaninya, apakah petani itu semuanya sudah menerima inovasi baru yang kita sampaikan atau sosialisasikan, persepsi kita untuk sosialisasi itu untuk merubah mereka menjadi lebih baik tapi memang ternyata tidak semua petani itu bisa menerima itu. Sosialisasi yang menurut kita bagus, namun belum tentu bagus menurut mereka, inovasi itu kadang diterima oleh mereka itu skeptis yaitu terlalu repot lah, belum mempraktikan sudah mengeluh yaitu berlawanan dengan keinginan kita. Kemudian kita dorong bahwa membuat gula semut itu mudah, kemudian dijual juga dengan harga lebih tinggi *mindset*” (hasil wawancara 05 Februari 2020)

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai perbaikan stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tatanan pemerintah daerah dan menciptakan akses untuk masyarakat miskin.

“...Kalau untuk mencukupi iya, meskipun belum bisa 100% bisa menopang perekonomian warga. Kembali lagi ke harga mbak, kalau harga turun warga juga pendapatannya bisa turun atau berkurang. Kalau di sini istilah orang desa kalau gula itu untuk dapur agar tetap mengepul atau sampingan, cuma kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu mereka bisa” (hasil wawancara 04 Februari 2020).

Memberikan nilai manfaat secara ekonomi kepada para pihak pelaku organik yakni, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pabrik/CPU (*central processing unit*), Pengepul, dan Petani) dari selisih dan perbedaan harga antara gula wilayah sertifikasi dengan gula wilayah non-sertifikasi.

“.....Sebenarnya kalau anggota kita yaitu petani penderes itu rata-rata hidupnya di bawah garis kemiskinan, dengan penghasilan yang hanya mengandalkan dari hasil menderes itu. Tapi kalau itu dikelola dengan profesional, kemudian ketika itu banyak jumlahnya yang terlibat maka sudah bisa untuk mengentaskan kemiskinan” (Hasil Wawancara 05 Februari 2020)

Dampak dari adanya program kegiatan pemberdayaan ini adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan mengonsumsi produk pangan sehat non-kimiawi, tercapainya pola produksi ramah lingkungan untuk pertanian berkelanjutan, sehingga masyarakat desa melalui proses belajar sosial (*social learning*) akan mendapatkan suatu motivasi untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Suatu implementasi kebijakan akan memberikan dampak terhadap penerima program yaitu perilaku kelompok sasaran yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan program.

3. Pendampingan UKM dan Koperasi oleh Dinas KUKMP Kab. Purworejo

Menurut data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo terdapat beberapa potensi unggulan daerah yang levelnya sudah pada tahap Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mengarah pada upaya untuk meningkatkan daya saing usaha mikro yang tumbuh di dalam masyarakat. Jika usaha mikro itu mampu dikelola dengan baik maka akan berefek baik pula bagi iklim dunia usaha di Kabupaten Purworejo. Sebagaimana hasil wawancara bersama Bapak Nur Hadi T (50 Tahun), selaku Kasie Kelembagaan Bidang UMKM Dinas KUKMP Kab. Purworejo:

“Pada intinya begini, sesuai dengan amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan kabupaten itu sebenarnya fokus ke usaha mikro. Kemudian, terkait hal itu kita tarik dalam RPJMD Bupati pada visi misi bupati kan tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021, mengejanya itu, sebenarnya kenapa kita membuat Perda No. 3 tahun 2016, karena memang kewenangan kita hanya pada ke mikro, tapi tidak menutup kemungkinan, kita akan bersinergi dengan provinsi karena untuk mencapai target menaikkan UMKM yang tadinya usaha mikro menjadi usaha kecil.” (Hasil Wawancara tanggal 4 Februari 2020 Pukul 08.45 WIB).

Adapun upaya dari Dinas KUKMP Kab. Purworejo untuk fasilitasi koperasi dengan kegiatan pembinaan, sebagaimana hasil wawancara dengan Kasie Kelembagaan Bidang Koperasi Dinas KUKMP Kab. Purworejo, Ibu Rimi Ani (50 tahun) :

“Pelatihan, temu kemitraan itu kaitannya dengan permodalan (semisalnya sana butuh modal ya nanti kita ada undangan nanti kita temu kemitraan dengan pihak ketiga misalnya perbankan bisa, CSR bisa mbak” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020 Pukul 09.20 WIB)



Gambar 28. Penyuluhan tentang Perkoperasian TA. 2019
Sumber : dokumentasi bidang Koperasi DINKUKMP Kab. Purworejo

Organisasi pelaksana sebagaimana dalam suatu kebijakan yaitu, sebagai pelaksana suatu program maupun kegiatan, sektor swasta juga memiliki peranan penting dalam membantu pemerintah mengimplementasikan berbagai kebijakan mereka. Sektor swasta dalam hal ini adalah koperasi yang tidak kalah strategisnya berperan dalam membantu pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti (2012). Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasie Koperasi Dinas KUKMP Kab. Purworejo, Ibu Rimi Ani (50 tahun):

“Kami mendukung dengan kegiatan sesuai dengan aturan dasar yaitu aturan rumah tangga. Karena, koperasi itu bekerja tidak keluar dari pakemnya yaitu aturan-aturan yang ada yaitu AD/ART, Persus (Peraturan Khusus)” (Hasil wawancara 04 Februari 2020)

Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi menjadi sebuah alternatif pelaksanaan kebijakan publik, karena kedudukannya lebih dekat dan berorientasi pada hasil dan kerja sama antar anggota maupun kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Dinas Koperasi,

UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo mendukung untuk proses kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Koperasi Wanita Srikandi, namun harus tetap memperhatikan pakem (aturan tetap) sebagaimana peraturan yang ada seperti AD/ART, asas-asas koperasi, dan Peraturan Khusus yang mengatur kedudukan koperasi di dalam masyarakat. Sebagaimana pernyataan oleh Ibu Rimi Ani (50 tahun) Kasie Koperasi Dinas KUKMP Kab. Purworejo :

“Harapannya karena Kopwan Srikandi sekarang menjadi satu-satunya yang sedang moncer atau *level up* maka sebisa mungkin untuk membawa dan mengangkat nama baik Kabupaten Purworejo menjadi terkenal dan bagus. Tetapi tidak hanya di luarnya saja, namun dalamnya (manajemennya), karena Kopwan menjadi percontohan koperasi wanita yang bisa maju, ya sebenarnya di kabupaten Purworejo banyak koperasi wanita, namun satu-satunya yang sudah maju adalah Koperasi Wanita Srikandi yang harapannya bisa memberdayakan masyarakat pengrajin gula kelapa untuk dijadikan sebagai anggota, istilahnya mengambil dari dalam kabupaten purworejo jangan banyak ambil anggota dari luar kabupaten Purworejo” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020)

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Purworejo merupakan pelaksana kebijakan di bidang koperasi, UKM, dan perdagangan di wilayah pemerintahan kabupaten Purworejo. Sebagai pelaksana urusan wajib pemerintah daerah, tentu saja memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai langkah untuk menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro telah disahkan dan menjadi bahasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merealisasikan wujud pemberdayaan tersebut melalui dukungan program. Berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Rimi Ani (50 Tahun) :

“Untuk pelaksanaan tupoksi kita menjalankan sesuai yang tertera di dokumen Renja, renstra, atau RPJMD Kabupaten, pembinaan terhadap koperasi tersebut yaitu Koperasi Wanita Srikandi, kemudian Pengawasan

dalam bentuk (Koperasi wajib melaksanakan RAT (rapat anggota tahunan) untuk mengetahui seluk beluk permasalahan yang ada di dalam Koperasi tersebut, pelaksanaan AD/ART, simpan pinjam, dan pemasaran” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020 Pukul 08.15 WIB)

Kemudian menurut penjelasan Kasie Promosi dan Jaringan Usaha Dinas

KUKMP Kab. Purworejo, Bapak Andi Setyo K., S.T (38 tahun) :

“...Adanya program kriteria produk unggulan di Kabupaten Purworejo sudah sejak tahun 2015 silam, produk unggulan berbasis agribisnis sampai pada industri kreatif. Purworejo sendiri sudah mengusulkan beberapa produk unggulan terkait dengan pendekatan OVOP ke Provinsi Jawa Tengah yakni oleh Koperasi Wanita Srikandi. Karena untuk pemenuhan kriteria ekspor atau daya saing, masih banyak produk lokal khas yang belum termasuk dalam kriteria tersebut, sehingga saat ini perlu adanya pendampingan dan pengembangan jaringan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk daerah.” (hasil wawancara pada 6 November 2019).

“Gula semut hampir ada di seluruh Purworejo, karena potensi gula kelapa super, hanya saja selama ini UKM yang *concern* terhadap pengelolaan gula semut hanya ada beberapa salah satunya yaitu Koperasi Wanita Srikandi, kemudian di desa Hargorojo, desa Loano, dan desa Kaliharjo.” (hasil wawancara tanggal 06 November 2019)

Seperti yang dijelaskan oleh Kasie Kelembagaan Bid. UMKM Dinas

KUKMP Kab. Purworejo, Bapak Nur Hadi T. (50 Tahun) :

“.....Kita menangani permasalahan UMKM itu tidak mungkin sendiri, kita perlu sinergitas *stakeholder* terkait, seluruh komponen masyarakat baik itu masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun Perguruan tinggi / akademisi yang ada di kabupaten Purworejo. Mari kita sama-sama memberdayakan UMKM. Jadi kalau kita egosektoral, kita parsial, tidak mungkin berhasil.....” (hasil wawancara 04 Februari 2020).

“....Contoh sederhana yang riil mbak, itu kan anggaran dana desa yang sekarang cukup besar, namun penggunaannya hanya terfokus pada perbaikan sarana fisik saja, ketika fisik itu selesai, dana itu mau diapakan itu kan tidak bisa untuk memberdayakan masyarakatnya. Harus ada skala prioritas yang perlu ditangani. Karena UMKM itu memiliki prospek yang sangat bagus yaitu mampu mengentaskan kemiskinan, dia bisa menyerap tenaga kerja, dan ia bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa....” (hasil wawancara 04 Februari 2020)

Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo menjembatani dengan memberikan akses untuk pembiayaan pelaku UMKM atau usaha mikro guna mendukung kegiatan usahanya agar nantinya dapat terfasilitasi dengan baik. Bahkan untuk kontribusi

terhadap kemajuan koperasi pun senada dengan pernyataan senada dengan Ketua Kopwan Srikandi, Sri Susilowati (50 Tahun) dalam wawancara berikut.

“Upaya dari Dinas ada, pada saat kami mengurus NIK (Nomor Induk Koperasi) untuk syarat ekspor ke BEA Cukai di Semarang, kami dibantu oleh Diskoperindag/Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo untuk perizinannya mbak, dinas menjembatani proses tersebut. (Hasil Wawancara 18 Januari 2020, Pukul 08.23 WIB)”

Kemudian, yang dipaparkan oleh PPKL bahwa bentuk pendampingan terhadap Koperasi Srikandi melalui upaya kluster koperasi, penyuluhan koperasi sehat, dan memberikan dukungan melalui pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan). Berikut hasil wawancara dengan PPKL (Defri Maulana, S.Pd) :

“ya kita, di lapangan penyuluhan, pendampingan, RAT mbak. Pengawasan atau mengawasi kegiatan aktif kopwan srikandi, karena dia kan aktifnya di bagian produksi atau pemasarannya saja, karena di bagian USP (unit simpan pinjamnya) tidak memutar modal, dan sebageian besar modalnya itu berasal dari modal pribadi, dan modal pinjaman pihak ketiga seperti lembaga keuangan seperti Bank Jateng atau Bank BRI. Terus Kopwan Srikandi itu kan, sudah beberapa tahun ini belum menyelenggarakan RAT, karena harus melaporkan laporan keuangan karena ada tutup buku” (hasil wawancara, 04 Februari 2020)

Bentuk pendampingan PPKL untuk memberikan semangat kepada Koperasi Wanita Srikandi untuk terus menjadi agen pemberdayaan dalam masyarakat dengan tetap menggunakan pakem perkoperasian agar anggotanya tetap bisa mencapai daya kapasitas diri selain mencapai keuntungan produksi agar tidak terlepas dari pakem koperasi. Seperti yang dijelaskan oleh Kasie Kelembagaan Bidang UMKM, Bapak Nur Hadi T., (50 tahun) :

“.....Dan itu perlu disadari seperti itu. Kemudian, **“cintailah produk asli Purworejo”**, dan kita sudah membuat edaran untuk pakai produk-produk Purworejo, karena kita tidak kalah dengan produk-produk pabrikan. Bentuk *UMKM Center* yang ada di kabupaten itu bukan prioritas, karena dengan kemajuan era digital maka sudah mampu mewakili dengan pasar konvensional, tapi tidak menutup kemungkinan perpaduan antara pasar konvensional dengan pasar nyata yang ada di dalam negeri, dan tinggal bagaimana memanfaatkan era digital untuk tetap bisa membeli produk dalam negeri.

“.....Kalau sekarang *showroom* UMKM justru kurang berkembang, karena terkena dampak pasar konvensional (online). Kalau kita tidak bisa memulihkan keadaan, maka kita akan ketinggalan zaman karena era itu tidak bisa dibendung. Kemudian, terkait dengan pemasaran kita melakukan pelatihan-pelatihan (pemasaran online, packaging, dokumen jaring pola kemitraan dengan Alfamart, indomaret, Toko Laris, Jodo Plaza, sarinah, swalayan), dan kita ingin memiliki galeri UMKM di Bandara NYIA Yogyakarta, kalau di Bandara Ahmad Yani Semarang sudah, tinggal kesiapan UMKM untuk penyediaan produk yang layak apa belum” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020)

Setiap langkah dan upaya yang dicapai untuk kemajuan produk unggulan Kabupaten Purworejo selalu diselarasakan dengan karakteristik kebijakan, proses, lingkungan, dan masyarakatnya agar hasil dapat dicapai dengan kerja sama yang baik pula baik dari segi pemerintah, swasta maupun masyarakat.

4. Dampak Pemberdayaan Terhadap Sosial Ekonomi Petani Penderes

Dampak timbul akibat interaksi sosial dan perilaku sosial dalam masyarakat. Dampak bisa berarti konsekwensi sebelum dan sesudah adanya ‘sesuatu’. Dampak pemberdayaan mengarah pada perubahan sosial yaitu mengarah pada ‘kemajuan’ (*progress*), masyarakat mendapatkan dampak dari adanya kegiatan sebagaimana kedudukannya sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan masyarakat. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:110), hasil atau dampak pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan

keluarga, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok, dan lainnya) menuju ke kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, derajat kesehatan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan pokok).

Sebagaimana wawancara dengan Sekretaris Desa Ngasinan, Bp. Antoko (45 tahun) :

“...Ya, sebenarnya kalau kegiatan pemberdayaan oleh Kopwan Srikandi itu sudah mampu membantu perekonomian warga di sini mbak” (hasil wawancara 04 Februari 2020)

Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pekerjaan sosial (Dubois & Miley, 1992 dalam Mujiyadi, 2015:70) memberikan pedoman : a) membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati, menghargai pilihan dan klien dalam menentukan nasibnya. b) membangun komunikasi yang menghargai klien. c) terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien. d) merefleksikan sikap dan nilai pekerjaan sosial. Adapun fungsi sosial ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar minimum sebuah keluarga yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat desa Ngasinan dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi sebagai berikut.

a. Mitra Usaha

Adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Koperasi Wanita Srikandi sebagai stimulus untuk percepatan perbaikan ekonomi masyarakat di desa Ngasinan, karena selain sebagai mitra kerja dalam penjualan produk, kegiatan tersebut juga sebagai upaya untuk menggali potensi asli desa Ngasinan yang di mana masyarakatnya sebagian besar menjadikan nira sebagai sumber pendapatan dalam rumah tangga.

b. Peningkatan Pendapatan Warga

Pemberdayaan merupakan strategi untuk mengubah pola perilaku masyarakat dan hal-hal yang ada di dalam diri pribadi maupun masyarakat. Suatu upaya pemberdayaan diarahkan untuk memberikan daya atau kekuatan yang muaranya pada peningkatan kapasitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.. Pernyataan dari Bp. Antoko, Sekretaris Desa Ngasinan :

“ya sebenarnya kalau kegiatan pemberdayaan oleh koperasi itu sudah mampu membantu perekonomian warga di sini mbak. kalau untuk mencukupi iya, meskipun belum bisa 100% bisa menopang perekonomian warga. Kembali lagi ke harga mbak, kalau harga turun warga juga pendapatannya bisa turun atau berkurang. Kalau disini istilah orang desa kalau gula itu untuk dapur atau sampingan, cuma kalau untuk kebutuhan sehari-hari itu mereka bisa” (hasil wawancara 04 Februari 2020)

Menurut hasil wawancara di atas, bahwa dengan adanya kegiatan pemberdayaan oleh Kopwan Srikandi, maka cukup membantu perekonomian masyarakat desa Ngasinan agar bisa mencukupi kebutuhan hidup dari kegiatan pembuatan gula cetak ke gula semut. Namun, belum adanya dukungan untuk kegiatan usaha yang dijalankan warga masyarakat desa Ngasinan tersebut, mereka masih menggunakan modal pribadi dan belum berani untuk mengakses pinjaman modal kepada pihak luar. Sebagaimana wawancara dengan Sekretaris Desa Ngasinan, Bp. Antoko (45 tahun) :

“.....Karena masalah dari segi penjualannya itu lho mbak kan belum tetap, jadi mereka kalau mengambil itu kan harus setoran sehingga takut nggak sampai, apalagi sekarang KUR itu susah mbak, ya bukan karena masalah bunga, kemarin dari kami adanya yang mengajukan, tapi hanya lolos sepertiganya saja” (hasil wawancara 04 Februari 2020)

Karena harga yang didapatkan dari hasil penjualan gula semut kadang naik turun atau fluktuatif, maka banyak yang dikeluhkan dari petani-petani

penderes. Sehingga apabila ingin menaikkan modal usaha, atau melakukan pinjaman mereka belum sepenuhnya berani karena hasil yang didapatkan belum tentu dapat untuk mengangsur pinjaman mereka. Hasil wawancara dengan Bp. Neriyo Suwito, anggota petani penderes nira Desa Ngasinan :

“...Menurut saya kalau tentang petani penderes itu pokok utama tentang ketersediaan sabit dan wajan, peralatan-peralatan sebagai modal dasar. Kemudian, kayu untuk memasak nira dan modal utama adalah ketersediaan pohon kelapa yang sistemnya dengan modal maro (dibagi) atau milik sendiri. Maro itu kita sama-sama kerja menderes tapi nanti kita bagi hasil dengan pemilik pohon kelapa tersebut, nanti niranya diolah sendiri-sendiri dan menjadi industri perumahan (*home industry*). Namun, kalau kita terkendala dengan harga, dan pemasaran/penjualan mbak, penjualan gula semut itu kadang-kadang kalah saing dengan gula cetak.

“...Karena harga gula semut itu harga stabil/standar, tapi kalau cetak itu sesuai pangsa pasar yaitu permintaan pasar, kalau permintaan banyak pasti harganya naik kalau permintaan kurang mesti harganya turun. Harga gula semut dan gula cetak itu bisa fluktuatif kadang tinggi gula cetak dan kadang gula semut, selisih harga juga terpaut tinggi mbak bisa mencapai Rp 2000 /kilo. Kalau teman saya menjelang puasa itu bisa mencapai Rp 3000/kilonya lebih tinggi cetak daripada gula semut karena kalau gula semut kan taraf ekspor, sedangkan kalau gula cetak kan harga pasar lokal” (hasil wawancara 04 Februari 2020).

Senada dengan pernyataan Anggota Petani Penderes Nira lainnya, Bp

Irpan (54 Tahun) :

“...Iya mbak. Karena untuk menderes itu yang utama punya peralatannya dulu. kendala utama itu terkait HARGA, antara gula cetak dan gula semut itu selisih Rp 5000 itu belum masuk mbak, karena kalau untuk gula semut itu masuk prosesnya lebih lama, harus digerus. Pekerjaannya sebenarnya ringan, namun akan lebih lama yaitu kebiasaan untuk membuat gula semut akan menjadi lebih lama namun, harga yang didapatkan belum bisa masuk atau sesuai apa yang petani harapkan.”

“...Saya selaku Pengepul gula semut, kemarin sudah saya sampaikan kepada manajemen Kopwan kalau ingin istilahnya menguasai atau memberdayakan betul-betul itu harusnya dibeli semua ketika sudah menjadi gula cetak ya tetap dibeli yang penting kan organikya ada. Ketika nanti para petani sudah menyatu kesitu jadi tidak mencari pasaran yang lain. Namun ketika, tidak dibeli semua nanti petaninya lari mencari pasaran lain. Sebetulnya di sini termasuk anggota yang setia, ketika disuruh organik kita memang sudah sejak dahulu organik walaupun belum disertifikasi organik pun kita sudah organik. Karena pendapat orang sini kan kalau tanah kering terkena bahan kimia kan tanahnya jadi tandus” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020)

Potensi sumber daya alam yang baik seperti hasil perkebunan di desa Ngasinan, memberikan peluang untuk warganya melalui kegiatan usaha gula semut organik yang kualitasnya lebih baik. Hasil pelatihan dari kegiatan mampu menghasilkan kurang lebih 8 kwintal gula semut untuk perminggunya. Dalam artian dengan adanya pelatihan pembuatan gula semut di desa Ngasinan, maka membuka peluang untuk perekonomian warga. Karena medan yang jauh dari pusat kota tentunya penerapan program atau inovasi baru perlu diajarkan melalui pembelajaran sosial (*social learning*) agar ke depannya peningkatkan pendapatan keluarga petani penderes dapat segera stabil. Seperti yang diungkapkan oleh anggota petani penderes, Bp. Irpan (45 Tahun) :

“...Ya akan lebih mudah untuk pemasaran produk mbak” (Hasil wawancara 04 Februari 2020)

Senada dengan Bu Sobiah (45 Tahun), anggota KWT Laras :

“...Bisa untuk menambah nilai jual gula cetak mbak, karena ada selisih harga.” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020)

Lebih lanjut pernyataan dari Ketua Gapoktan Ardha Laukha, Bp. Turijan (50 Tahun) :

“...Manfaat (banyak contoh, Bu Nur) sudah bisa membuat gula semut aren dengan menumbuhkan ekonomi baru. Kemudian bu Intarti dengan membuat gula semut rasa jahe. Sempat ada pemasaran, namun belum berani untuk banyak karena terkendala P-IRT, seminggu bisa 8 kwintal)” (Hasil Wawancara 04 Februari 2020)



Tahun	Gula Cetak	Gula Semut
2017	Rp 9.500	Rp 13.500
2018	Rp 11.500	Rp 14.500
2019	Rp 13.500	Rp 17.500

Grafik 1. Perbandingan harga gula cetak dan gula semut (per-kilogram)

*sumber : diolah peneliti

Banyak manfaat yang didapatkan dari adanya kegiatan pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi, mulai dari peningkatan pendapatan, pemasaran produk warga, sampai memunculkan titik ekonomi baru dengan diversifikasi (penganekaragaman) pengolahan produk gula semut rasa jahe. Selain itu bentuk manfaat dari adanya pemberdayaan adalah tentang kemudahan untuk akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Pernyataan dari Anggota KWT Laras, Bu Sobiah (45 Tahun) :

“.....Bisa, tergantung kalau penghasilannya tinggi ya lancar-lancar saja mbak”
(Hasil wawancara 04 Februari 2020)

“.....Kita menyekolahkan anak-anak kita tetap jalankan sesuai program pemerintah 12 tahun dari SD sampai tingkat atas mbak. Karena penghasilan yang kita dapatkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yaitu agar anak bisa sekolah” (Hasil wawancara 04 Februari 2020)

Dampak pemberdayaan pelatihan pembuatan gula semut organik telah memberikan kontribusi terhadap penambahan pendapatan untuk keluarga petani penderes, pengepul, maupun *supplier*. Karena, dengan perolehan

pendapatan tersebut, hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok serta akses untuk pendidikan dan kesehatan keluarga di samping kebijakan pendidikan oleh pemerintah yakni wajib belajar 12 tahun. Pendapatan (*revenue*) merupakan jumlah uang yang masuk dari kegiatan usaha barang atau jasa. Besaran pendapatan dari pembuatan gula semut ataupun gula cetak bisa mencapai 5 kilo per-harinya tergantung pada nira yang diperoleh. Apabila perhari bisa membuat gula sekitar 5-10 kilogram, maka hasil penjualan yang diperoleh adalah kisaran Rp 87.500 s.d. Rp 175.000 per-penderes. Namun, kembali lagi pada kondisi cuaca dan permintaan dari pihak Koperasi Wanita Srikandi untuk penjualan gula semut. Pernyataan dari Bapak Turijan :

“.....Harapannya sederhana, yaitu kestabilan harga gula agar tidak naik turun. Kalau ada santunan kecelakaan kerja itu bukan harapan kami, kami selalu mengharapkan untuk sehat dan selamat dalam setiap pekerjaan. Kemudian, karena saat ini sudah banyak sekali bakul/pedagang gula semut yang membeli/memborong gula semut dengan harga tinggi, otomatis kan kita jadi saingan harga dengan mereka ya kita untuk menjaga kualitas dan kuantitas itu juga susah” (Hasil wawancara 04 Februari 2020)

Senada dengan Anggota Petani Penderes Nira, Bp. Neriyo Suwito (60 Tahun) :

“...Ya kalau memang berjalan dengan juklak atau sesuai regulasi ya itu akan senang sekali. Tapi kan masalah Undang-undang dan berlakunya itu tidak semudah yang dibayangkan. Seumpamanya kita sebagai pelaku UKM kadang kita minta izin ya kadang belum langsung jadi, prosesnya lama. Kalau programnya dengan undang-undang itu, sesuai ya mungkin masyarakat sangat senang” (Hasil wawancara 04 Februari 2020)

c. Mobilisasi Modal Sosial Melalui Pengorganisasian Masyarakat

Annahar, dkk (2017) modal sosial melekat pada struktur hubungan antara para individu dan para aktor. Struktur dari sebuah hubungan yang terjalin antar aktor akan membentuk atau membangun sebuah modal sosial. Acuan untuk penggunaan lahan petani petani penderes untuk pemanfaatan

nira di blok desa Ngasinan (blok G-28), terdapat sistem bagi hasil dengan penerapan sistem sosial maro (bagi), sendiri, dan diparo (dibagi). Dampak kegiatan pemberdayaan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa Ngasinan di mana sistem sosial tersebut terbentuk sebagai solidaritas antar sesama petani penderes per-blok yang tidak memiliki lahan untuk mendapatkan nira dari pohon kelapa yang dideres, di mana setiap wilayah sertifikasi tersebut sudah ada penandaan wilayah sertifikasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberlakukan antara ICS/pendamping lapangan dari Koperasi Wanita Srikandi, petani penderes, dan pihak luar dari lembaga sertifikasi CU (*Controls Union*). Pemanfaatan bagi lahan diharapkan dapat menjadi sumber pengolahan nira dari masing-masing petani yang tidak memiliki lahan yang cukup.

Adanya kelembagaan masyarakat yang terbentuk seperti **Kelompok tani “Ardhalaukha”, Kelompok Tani Wanita “Laras”** yang keberadaannya sangat penting dalam pembentukan jaringan usaha di desa Ngasinan. Tumbuhnya norma-norma atau aturan khusus dalam pengembangan suatu produk yang didasarkan pada pembentukan kelembagaan sesuai potensi lokal yang ada yaitu, pemanfaatan hasil sumber daya berupa nira, didukung oleh keberadaan masyarakatnya, dan dikukuhkan dengan sistem sosial dan jaringan usaha yang tercipta dengan baik sehingga hasil pemasaran pun dapat terlaksana sedemikian rupa. Pertemuan rutin Kelompok Tani Ardha Laukha Desa Ngasinan Kecamatan Bener di adakan setiap 35 Hari sekali (*selapanan*) tepatnya pada hari pasaran Rabu Legi pada pukul 10.30 – 12.00

WIB. Adapun susunan kepengurusan Kelompok Tani Ardha Lauka adalah sebagai berikut.

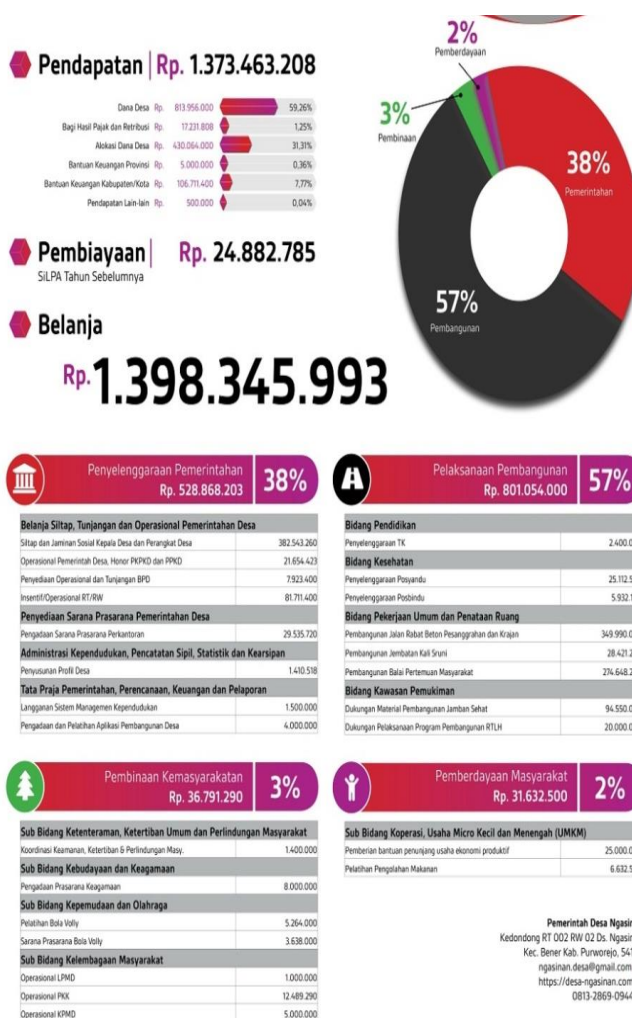
Tabel 11.
Susunan Kepengurusan Kelompok Tani Ardha Lauka Tahun 2019-2020

Ketua	:	Turijan
Sekretaris	:	Sunaji
Bendahara	:	Turaikan
Jumlah anggota	:	40 Orang

Sumber : data primer

Jadi, modal sosial yang berkembang di kelompok tani penderes nira adalah dengan diterapkannya sistem maro yakni orang menderes/menyadap (si A maro pohon kelapa di B), kemudian si B disebut dengan diparo (pemilik pohon). Untuk pembagiannya adalah 50% 50% pada hasil nira yaitu sesuai kesepakatan misalkan, 2 hari pertama yang mengambil si B, kemudian 2 hari berikutnya adalah yang punya pohon. Sistem pembagiannya tergantung dari perjanjian si pemilik dan si penderes, apakah nantinya akan diambil di luar nira atau saat gula sudah jadi. Sehingga dengan sistem maro dan diparo, maka pemerataan hasil pendapatan bagi petani penderes akan merata yakni hasil dari estimasi produksi per hari akan disesuaikan dengan jumlah produksi gula yang tercetak, sampai nantinya akan dikalikan dengan harga jual di pengepul/*supplier* di blok tersebut. Jadi, dampak yang mengarah kepada penguatan kapasitas masyarakat dengan terbentuknya modal sosial yang kuat di antara petani penderes nira di desa Ngasinan, seperti adanya jaringan berupa banyaknya anggota petani penderes lainnya,

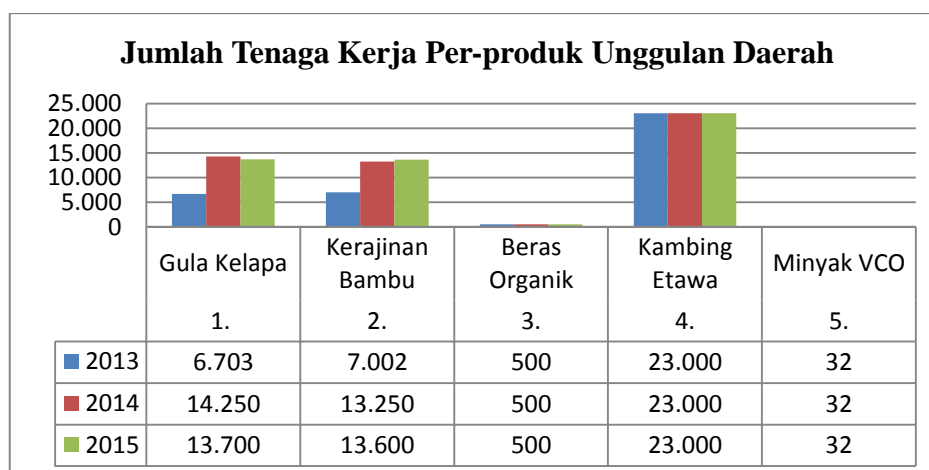
kemudian terbentuk sistem pengepul, supplier, dan ICS untuk distribusi hasil produksi gula. Adapun dukungan Pemerintah Desa Ngasinan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif telah tercantum dalam APBDes desa Ngasinan yakni sebesar 2% anggaran untuk sub .bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 31.632.500 untuk pemberian bantuan penunjang ekonomi produktif serta bantuan pelatihan pengolahan pangan.



Gambar. 29 Alokasi Dana Desa Ngasinan
Sumber : Website Desa Ngasinan Tahun 2020

d. Pengurangan Pengangguran

Berikut adalah jumlah tenaga kerja per- bidang potensi unggulan daerah yakni :



Grafik 2. Jumlah Tenaga Kerja

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo

Berdasarkan grafik di atas, bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap untuk produk unggulan berbasis UMKM di Kabupaten Purworejo didominasi oleh sektor gula kelapa sebagai komoditas pangan unggulan. Sedangkan untuk komoditas peternakan dan pertanian ada pada Kambing ras Kaligesing, beras organik, dan minyak VCO. Untuk sentra industri ada pada kerajinan bambu. Di Kabupaten Purworejo sendiri, untuk komoditas seperti kelapa sangatlah banyak seperti pada sentra koperasi dan UMKM di 16 Kecamatan se-kabupaten Purworejo.

Berdasarkan grafik di atas, bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap untuk produk unggulan berbasis UMKM di Kabupaten Purworejo didominasi oleh sektor gula kelapa sebagai komoditas pangan unggulan. Sedangkan untuk komoditas peternakan dan pertanian ada pada Kambing ras Kaligesing,

beras organik, dan minyak VCO. Untuk komoditas industri ada pada kerajinan bambu. Di Kabupaten Purworejo sendiri, untuk komoditas seperti kelapa sangatlah banyak seperti pada sentra koperasi dan UMKM di 16 Kecamatan se-kabupaten Purworejo. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Sie Promosi dan Jaringan DINKUKMP Kab. Purworejo menerangkan bahwa :

“Adanya program kriteria produk unggulan daerah di Kabupaten Purworejo sudah sejak tahun 2015 silam, produk unggulan berbasis agribisnis sampai sampai pada industri kreatif. Purworejo sendiri sudah mengusulkan beberapa produk unggulan dengan pendekatan OVOP ke Provinsi Jawa Tengah yakni oleh Koperasi Wanita Srikandi. Karena untuk pemenuhan kriteria ekspor atau daya saing, masih banyak produk lokal khas yang belum termasuk dalam kriteria tersebut, sehingga saat ini perlu adanya pendampingan dan pengembangan jaringan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk daerah (Hasil Wawancara dengan Bapak Andi S.K. selaku Kepala Sie Promosi dan Jaringan Usaha DINKUKMP Kab. Purworejo pada tanggal 6 November 2019 Pukul 10.03 WIB)”

Kemampuan usaha di bidang mikro sangatlah potensial untuk meningkatkan jumlah pendapatan dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, omzet yang didapatkan dapat sebagai sumbangan terhadap pemasukan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto). Berikut adalah tabel PDRB menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2018 :

Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Purworejo Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2017-2018

Kategori	Uraian	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.895.974.63	4.095.421.66
B	Pertambangan dan Penggalian	129.714.86	136.842.34
C	Industri Pengolahan	3.019.665.47	3.261.560.84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.786.78	13.911.51
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	9.059.61	9.464.79
F	Konstruksi	1.399.243.58	1.542.876.09
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.017.433.74	2.174.630.89
H	Transportasi dan Pergudangan	838.595.58	892.120.37

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	338.923.02	366.054.97
J	Informasi dan Komunikasi	802.377.39	884.589.45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	590.207.42	628.604.26
L	<i>Real estate</i>	326.133.02	343.251.36
M,N	Jasa Perusahaan	48.262.92	53.412.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	660.358.90	694.263.01
P	Jasa Pendidikan	1.400.993.48	1.547.665.40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	265.701.23	289.491.69
R,S,T,U	Jasa Lainnya	374.569.36	413.833.11
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Rp16.130.001	Rp17.349.994

Sumber : Dokumen Publikasi BPS Kabupaten Purworejo
 Sebagaimana dari data Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten
 Purworejo tahun 2019 (LAKIP) diuraikan sebagai berikut.

Kondisi perekonomian Kabupaten Purworejo cenderung meningkat sedikit pada tahun 2018 yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,31% menjadi 5,32%. Kondisi ini juga terjadi di Jawa Tengah yang pertumbuhan ekonominya semakin menguat dari 5,26% pada tahun 2017 menjadi 5,32% di tahun 2018. Perekonomian Purworejo ini juga sejalan dengan perekonomian nasional yang menguat dari 5,07% menjadi 5,17% di tahun 2018. Nilai PDRB Kabupaten Purworejo ADHB selama periode tahun 2014 s.d 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume (Data LAKIP Purworejo dalam angka 2019 oleh BAPPEDA Kab. Purworejo).

Selain menambah pendapatan, kegiatan pemberdayaan juga turut andil dalam penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah setempat, dengan adanya inovasi teknologi “Alat Pembuat Gula Cair”, di mana dengan menggunakan alat filterisasi pengatur pH dalam nira, maka inovasi ini mendapatkan hati di masyarakat desa Ngasinan terutama para penderes karena, nira yang mereka peroleh bisa digunakan secara penuh tanpa harus memasak nira berjam-jam cukup dengan menggunakan alat filter kemudian menjadi gula cair yang tentunya sesuai dengan kriteria ekspor. Seperti pada tabel berikut ini di mana perolehan dari hasil penjualan gula disesuaikan dengan status penggunaan lahan serta estimasi hasil gula yang diproduksi

untuk per-harinya. Sehingga nantinya hasil yang diperoleh dijual ke Koperasi Wanita Srikandi melalui pengepul dengan satuan harga yang telah ditentukan dikalikan dengan banyaknya total produksi gula yang dihasilkan oleh petani penderes.

Tabel 13. Status Kebun Kelapa Yang Dideres

No	Nama Petani	Kode Petani	Status Kebun Kelapa Yang Dideres	Luas (Ha)	Jumlah Pohon	Jumlah Pohon Yang Dideres	Est Prod/Hari/Petani (Kg)
1	Suronto	G28.001	Diparo Fidanaroh(G.28.002)	0.625	5	5	1.25
2	Fidanaroh	G28.002	Sendiri, Maro Suronto(G.28.001)	0.06	10	15	6.25
3	Sahno	G28.003	Diparo Sujono(G.28.004),	0.075	16	8	2
4	Sujono	G28.004	Sendiri, Maro Sahno(G.28.003)	0.07	15	18	7
5	Nurkolis	G28.006	Diparo Trisno (G28.025)	0.07	16	10	2.5
6	Giyarti	G28.007	Diparo Siswanto(G.28.008)	0.08	12	6	1.5
7	Siswanto	G28.008	Maro Giyarti(G.28.007)			6	1.5
8	Lasiman	G28.009	Diparo Klumpuk(G.28.010)	0.1	11	10	2.5
9	Klumpuk	G28.010	Maro Lasiman(G.28.009)			10	2.5
10	Trimono	G28.013	Diparo Witrawan(G.28.014), Sarwito	0.25	28	19	4.5
11	Witrawan	G28.014	Sendiri, Maro Trimono(G.28.013)	0.04	5	8	3.25
12	Amiyono	G28.015	Diparo Abdilah(G.28.017)	1	25	20	5
13	Harmin	G28.016	Diparo Abdilah(G.28.017), Diparo Ibnu Yasifa (G28.075)	1	36	18	4.5
14	Abdilah	G28.017	Maro Harmin(G.28.016), Maro Marsih(G.28.018), Maro Amiyono(G.28.015)			38	9.5
15	Marsih	G28.018	Diparo Abdilah(G.28.017)	0.346	8	8	2
16	Turijan	G28.020	Sendiri	0.04	10	8	4
17	Muhyanto	G28.021	Maro Sutarto(G.28.022)			16	4
18	Sutarto	G28.022	Diparo Muhyanto(G.28.021)	0.08	16	16	4
19	Soim	G28.023	Sendiri, Maro Jemikin(G.28.024)	0.04	17	21	9.5
20	Jemikin	G28.024	Diparo Soim(G.28.023)	0.04	12	4	1
21	Trisno	G28.025	Diparo Edi(G.28.026), Maro Nurkholis (G28.006)	0.175	15	25	6.25
22	Edi	G28.026	Maro Trisno(G.28.025)			15	3.75
23	Salim	G28.027	Diparo Sokiman(G.28.028), Mustofa (G28.077)	0.06	21	18	4.5

24	Sokiman	G28.028	Sendiri, Maro Salim(G.28.027)	0.05	10	18	6.5
25	Tutur	G28.029	Diparo Kotib(G.28.030), Khamib (G28.070)	0.08	23	19	4.75
26	Kotib	G28.030	Maro Tutur(G.28.029)			15	3.75
27	Nuryasi	G28.031	Diparo Waliyan(G.28.032)	0.05	8	8	2
28	Waliyan	G28.032	Sendiri, Maro Nuryasi(G.28.031)	0.04	12	20	8
29	Sonah	G28.033	Diparo Tumun(G.28.034)	0.04	5	4	1
30	Tumun	G28.034	Maro Sonah(G.28.033), Kholil (G28.079)			9	2.25
31	Wakijan	G28.035	Sendiri	0.25	25	20	10
32	Winarto	G28.036	Sendiri	0.02	15	9	4.5
33	Suyitno	G28.037	Sendiri	0.1	30	15	7.5
34	Irfan	G28.038	Sendiri	0.12	15	11	5.5
35	Surip	G28.041	Diparo Bolot(G.28.042)	0.056	6	6	1.5
36	Bolot	G28.042	Maro Surip(G.28.041)			6	1.5
37	Taryanto	G28.043	Sendiri	0.02	5	5	2.5
38	Muh Khabib	G28.044	Sendiri	0.0532	7	7	3.5
39	Rijan Atmono	G28.045	Sendiri	0.12	12	12	6
40	Saryono	G28.049	Diparo Hartoko(G.28.050)	0.1	15	10	2.5
41	Hartoko	G28.050	Maro Saryono(G.28.049)			10	2.5
42	Syarifah	G28.051	Diparo Wiyono(G.28.052)	0.5	10	7	1.75
43	Wiyono	G28.052	Maro Syarifah(G.28.051)			7	1.75
44	Niryo Suwito	G28.053	Sendiri	0.1	12	12	6
45	Sukirman	G28.054	Diparo Puji(G.28.055)	0.5	10	10	2.5
46	Puji Sulisma	G28.055	Maro Sukirman(G.28.054), Eko Subekti (G28.078) , Wiwik R (G28.075)			21	5.25
47	Mudiyono	G28.056	Diparo Arifin(G.28.057)	0.06	15	10	2.5
48	Arifin	G28.057	Maro Mudiyono(G.28.056)			10	2.5
49	Suryokoco	G28.058	Sendiri	0.5	25	16	8
50	Sarimah	G28.059	Diparo Yogik(G.28.060)	0.054	10	7	1.75
51	Yogik	G28.060	Maro Sarimah(G.28.059)			7	1.75
52	Ngadiman	G28.061	Diparo Samakudin(G.28.062)	0.075	10	10	2.5

53	Samakudin	G28.062	Maro Ngadiman(G.28.061)			10	2.5
54	Talibun	G28.064	Diparo Supangat(G.28.065)	0.463	12	8	2
55	Supangat	G28.065	Maro Talibun(G.28.064)			8	2
56	Widayat	G28.067	Sendiri	0.06	5	5	2.5
57	Sugiyono	G28.068	Sendiri, Maro Turaikhan(G.28.071)	0.04	23	25	10
58	Paryono	G28.069	Sendiri	0.33	18	8	4
59	Supadi	G28.070	Sendiri	0.43	15	10	5
60	Turaikhan	G28.071	Diparo Sugiyono(G.28.068)	0.5	10	10	2.5
61	Wasini	G28.072	Diparo Khamib(G.28.073)	0.035	10	10	2.5
62	Khamib	G28.073	Maro Wasini(G.28.072), Tukur (G28.029)			14	3.5
63	Sumiyoto	G28.074	Sendiri	0.45	10	6	3
64	Wiwik Retno	G28.075	Diparo Puji(G.28.055)	0.25	15	6	1.5
65	Ibnu Yasifa	G28.076	Maro Harmin (G28.016)			9	2.25
66	Mustofa	G28.077	Maro Salim (G28.027)			10	2.5
67	Eko Subekti	G28.078	Diparo Puji(G.28.055)	0.02	5	5	1.25
68	Kholil	G28.079	Diparo Tumun(G.28.034)	0.05	10	5	1.25

Sumber : Data Dokumentasi Inspeksi ICS Kopwan Srikandi Tahun 2020

B. Pembahasan

1. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi dengan menggunakan pendekatan pembangunan berpusat pada rakyat menurut perspektif dari David C. Korten tentang *people centered* (berpusat pada manusia). Dengan beberapa factor-faktor untuk mencapai kesesuaian implementasi kebijakan seperti jenis program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran. Beberapa prinsip yang terdapat dalam ciri pembangunan berpusat pada manusia, sesuai dengan bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi, di mana prakarsa dan kebutuhan masyarakat diletakkan pada masyarakat itu sendiri melalui pemanfaatan potensi sumber daya yang dalam masyarakat desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan melalui jalan pemberdayaan dengan alur sebagai berikut.

Tabel 14. Tahapan Kegiatan Program Pemberdayaan

No.	Program	Pelaksanaan
1.	<i>Input</i>	1. Perluasan jangkauan Sesuai dengan ciri pembangunan berpusat pada manusia, bahwa proses pembentukan jaringan antar birokrasi, LSM, dunia usaha, atau kelompok dalam masyarakat akan meningkatkan kemampuan dan mengelola berbagai sumber-sumber. Perluasan jangkauan dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak-

banyaknya anggota petani penderes baik dari dalam Kabupaten Purworejo maupun dari luar Kabupaten Purworejo, yaitu Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen. Dari hasil penjarangan anggota petani penderes terdapat sekitar 1820 petani pada tahun 2019. Sertifikasi organik sebagai jaminan pertanian berkelanjutan yang mengedepankan aspek higienitas suatu produk pangan menjadi ilmu baru bagi petani penderes nira di desa Ngasinan. Kegiatan diawali dengan

a) Sosialisasi (dilaksanakan dengan mengumpulkan per-dasawisma dalam setiap blok, diberikan materi ToT (*training of trainer*) tentang keorganikan. Diikuti oleh ICS dari masing-masing blok dan diikuti dengan penyampaian temuan-temuan/kendala dalam pengelolaan gula. Dilakukan pada awal tahun secara berkala dengan mempertimbangkan komitmen petani penderes lama.

b) Pendataan dan pendaftaran petani penderes (diperoleh sebanyak 68 Petani penderes dari blok G-28 desa Ngasinan. ICS mendata nama-nama petani yang akan masuk dalam *farmer agreement* kemudian, dilakukannya pendaftaran untuk memvalidkan data dari ICS per-blok ke ICS dari Kopwan Srikandi.

c) Audit/pemeriksaan internal

Dalam kegiatan sertifikasi organik, terdapat dua penyuluh lapangan (ICS) yaitu ICS intern dan ICS ekstern. Untuk ICS intern berasal dari ketua kelompok dalam masyarakat seperti ketua dusun atau ketua RT di wilayah desa Ngasinan. Sedangkan, untuk ICS ekstern berasal dari pihak Koperasi Wanita Srikandi sendiri. Audit dilakukan oleh ICS dengan tujuan untuk memastikan lahan yang akan disertifikasi dikelola oleh petani dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan.

d) Audit Pemeriksaan Eksternal (oleh *controls union*)

Dilakukan setelah adanya laporan dari pihak audit internal yaitu dari pihak ICS

	<p>Koperasi Wanita Srikandi. Auditor dari sertifier CU (<i>Controls Union</i>) mengecek langsung keberadaan lahan pertanian kelapa, kemudian pengecekan status pohon dengan lahan di sebelah daerah sertifikasi, penggunaan peralatan menyadap dan perlengkapan untuk pengolahan nira.</p> <p>e) Uji Laboratorium Gula kelapa yang sudah dikirimkan ke CPU pusat di Cangkrrep Lor, Purworejo kemudian diambil dari <i>batch</i> proses kemudian dipisahkan dengan sortir kualitas GKP (gula kering petani) dengan beberapa poin mulai dari A, B, sampai C (tingkat kecerahan gula).</p> <p>f) Uji <i>Traceability</i> (runtutan asal-usul gula) Gula semut berasal dari proses penyadapan nira yang dikurangi kadar airnya dengan tingkat air sebanyak 2-3% hingga menjadi padat melalui proses pengolahan. <i>Traceability</i> diterapkan guna mengetahui runtutan asal-usul kejelasan gula terkait terbebas dari pencemaran lingkungan dan zat-zat kimia, higienitas gula sesuai standar organik dan sertifikasi mutu pasar ekspor.</p> <p>g) Terbit sertifikasi Setelah dlakukannya audit internal dan eksternal kemudian diujikan pada uji <i>traceabilty</i> maka petani yang ada dalam list pedataan dapat melaksanakan pengolahan nira setelah terbitnya sertifikasi organic dari CU (<i>controls union</i>).</p>
2. <i>Process</i>	<p>a) Pelatihan pembuatan gula semut organik Pelatihan dilakukan di balai desa Ngasinan dengan mengumpulkan masyarakat desa Ngasinan yang sehari-harinya menajdi penderes nira dan mengolah gula kelapa. Sumber daya dalam pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah sumber daya alam</p> <p>b) Pemberian sarana produksi (saprodi) Anggaran didapatkan dari RAB Kopwan Srikandi sebanyak RAB Tahunan yaitu 2,5% dikalikan dengan laba ketemu di akhir laporan untuk dana CSR, biasanya juga bentuk peralatan</p>

		<p>produksi atau saprodi untuk petani anggota seperti alat ayak gula semut (stainles mess 16), kemudian Pongkor khusus makanan (<i>food grade</i>) 1 petani 10 Pongkor, dan untuk tempat/ember laru.</p> <p>c) Jaminan sosial petani penderes Diberikan santunan untuk petani penderes yang mengalami kecelakaan saat bekerja dengan sebagai bentuk <i>CSR</i> Kopwan untuk dana sosial sebesar Untuk petani yang jatuh kita berikan santunan Rp 5 juta, kemudian meninggal karena sebab apapun Rp 4 juta, kemudian petani jatuh kemudian cacat tetap itu Rp 3 juta.</p>
3.	<i>Output</i>	<p>Dengan adanya kegiatan pemberdayaan oleh Kopwan Srikandi maka akan menciptakan jaringan kemitraan antara petani penderes, pengepul, supplier dan Kopwan Srikandi selaku mitra usaha dan mitra dagang. Karena pemasaran Kopwan Srikandi yang sudah meluas hingga pasar Eropa, Afrika, dan Australia, maka akan membukakan akses distribusi yang luas bagi penderes nira dalam memasarkan produknya selain ke pasar lokal. Petani mampu menjual hasil produk dengan besaran Rp 17.500 per-kilogram ke pasaran lokal, dan mampu mengajukan legalitas dan P-IRT ke Dinas sebagai usulan untuk pengembangan usaha gula semut pada tahun 2020 ini.</p>
4.	<i>Outcome</i>	<p>Dengan adanya kegiatan sosialisasi, pelatihan, pemberian bantuan alat, dan pemasaran maka ladang pekerjaan yang ada di desa Ngasinan dapat terorganisir dengan baik, hingga mampu menjadikan pacuan semangat untuk memunculkan iklim usaha baru berupa diversifikasi produk yakni, produk gula semut aneka rasa mulai dari rasa jahe, kacang, kunyit, dan original agar masyarakat tidak terpaku pada satu jenis produk dan mampu terdorong untuk membuat jenis produk lainnya.</p>

Sumber : data primer

Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha mikro juga sebagai pelaksanaan peningkatan hasil produksi pertanian dan perkebunan (agribisnis) melalui subsistem hulu dan hilir. Sebagaimana AD/ART Koperasi Wanita Srikandi yaitu sebagai agen pemberdayaan masyarakat mulai dari hulu sampai hilir. Subsistem hulu (*up-stream agribisnis*) merupakan subsistem yang berkenaan dengan pengadaan sarana dan penyaluran sarana produksi pertanian antara lain, benih, bibit, makanan, pupuk, obat-obatan, serta peralatan pertanian sebagai modal pertanian. Sedangkan subsistem hilir (*down-stream agribusiness*) merupakan aktivitas pascapanen, subsistem ini tidak hanya aktivitas pengolahan tingkat sederhana, melainkan menyangkut seluruh proses kegiatan mulai dari penanganan pasca panen hingga pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah nilai tambah dari produksi (Annahar dkk, 2017:94).

Pemberdayaan dengan pemanfaatan sumber daya yang ada harus bisa dikelola dengan baik, sehingga keberadaan pemerintah desa pun menjadi penting di samping tingkat partisipasi masyarakatnya untuk bisa ikut andil dalam kegiatan pemberdayaan. Masyarakat desa harus bisa menerima inovasi baru (*open minded*) terhadap kemajuan teknologi maupun prasyarat dari adanya kegiatan pemberdayaan. Menurut Tahir (2015:22) bahwa setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Pemberdayaan pada dasarnya adalah proses untuk

memandirikan masyarakat agar memiliki keberdayaan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan kemudahan akses sumber daya. Upaya untuk pengembangan menuju arah positif dilakukan dengan kegiatan pemberdayaan terhadap petani penderes nira, upaya untuk memberikan bekal dan penguatan agar nantinya dapat menjadi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi melalui pengembangan usaha mikro gula semut yang dijalankan.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok marginal untuk bisa dibangun atau didayakan dari potensi sumber daya lokal yang masih sesuai dengan kearifan budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan serta berkelanjutan.

2. Dampak Kegiatan Pemberdayaan Terhadap Sosial Ekonomi Petani

Penderes Nira

Kegiatan pemberdayaan pada hakikatnya merupakan pembangunan sosial, jadi harus menjadi gerakan yang didukung oleh semua unsur mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media massa. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai ‘proses’ pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai sebuah ‘tujuan’ maka pemberdayaan menunjuk pada

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sehingga dampak kegiatan pemberdayaan terhadap kehidupan sosial ekonomi mengarahkan kepada :

a) Merupakan Kegiatan Yang Terencana dan Kolektif

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi merupakan suatu program kegiatan kemasyarakatan yang dilatarbelakangi oleh ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Khusus, dan AD/ART dari Koperasi itu sendiri. Koperasi Wanita Srikandi muncul sebagai suatu dobrakan untuk mengembangkan dan memajukan potensi masyarakat lokal untuk bisa sampai pada peningkatan pemenuhan ekonomi maupun pengurangan angka kemiskinan. Suatu program direncanakan terlebih dahulu agar nantinya tepat sasaran dan hasil yang dicapai pun dapat dicapai dengan baik.

Program pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, karena melibatkan unsur-unsur dari Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. sebagai pelaksana kebijakan publik, koperasi harus mampu mengarahkan tujuan programnya untuk mencapai sasaran dari adanya suatu kebijakan.

Jadi, apa yang diharapkan oleh Koperasi sebagai gerakan perekonomian rakyat dapat menjadi formulasi percepatan implementasi kebijakan suatu daerah. Maka Koperasi Wanita Srikandi hadir sebagai agen pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan pemasaran produk kepada masyarakat. sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan, maka diperlukan *social learning* (pembelajaran sosial) yang dimulai dari pemilihan kriteria masyarakat sesuai potensi lokal yang dimiliki, kemudian membentuk jaringan anggota yakni petani penderes nira. Indikator keberhasilan pemberdayaan adalah dilihat dari partisipasi suatu masyarakat, di mana tingkat partisipasi yang tinggi, maka akan memunculkan suatu gerakan yang dinamis untuk percepatan capaian program pemberdayaan.

b) Memperbaiki Kehidupan Masyarakat

Setelah komunikasi itu berlangsung, tentunya akan ada respon oleh masyarakat. Kemudian dilakukannya pembagian sasaran yang jelas berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan potensi. Setelah terbentuk jaringan kelompok atau anggota, maka diarahkan untuk pembinaan yaitu dengan diberikan saprodi (sarana produksi) atau peralatan untuk pembuatan gula semut guna menunjang proses pembuatan. Mereka dibina dan didampingi agar mampu menghasilkan produk gula semut organik dengan baik dan berkualitas yang tentunya dengan standar mutu keorganikan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemudian, dilakukannya monitoring atau pendampingan melalui ICS (*internal control system*) di mana ICS dihadirkan untuk mendampingi petani penderes nira dalam mengolah dan menjalankan kegiatan usahanya. Mulai dari pengelolaan lahan sertifikasi, kebersihan dapur, peralatan masak gula, dan bahan-bahan *starter*. ICS dibuat per-blok, dengan ketentuan satu blok terdiri dari 2-3 desa binaan. ICS sebagai tim pendamping lapangan memberikan arahan serta penilaian untuk anggota petani organik, jika mereka tidak memenuhi persyaratan maka secara langsung akan didiskualifikasi dari keanggotan Koperasi Wanita Srikandi. Jadi, penerapan budaya organik harus benar-benar diterapkan dengan baik dan harus tetap hidup di tengah-tengah kegiatan para anggota petani organik.

c) Prioritas Bagi Kelompok Yang Lemah

Pekerjaan terbanyak di desa Ngasinan adalah petani/pekebun yakni sekitar 42,91% (data penduduk desa Ngasinan 2018). Karena kondisi geografisnya yang terletak di dataran tinggi tersebut, memungkinkan masyarakatnya untuk bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, selain lahan yang memadai juga potensi sumber daya alamnya dapat dijadikan sumber penghasilan. Nira kelapa, merupakan potensi lokal yang dimiliki masyarakat desa setempat untuk dijadikan sebagai gula kelapa.. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pekerjaan sosial (Dubois & Miley, 1992 dalam Mujiyadi, 2015:70) memberikan pedoman : a) membangun relasi pertolongan yang merefleksikan respon empati,

menghargai pilihan dan klien dalam menentukan nasibnya. b) membangun komunikasi yang menghargai klien. c) terlibat dalam pemecahan masalah yang memperkuat partisipasi klien. d) merefleksikan sikap dan nilai pekerjaan sosial. sistem maro yakni orang menderes/menyadap (si A maro pohon kelapa di B), kemudian si B disebut dengan diparo (pemilik pohon). Untuk pembagiannya adalah 50% 50% pada hasil nira yaitu sesuai kesepakatan misalkan, 2 hari pertama yang mengambil si B, kemudian 2 hari berikutnya adalah yang punya pohon. Sistem pembagiannya tergantung dari perjanjian si pemilik dan si penderes, apakah nantinya akan diambil di luar nira atau saat gula sudah jadi. Sehingga dengan sistem maro dan diparo, maka pemerataan hasil pendapatan bagi petani penderes akan merata yakni hasil dari estimasi produksi per hari akan disesuaikan dengan jumlah produksi gula yang tercetak, sampai nantinya akan dikalikan dengan harga jual di pengepul/*supplier* di blok tersebut. Jadi, dampak yang mengarah kepada penguatan kapasitas masyarakat dengan terbentuknya modal sosial yang kuat di antara petani penderes nira di desa Ngasinan, seperti adanya jaringan berupa banyaknya anggota petani penderes lainnya, kemudian terbentuk sistem pengepul, *supplier*, dan ICS untuk distribusi hasil produksi gula.

d) Dilakukan Melalui Program Peningkatan Kapasitas

Dalam tahapan ini, upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sederhana, dan mampu dipahami oleh banyak

orang (Suyono (2009)). Semua orang mampu mengerti dan mengikuti sehingga akhirnya bisa memahami walaupun kadarnya berbeda-beda. Komunikasi yang digunakan adalah bersifat massal atau komunikasi massa. Dalam tahapan ini perlu dilakukan pendekatan terhadap pemimpin formal ataupun informal, karena akan mampu mempengaruhi atau dijadikan sebagai contoh.

Koperasi Wanita Srikandi melaksanakan kegiatan pemberdayaan mulai dari sosialisasi atau penyuluhan, warga masyarakat desa dipertemukan dalam satu tempat yakni aula balai desa Ngasinan untuk mendapatkan arahan terkait adanya inovasi pembuatan gula semut, kemudian dibentuk lagi menjadi per-dasa wisma, GAPOKTAN (gabungan kelompok tani), KWT (Kelompok Wanita Tani) agar lebih mudah pengelompokkannya dan mudah untuk diterapkan. Pemilihan ketua kelompok dipilih dari salah satu ketua lingkungan yaitu salah satu perangkat desa, yang dianggap sebagai pengayom masyarakat. diberikan arahan, motivasi, serta mempelajari inovasi agar menjadi nilai tambah dalam penjualan produk gula cetak ke gula semut. Gula kelapa cetak merupakan produk yang paling banyak dihasilkan masyarakat di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kab. Purworejo, karena di daerah tersebut kualitas nira kelapa yang dihasilkan melimpah dan memiliki prospek nilai jual yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun selisih yang dihasilkan bisa mencapai Rp 6.000 untuk perkilonya. Sehingga selisih yang didapatkan nantinya dapat untuk

mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, bahkan untuk mendapatkan beras pun bisa dengan hasil penjualan gula kelapa. Perluasan jangkauan dimaksudkan untuk mendapatkan sasaran kegiatan pemberdayaan, yakni dilakukan dengan pendataan petani penderes melalui sertifikasi organik. Sampai sejauh ini, anggota petani penderes nira sudah mencapai total 1.820 anggota di Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo. Selain untuk mengurangi angka kemiskinan kegiatan pemberdayaan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat atau suatu kelompok sehingga dapat berdaya.

Umpan balik atau *reward* ditujukan untuk memberikan apresiasi atau sebagai perangsang. Dalam perubahan sosial jangan sampai ada hukuman, karena hukuman akan mengeliminir partisipasi. Jika ada kelompok yang belum berhasil, maka harus ada pendekatan oleh anggota lain yang sudah berhasil. Suatu kegiatan yang dijalankan pastinya akan mendapatkan sorotan atau tanggapan dari obyek yang diberdayakan. Umpan balik yang diberikan berupa jaminan sosial, santunan, dan perluasan jangkauan pemasaran sehingga menimbulkan dampak (*impact*) menyeluruh kepada masyarakat. Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan sosial di mana di dalamnya sebagai upaya untuk memberdayakan anggota masyarakat agar dapat mengembangkan potensi lokal yang ada. Mereka menjadi mitra sekaligus anggota bagi Koperasi Wanita Srikandi untuk mengembangkan kegiatan usaha yang mereka jalankan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan Melalui Koperasi Wanita Srikandi (Studi Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo), maka dapat diambil simpulan bahwa.

1. Bentuk kegiatan pemberdayaan petani penderes di desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo oleh Koperasi Wanita Srikandi meliputi beberapa tahapan yakni, sosialisasi/rembug warga (tingkat desa, pedukuhan, dan dasa wisma), pendaftaran anggota penderes, pendataan petani penderes aktif dan baru sebanyak 68 petani penderes, penerbitan sertifikasi *organic Controls union*, pelatihan pembuatan gula semut organik, pemberian sarana produksi berupa pongkor *food grade*, ayakan *stainless mess 16*, wajan, dan ember tampung. Kemudian, pendampingan petani penderes untuk jaminan kualitas gula (endapan gula, *traceability* (asal-usul runtutan gula), pemberian jaminan sosial berupa dana santunan, evaluasi monitoring oleh ICS (*Internal Controls System*) secara berkala setiap *selapanan* (35 hari), dan distribusi pemasaran produk gula semut organik.
2. Dengan pelatihan pembuatan gula semut organik maka, berdampak pada peningkatan penghasilan petani penderes karena hasil jual gula semut

organik naik dari harga Rp 13.500 sampai Rp 17.500 per-kilogramnya., bertambahnya mitra usaha, kapasitas kelompok dengan terbentuknya Gabungan Kelompok Tani “Ardha Laukha” dan Kelompok Wanita Tani “Laras”. Karena keberadaan modal sosial Gabungan Kelompok Tani “Ardha Laukha” dan Kelompok Wanita Tani “Laras.” sebagai sarana untuk mencapai tujuan keberdayaan dengan terciptanya relasi antara Koperasi Wanita Srikandi dengan kelompok tani penderes nira di desa Ngasinan. Selain itu, daya dukung modal sosial berupa sistem bagi lahan (maro dan diparo) menambah kerekatan hubungan sosial antar petani penderes, karena bisa saling menghasilkan kesepakatan untuk membagi lahan sertifikasi secara adil pada nira yang dihasilkan sehingga karakter dan semangat *gugur gunung* maupun solidaritas masih bisa terawat dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Purworejo

- a) Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perguruan Tinggi, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai dari awal sosialisasi, pelatihan, sampai pada pemasaran produk.
- b) Harus ada *focus targeted* (fokus sasaran) pengembangan kluster per-hasil bidang usah/komoditas, agar tidak bias dan timpang, sehingga

peningkatan kualitas, kuantitas, dan produktivitas dari para pelaku usaha mikro dapat terwadahi secara utuh dan menyeluruh.

- c) Lebih memperhatikan lokasi unit usaha yang terletak di perbatasan, agar terjadi kesesuaian dan percepatan iklim usaha di berbagai sektor wilayah Kabupaten Purworejo.

2. Untuk Pengurus Koperasi Wanita Srikandi

- a) Stabilitas harga yang menjadi acuan usaha, harus bisa ditekan dari segi pasar supaya tidak ada pihak yang dirugikan.
- b) Lebih mengembangkan konsep saling merangkul dan agar tidak ada 'egosektoral' dalam menjalankan kriteria usaha agar penumbuhan iklim usaha dapat terealisasikan secara kontinuitas.

3. Untuk Pelaku Usaha

- a) Pelaku usaha harus *open minded* atau keterbukaan pikiran untuk bisa menerima inovasi, wawasan informasi, jaringan, dan budaya kerja baru agar masyarakat desa tidak tertinggal untuk bisa mencapai kualitas hidup yang ideal.
- b) Memanfaatkan penjualan secara daring/*online* agar pemasaran bisa terjangkau.
- c) Memanfaatkan program-program pemerintah dengan baik dan berkesinambungan seperti legalitas, perizinan, dan akses untuk perbankan agar usaha yang dijalankan bisa berkembang dan menjadi kelompok usaha aktif dan produktif.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Alfan, Alfian. 2012. Seri Kepemimpinan Politik 1 : Kekuatan Pemimpin, Bagaimana Proses Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta : Graha Grafindo
- Ar-Royyan, dkk. 2018. Ekonomi Desa. Banda Aceh : Natural Aceh
- Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budi Winarno. 2013. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
- Cushway, Barry & Lodge, Derek. 1995. *The Fast-Track Mba Series: Organizational Behaviour And Design* (Perilaku dan Desain Organisasi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2022
- Desmaryani, Susi. 2018. Wirausaha dan Daya Saing. Yogyakarta: Deepublish Publisher
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Fitriati, Rachma. 2017. Menguk Daya Saing UMKM Industri Kreatif. Jakarta: Yayasan Obor

- Sumodiningrat, G, dkk. 2015. Menuju Ekonomi Berdikari : Pemberdayaan UMKM dengan Konsep OPOP-OVOP-OVOC. Yogyakarta : MEDIA PRESSINDO
- Hamdi, Muchlis. 2013. Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indah
- Handoyo, Eko. 2012. Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya Persada
- Kartajaya, Hermawan. 2007. Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman (Karya bersama Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya dan Forum Daerah UKM Jawa Timur). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press
- Korten, David. C. 1993. Menuju abad 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Laporan Kinerja Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2010 dan 2016
- M.Anwas, Oos. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta
- Mardikanto, totok dan Soebianto P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Mulyawan, Rahman. 2016. Masyarakat : Wilayah dan Pembangunan. Bandung : UNPAD PRESS

- Nasrun, A, dkk. 2017. *Sejahtera dari Desa : Refleksi Pemberdayaan Berbasis Potensi Pertanian*. Malang : PT Avedia Nusantara
- Purwanto, E.A. dan Sulistyaastuti D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Purwanto. 2015. *Model Pengurangan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan*. Jakarta:LIPI Press
- Rini, I.P. 2019. *Peran Aktif Ibu-Ibu dalam UKM Desa*. Temanggung : Penerbit Desa Pustaka Indonesia
- Shri Ahimsa, H.dkk. 2003. *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*.Yogyakarta: Kepel Press *e-Book*
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soetomo. 2008. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat : Merangkai sebuah kerangka*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Subarsono, AG. 2015. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif : Isu-isu Kontemporer*.Yogyakarta : Gava Media
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar T. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media

- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Tanjung, M.Azrul. 2017. *Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian rakyat*. Jakarta:Erlangga
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta
- Tjilen, Alexander P. 2019. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan : Teori, Konsep, dan Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Deepublish

Simposium

- Suandi Hamid, E. 2010. *Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Dalam Simposium Nasional 2010 Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif. Yogyakarta : UII

Disertasi

- Amiruddin, A. 2018. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Azis, A.N. 2019. *Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Tulungagung* (Studi Pada Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Tulungagung) (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang)

Ramdhana, D. 2013. Formulasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Selva, M. 2017. Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Malang Dalam Pemberdayaan UKM (Studi Di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Malang) (*Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang*).

Skripsi

Andhiny P, D. 2009. Strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Surakarta : Ilmu Administrasi Universitas Sebelas Maret

Aryati, Wuri. 2015. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Kerajinan Tangan Rumput Aji Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga di Dusun Tanjunggunung Desa Tanjungharjo Nanggulan Kulon Progo. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Fadhil, M.Ibnu. 2017. Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandar Lampung. Lampung : FISIP Universitas Lampung

Furqani, Siti Nurhasanah. 2017. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Luwu

- Utara. FISIPOL : Universitas Hasanuddin Prastika, Hamami C. 2016. Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah (UKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan. Surabaya : Fisipol Universitas Airlangga
- Pradipta, M. 2017. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Petani Padi di Desa Sumberagung Kecamatan Moyoudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Purwanto, R.D. 2015. Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Batubara di Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim. Palembang : Fisipol Universitas Sriwijaya
- Said, A.M.F. 2015. Strategi Pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Maros (Studi Pada Sektor Perdagangan). Makassar : Universitas Hasannudin
- Sarah, A. 2017. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pendidikan Keuangan (Studi Kasus Anggota Perempuan Koperasi Teratai Putih Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan). Jakarta : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jurnal / Artikel:

- Adile, dkk. 2015. Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan. Dalam Artikel Thesis. Manado : Universitas Sam Ratulangi

- Adiwinansa, Praditya Reza. 2016. Strategi Pengembangan UKM Gula Semut Di Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. Vol.5 No.7. FIS UNY Yogyakarta
- Ambar Pertiwi, Dkk. Dalam Peranan Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang. dalam Jurnal Administrasi Publik Vol.1 No.2 2017 Hal 213-220. Malang: Universitas Brawijaya
- Hapsari Pp, Hakim A, Noor I. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu). Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora. 2014;17(2):88-96.
- Hidayatullah, S., dkk. 2011. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi Pada UKM Pengrajin di Kota Malang). Dalam Jurnal Ekonomika Vol. 4 No. 1 hal. 33-37. Surabaya : Universitas Airlangga
- Lantarsih, Retno. 2011. Strategi Pengembangan Agroindustri VCO Di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Agrisepe Vol. 10, No. 2, September 2011 Hal. 171-178. Universitas Janabadra : Yogyakarta
- Mustangin, dkk. 2018. Pemberdayaan Masyarakat oleh Koperasi untuk Mewujudkan Kesejahteraan bagi Komunitas Petani di Daerah Cepogo. Malang : Universitas Negeri Malang
- Novitasari, B., Fil, S., & Wismayanti, K. W. D. 2015. Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Dalam Peningkatan Sektor Usaha Mikro Kecil

- Menengah (UMKM) di Objek Wisata Pulau Merah Kabupaten Banyuwangi. *Citizen Charter*, 1(2).
- Purnomo, S. A., Taufiq, A., & Adhi, S. (2014). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Klaten “Studi Pengecoran Logam Di Kecamatan Ceper”. *Journal Of Politic And Government Studies*, 3(4), 504-519.
- Priyanto, D. 2010. Penderes Gula Kelapa di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dalam Majalah Ilmiah Ekonomika Vol. 13 No. 4 November 2010 Hal. 130-162.
- Rahmat, Abdul. 2012. Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pemanfaatan Enceng Gondok Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Lauwonu di Kecamatan Trilango Kabupaten Gorontalo. Gorontalo : Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo
- Ridwan, Muh.Dkk. 2014. Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kota Bontang. Dalam Jurnal Administrative Reform Vol.2 No.2 Tahun 2014. Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman
- Ravik Karsidi. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Studi empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah), dalam Jurnal Peyuluhan September 2007 Vol. 3 No.2. Bogor : IPB
- Suryolaksono, B., 2015. Studi Deskriptif Tentang Program Disperindag Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (*Handycraft*)

Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(1).

Syahza, A, Indrawati, H. 2010. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 12, No. 3, November 2010 : 207-220. Riau : Universitas Riau

Zain, Machmoed. 1999. Reformasi Pengentasan Kemiskinan : dari Pendekatan Ekonomi ke Pendekatan Kesejahteraan. Dalam *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* Vol. 12 No. 4 hal. 79-96. Surabaya : Universitas Airlangga

JURNAL INTERNASIONAL

Alexander Phuk Tjilen, Et Al (2016) “*Implementation of the Economic Program Empowerment of Local Communities in Sota District, Merauke Sub District*”. *Research Articiel OMICS International* 4:3 DOI 10.4172/2315-7844.1000195

Alexander Phuk Tjilen, Et Al (2018), “*CSR Impelementation in Empowering Local Palm Community in District Merauke (Case Study of Merauke Integrated Food-Energy Estate Project/MIFEE*”. *Advanced in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 226.

Thiruchelvam, M., Et Al. “*Policy Options To Promote Energy Efficient And Environmentally Sound Technologies In Small-And Medium-Scale Industries.*” *Energy Policy*, Vol. 31, No. 10, 2003, Pp. 977–987.

- Marhaeni, A. A. I. N., Et Al. “*Empowering Small Industry Of Wood Carving Handicraft In Bangli District.*” *Asia Pacific Journal Of Innovation And Entrepreneurship*, Vol. 13, No. 1, 2019, Pp. 121–136.
- Mustangin, et al. “*Empowerment community By Cooperative (Koperasi Simpan Pinjam Tekun) for Welfare Farmers Society*”. *International Journal of Community Service Learning*. Vol.2, Number 2, 2018:Pp 78-79
- Mwobobia, Fridah Muriungi. “*Empowering Of Small -Micro And Medium Enterprises (Smmes): A Case Of Botswana.*” *Business And Management Research*, Vol. 1, No. 4, 2012, P. 88.
- Awoniyi, Mufutau Akanbi. “*An Investigation Of Various Government Programs, Trade And Industrial Policies On Growth And Development Of Small Scale Industries Toward Their Marketing Activities In Nigeria.*” *American Journal Of Industrial And Business Management*, Vol. 4, No. 12, 2014, Pp. 776–789.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan. *Development Of Small-Scale Industries During The New Order Government In Indonesia*. 2017.
- Yuliarmi, Ni Nyoman, Et Al. “*The Role Of Government, Traditional Institution, And Social Capital For Empowering Small And Medium Industries.*” *Journal Of Economics, Business, And Accountancy / Ventura*, Vol. 15, No. 2, 2012, Pp. 205–218.
- Grindle, Merilee S., (Ed.), *Politics And Policy Implementation In The Third World*: Baltimore : John Hopkins University Press, 1980

Peraturan-peraturan :

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 tahun 2011 tentang Agribisnis

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

Berita Online :

<https://www.metrotimes.news/>

<https://lppslh.or.id/artikel/problema-petani-penderes-kelapa/>

<https://www.google.com/amp/s/jateng.antaranews.com/amp/berita/25907/bi-purwokerto-penderes-nira-kelapa-pahlawan-devisa-negara/>

<https://rakyatmerdeka.com/2019/12/19/bupati-purworejo-desa-nglaris-punya-bumdes-dan-ngasinan-umkmnya-maju/>

<https://www.desa-ngasinan.com/first/statistik/0>

<https://koperasiwanitasrikandi.com>

<https://www.purworejone.com/koperasi-wanita-srikandi/berita/perluas/usaha-koperasi-dirikan-pt-praja-agro-indoland/>

DOKUMEN :

Dokumen BPS Purworejo dalam Angka 2017-2019

Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo tahun 2016-2021

Dokumen Renja (Rencana Kerja) Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo tahun 2018

Dokumen Lakip Pemerintah Kab. Purworejo (Laporan Kinerja Pemerintah) tahun 2019

Company Profile Koperasi Wanita Srikandi Kab. Purworejo

Buku Panduan Tata Kelola Gula Kelapa Organik Koperasi Wanita Srikandi Kab. Purworejo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I.

LAMPIRAN I Instrumen Penelitian

RANCANGAN INSTRUMEN WAWANCARA

Judul : “Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan Oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)”

No.	Fokus Penelitian		Indikator		Pertanyaan	Subyek Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
1.	Bentuk pemberdayaan terhadap petani penderes nira di desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo	1.	Kegiatan Pemberdayaan	1.	Bagaimana sejarah terbentuknya Kopwan Srikandi?	1. (Ketua Koperasi Wanita Srikandi)	Wawancara, Dokumentasi
				2.	Sejak kapan jaringan dengan petani penderes nira terbentuk ?	2. <i>General Manager</i> Koperasi Wanita Srikandi	Wawancara
				3.	Dari wilayah mana saja yang dijadikan mitra?	3. <i>Pengurus</i> Koperasi Wanita Srikandi	Wawancara
				4.	Bagaimana pola kegiatan pemberdayaan tersebut?		Wawancara, Observasi
				5.	Berapa kali kegiatan sosialisasi dilakukan?		Wawancara
				6.	Di mana saja kegiatan itu dilakukan?		Observasi

				7.	Apa saja materi dari kegiatan sosialisasi tersebut?		Wawancara, Dokumentasi
				8.	Apa tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut?		Wawancara
				9.	Apa saja kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?		Wawancara
				10.	Apakah saja bentuk jaminan sosial untuk Petani Penderes Nira?		Wawancara
				12.	Apakah ada upaya dari dinas untuk kemajuan koperasi ?		Wawancara
				13.	Jika ada, dalam bentuk seperti apa?		Wawancara
				14.	Dari manakah sumber modal untuk kegiatan pemberdayaan?		Wawancara
				15.	Apa saja bentuk bantuan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Purworejo?		Wawancara

				16.	Apakah kegiatan pemberdayaan tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian rakyat?		Wawancara
				17.	Apa saja yang mempengaruhi kualitas nira pada petani penderes?		Wawancara
				18.	Apakah ada batasan waktu untuk penyeterannya?		Wawancara
				19.	Bagaimanakah kriteria pengambilan gula semut untuk dioven atau dikeringkan?		Wawancara
				20.	Bagaimanakah tahapan proses produksi gula sampai pada pengemasannya?		Wawancara
				21.	Bagaimanakah proses pemasaran produk?		Wawancara
				22.	Ke mana saja produk tersebut dipasarkan?		Wawancara

				23.	Apa saja perusahaan yang sudah menjalin kerja sama dengan Kopwan Srikandi?		Wawancara
				24.	Bagaimanakah kontribusi atau perannya dalam kemajuan Koperasi?		Wawancara
				25.	Apa harapan terbesar koperasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di masa mendatang?		Wawancara
		2.	Pembinaan dan Pendampingan	28.	Berapa jumlah petani penderes di blok Ngasinan?	ICS/Penyuluh Lapangan Koperasi Wanita Srikandi	Wawancara, Dokumentasi
				29.	Apa saja hak-hak yang diperoleh Petani penderes?		Dokumentasi
				30.	Bagaimanakah wujud pelaksanaan hak-hak tersebut?		Wawancara
				31.	Apakah ada kendala dalam pencapaian		Wawancara

				hak tersebut?		
			32.	<p>Bagaimana upaya untuk mengatasinya?</p> <p>Apa saja kewajiban yang harus dijalankan oleh petani penderes nira?</p>		<p>Wawancara</p> <p>Dokumentasi</p>
			33.	<p>Bagaimana tahapan kegiatan pemberdayaan terhadap petani penderes nira?</p>		Wawancara, Dokumentasi
			34.	<p>Apa saja ketentuan untuk sertifikasi organik?</p>		Dokumentasi
			35.	<p>Apakah ada hambatan dalam penerapan pola organik di Petani Penderes nira blok Ngasinan?</p>		Wawancara
			36.	<p>Bagaimanakah cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?</p>		Wawancara

		3.	Pelaksanaan Kebijakan	37.	Bagaimana Pelaksanaan Tupoksi dalam bidang Koperasi dan UMKM?	1. Kepala Sie Kelembagaan,	Wawancara, Dokumentasi
				38.	Bagaimana pelaksanaan Perda No. 3/2016 tentang usaha mikro terhadap perkembangan usaha gula semut ?	Bid. Koperasi Dinas Koperasi, UKM, dan	Wawancara
				39.	Apa saja kegiatan yang dilakukan dinas dalam upaya pemberdayaan usaha mikro ?	Perdagangan Kab. Purworejo	Wawancara, Dokumentasi
				40.	Berapa kali kegiatan tersebut dilakukan?	2. Kepala Sie promosi. pengembangan	Wawancara, Dokumentasi
				41.	Apakah ada anggaran untuk dukungan program pemberdayaan usaha mikro gula semut?	jejaring Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Wawancara
				42.	Jika ada, berapakah jumlah anggaran untuk kegiatan tersebut?	Kab. Purworejo	Wawancara, Dokumentasi
				43.	Bagaimana tanggapan Bapak terkait	3. Kepala sie Kelembagaan	Wawancara

				adanya program pemberdayaan oleh Koperasi Wanita Srikandi?	Bidang UMKM	
			44.	Bagaimanakah peranan dinas terkait pendampingan/pembinaan terhadap Koperasi Wanita Srikandi?	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo	Wawancara
			45.	Apakah ada kendala-kendala yang dihadapi?		Wawancara
			46.	Bagaimana upaya untuk mengatasinya?		Wawancara
			47.	Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab. Purworejo untuk menumbuhkan iklim usaha ?		Wawancara
			48.	Bagaimana harapan terbesar Bapak/Ibu selaku pelaksana kebijakan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada pada koperasi dan UMKM?		Wawancara

				49.	Bagaimana upaya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Purworejo dalam pengembangan UMKM ?		Wawancara
				50.	Terdapat di daerah mana saja untuk sentra gula semut?		Wawancara
				51.	Bagaimana pandangan Dinas KUKMP Kab. Purworejo terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Kopwan Srikandi?		Wawancara
				52.	Bagaimana peranan dinas KUKMP Kab. Purworejo terhadap Koperasi Wanita Srikandi ?		Wawancara
		4.	Peran PPKL (Penyuluh Pendamping Koperasi	53.	Bagaimana kinerja dari PPKL ?	1. PPKL/Petugas	Wawancara
				54.	Kalau kaitannya dengan Kopwan Srikandi bagaimana?	Penyuluh Koperasi Lapangan	Wawancara
				55.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh		Wawancara

			Lapangan)		PPKL dalam pembinaan terhadap Kopwan Srikandi? 56. Bagaimana harapan ke depan untuk Kopwan Srikandi?		Wawancara
		5.	Keterlibatan Pemerintah Desa	57.	Bagaimana tanggapan Bapak terkait program pemberdayaan petani penderes nira dari Koperasi Wanita Srikandi?	Kepala Desa Ngasinan,	Wawancara
				58.	Untuk sumber permodalan kegiatan itu dari mana ya pak?		Wawancara
				59.	Apakah ada Bumdes/LSM pak?		Wawancara
				60.	Bagaimana kontribusi program pemberdayaan terhadap warga desa Ngasinan?		Wawancara
				61.	Apakah sudah mampu untuk meningkatkan perekonomian desa?		Wawancara

				62.	Bagaimana harapan di masa mendatang dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan tersebut?		Wawancara
				63.	Apa saja peranan dari pemerintah desa terkait pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut?		Wawancara
				64.	Adakah upaya dari pemerintah desa untuk keberlangsungan usaha petani penderes di desa Ngasinan?		Wawancara
				65.	Bagaimana harapan dari pemerintah desa terkait kegiatan pemberdayaan tersebut?		Wawancara

		6.	Faktor Internal dan Eksternal	66.	Apakah keterbatasan modal menjadi penghambat untuk memulai usaha gula semut?	Pengurus Kopwan	Wawancara
				67.	Dari mana sumber permodalan usaha gula semut?	Srikandi (Sekretaris, Admin, QC Produksi)	Wawancara
				68.	Apakah bapak/ibu sudah mengetahui ketentuan standar sertifikasi dengan baik?		Wawancara, dokumentasi
				69.	Apakah keterbatasan sarana dan prasarana mempengaruhi kualitas gula yang dihasilkan?		Observasi, Dokumentasi
				70.	Apakah jumlah relasi dapat menjadi acuan dalam memulai usaha gula semut?		Wawancara
				71.	Apa yang menjadi motivasi menjalankan usaha sebagai pengrajin		Wawancara

				72.	gula semut? Apa saja kendala dalam proses produksi gula semut?		Wawancara
				73.	Apakah sudah pernah mengajukan perizinan untuk pendaftaran izin usaha?		Wawancara
				74.	Sudah berapa kali mengajukan proposal usaha?		Wawancara
				75.	Apakah ada LSM, BUMdes untuk keberlangsungan UMKM di desa Ngasinan?		Wawancara
2.	Dampak pemberdayaan terhadap kesejahteraan Petani Penderes Nira di	1.	Perencanaan Program dan Kegiatan	76.	Bagaimanakah awal terjadinya pembentukan kelompok usaha?	Anggota Kelompok Petani Penderes Nira	Wawancara
				77.	Siapa saja yang terlibat dalam pembentukan kelompok?	Blok Ngasinan, Bener, Purworejo	Wawancara
				78.	Sejak kapan memulai usaha gula		Wawancara

desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo				kelapa?			
				79. Mengapa memilih pekerjaan sebagai penderes nira?			Wawancara
				80. Apa yang menjadi motivasi sebagai pengrajin gula kelapa?			Wawancara
				81. Apakah ada inisiatif atau kemauan untuk mengembangkan usaha?			Wawancara
				82. Apakah sudah pernah memasukan produk ke ritel seperti			Wawancara
				83. Alfamart/Indomaret? Apakah sudah memulai dengan media online/ <i>online shop</i> ?			Wawancara
84. Jika ada, di aplikasi atau media apa saja?	Wawancara						
85. Apakah ada kendala dalam hal pemasaran online?	Wawancara						

			86.	Apakah ada kebijakan atau ketentuan yang memberatkan petani penderes?		Wawancara
			87.	Berapa jumlah produksi gula semut tiap harinya?		Wawancara
			88.	Berapa banyak jumlah pasokan yang harus disetor kepada Koperasi ?		Wawancara
			89.	Apakah manfaat pemberdayaan sudah mampu dirasakan?		Wawancara
			90.	Bagaimana bentuk manfaat/dampak yang diperoleh dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari?		Wawancara
			91.	Dalam segi apa peningkatan kesejahteraan itu diperoleh?		Wawancara
			92.	Bagaimanakah upaya untuk bisa mencapai target penambahan jumlah petani?		Wawancara

				93.	Bagaimana bentuk motivasi atau pembinaan yang diberikan?		
		2.	Manfaat dan Dampak Pemberdayaan	94.	Apa saja nilai tambah dari adanya pembuatan gula semut?	1. Ketua Kelompok Petani Penderes	Wawancara
				95.	Berapa harga gula semut untuk perkilonya?	Nira Blok Ngasinan, Bener, Purworejo	Wawancara
				96.	Berapa selisih harga gula cetak dan gula semut?	2. Pengepul Gula Semut	Wawancara
				97.	Berapa jumlah pendapat rata-rata untuk per-bulannya?	3. Kelompok Petani Penderes Nira Blok Ngasinan, Bener, Purworejo	Wawancara
				98.	Berapakah jumlah pengeluaran kebutuhan untuk kebutuhan rumah tangga perbulannya?		Wawancara
				99.	Apakah akses untuk kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi?		Wawancara

			100.	Apakah akses untuk kesehatan keluarga sudah terpenuhi?		Wawancara
			101.	Apakah akses untuk menempuh pendidikan keluarga sudah terpenuhi?		Wawancara
			102.	Bagaimana status kepemilikan lahan untuk kebutuhan usaha?		Wawancara
			103.	Apa saja bentuk bantuan dari Dinas terkait?		Wawancara
			105.	Bagaimana keterlibatan Pemerintah Desa terhadap kegiatan usaha mikro gula semut?		Wawancara
			106.	Bagaimana pola pengambilan keputusan pada petani penderes nira?		Wawancara
			107.	Apakah akses untuk kebebasan berpendapat sudah terpenuhi?		Wawancara
			108.	Apakah hasil penjualan gula semut		Wawancara, Observasi

				109.	dapat untuk simpanan modal? Apa harapan yang ingin dicapai di masa mendatang?		Wawancara
--	--	--	--	------	--	--	-----------

Lampiran 2. Panduan Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Judul Penelitian : “Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)”

Dalam penelitian ini peneliti membuat beberapa rancangan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan observasi. Pedoman observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Observasi kondisi geografis/wilayah lokasi Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
 - a. Kondisi Geografis Desa Ngasinan (Peta Lokasi, Letak wilayah)
 - b. Data Demografi/ Administratif Kependudukan (Berdasarkan Pendidikan, Pekerjaan, Jumlah KK)
2. Observasi aktivitas/kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Srikandi.
 - a. Tahapan sertifikasi organik (sosialisasi, motivasi, *training of trainer*, pendaftaran, pendataan petani, audit internal, audit eksternal, monitoring dan evaluasi).
 - b. Aktivitas kegiatan pemberdayaan kepada petani penderes nira ataupun keluarga petani penderes nira (pelatihan pembuatan gula kelapa kristal (semut), pembinaan dan pendampingan, pemasaran, dan distribusi).
3. Observasi aktivitas Petani Penderes Nira Blok G-26 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
 - a. Keikutsertaan dalam kegiatan Sosialisasi dari Koperasi Wanita Srikandi atau dinas terkait.
 - b. Interaksi antara Pendamping/penyuluh lapangan dengan anggota Petani Penderes Nira.
 - c. Kegiatan Pendataan Petani Penderes Nira
 - d. Perilaku/sikap dalam Pengambilan Keputusan (per-Dasawisma, Perkumpulan tiap Desa)
 - e. Kegiatan produksi gula semut.
4. Observasi Kondisi Sosial-Ekonomi Kelompok Petani Penderes Nira Blok G-28 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo
 - a. Kondisi Bangunan tempat tinggal Keluarga Petani Penderes Nira.
 - b. Kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan.
 - c. Kondisi terpenuhinya akses kesehatan keluarga, pendidikan keluarga, sarana prasarana keluarga, dan keberlangsungan usaha Petani Penderes Nira.
 - d. Tingkat pendapatan rumah tangga Petani Penderes Nira.

Lampiran 3. Pedoman Dokumentasi

Rancangan Instrumen Pedoman Dokumentasi

“Pemberdayaan Petani Penderes Nira Melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)”

No.	Fokus Penelitian	Indikator	Kegiatan Dokumentasi
1.	Bentuk pemberdayaan terhadap Petani Penderes Nira	Data Sertifikasi Organik	a. Mencari data arsip <i>form</i> perpanjangan sertifikasi organik <i>Controls Union</i>
		Tahapan kegiatan Pemberdayaan	a. Meminta data <i>Company Profile</i> Koperasi Wanita Srikandi Kab. Purworejo b. Meminta buku Panduan Tata Kelola Gula Semut Organik c. Foto dokumentasi kegiatan sertifikasi
		Jumlah Petani yang disertifikasi	a. Mencari data <i>Farmer List</i> b. Mencari data jumlah petani sertifikasi per-blok c. Meminta data Peta Letak Petani Sertifikasi
		Pelatihan dan Pendampingan	a. Foto dan rekaman kegiatan pendataan petani baru dan perpanjangan b. Foto kegiatan Sosialisasi materi ToT Gula semut c. Rekaman dan data temuan-temuan kegagalan sertifikasi d. Dokumentasi ToT motivasi untuk semangat petani penderes nira e. Foto daftar hadir kegiatan sosialisasi materi peningkatan kualitas gula

		Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta data jadwal kegiatan ICS per-blok b. Foto kegiatan monitoring dan evaluasi c. Foto daftar hadir monitoring kegiatan per-blok
		Penggunaan sumber dana AD Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mencari data penggunaan ADD/dana desa untuk usaha mikro gula semut b. Foto kegiatan kunjungan Bupati
		Dukungan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta data instrumen Koperasi aktif dan tidak aktif b. Meminta data instrumen produk unggulan berbasis OVOP c. Foto kegiatan sosialisasi dari Dinas KUKMP Kab. Purworejo d. Meminta Dokumen Renja dan Renstra terbaru
2.	Dampak pemberdayaan terhadap kehidupan sosial ekonomi Petani Penderes Nira	Manfaat Pemberdayaan	Mencari data perkembangan ekonomi warga penderes nira mulai dari Gapoktan sampai KWT (Kelompok Wanita Tani)
		Akses Lahan untuk Usaha Petani Penderes Nira	Meminta dokumen <i>Farm List</i> pada ICS
		Akses kesehatan Petani Penderes Nira	Foto Petani Penderes Nira/keluarga saat melaksanakan kegiatan (fisik)
		Akses penciptaan lapangan kerja	Mencari data akses tingkat pekerjaan warga pada laman website desa
		Akses pendidikan	Mencari data akses tingkat pendidikan warga pada lama website desa.

Lampiran 4. Surat Izin



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12
 Laman: <http://fis.unnes.ac.id>, surel: fis@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/882/UN37.1.3/LT/2020

29 Januari 2020

Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten
 Purworejo

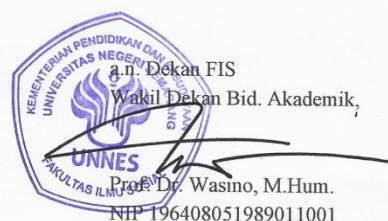
Jl. Jend. Sudirman No.22, Ngupasan, Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa
 Tengah 54114

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM : 3312416007
 Program Studi : Ilmu Politik, S1
 Semester : Gasal
 Tahun akademik : 2019/2020
 Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi di Era Industri 4.0 :
 Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Pedesaan oleh Petani Penderes
 Nira Melalui Koperasi Wanita Srikandi (Studi di Desa Ngasinan,
 Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan
 atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Februari s.d. 29 Februari 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.


 a.n. Dekan FIS
 Wakil Dekan Bid. Akademik,
 Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
 NIP 196408051989011001

Tembusan:
 Dekan FIS;
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 721 064 102 6

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-01-29 14:09:15)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
 Gedung C.7 Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
 Telepon +62248508006, Faksimile +62248508006 ext 12
 Laman: <http://fis.unnes.ac.id>, surel: fis@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/885/UN37.1.3/LT/2020
 Hal : Izin Penelitian

29 Januari 2020

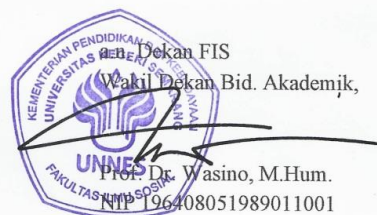
Yth. Kepala Desa Ngasinan
 Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM : 3312416007
 Program Studi : Ilmu Politik, S1
 Semester : Gasal
 Tahun akademik : 2019/2020
 Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi di Era Industri 4.0 :
 Pemanfaatan Sumber Daya Pedesaan oleh Koperasi Wanita Srikandi
 (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian skripsi di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 1 Februari 2020 s.d. 1 April 2020.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:
 Dekan FIS;
 Universitas Negeri Semarang



Nomor Agenda Surat : 210 108 419 8

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2020-01-29 14:16:28)



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 13037/UN37.1.3/KM/2019**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Fakultas Ilmu Sosial UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik Tanggal 8 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan kepada:
- Nama : Dr Eko Handoyo, M.Si
NIP : 196406081988031001
Pangkat/Golongan : IV/c
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing
- Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :
- Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 3312416007
Jurusan/Prodi : Politik dan Kewarganegaraan/Illmu Politik
Topik : Implementasi kebijakan daerah
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan
1. Wakil Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal



3312416007


....: FM-03-AKD-24/Rev. 00 :....

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 8 November 2019
DEKAN



Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

Lampiran 5. Surat Balasan Sudah Melaksanakan Penelitian



KOPERASI WANITA SRIKANDI
 GEDUNG PRADJA JL.PURWOREJO-MAGELANG KM 3, KELURAHAN KESENG,
 KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO
 PHONE : 02757530677, E-MAIL : icskoperasisrikandi@yahoo.com

SURAT KETERANGAN
No. 088/KOPWANSRIKANDI/II/2020

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Nomor :
 B/881/UN37.1.3/LT/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Nuke Isnayanti Putri, SP
 Jabatan : Sekretaris Umum
 Alamat : Gd. Pradja Jl. Magelang – Purworejo KM.01 Kel. Keseneng
 Kec. Purworejo Kab. Purworejo


Bersama surat ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa atas nama ;

Nama : Uswatun Hasanah
 NIM : 3312416007
 Prodi : Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang

Telah melaksanakan Penelitian dari 1 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dijadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo, Februari 2020
 Koperasi Wanita Srikandi



Nuke Isnayanti Putri, SP
 Sekretaris Umum



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 22 Telp. (0275) 321018, 321028 Fax. 321228
Kode Pos 54114
E.mail:dinkukmp@purworejokab.go.id Website:www.dinkukmp.purworejokab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 703 / 2020

Menunjuk surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Nomor : B / 882 / UN37.1.3 / LT / 2020 Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Widiyani
NIP : 19660515 199403 2 008
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tingkat I / IIIId
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian DINKUKMP
Kabupaten Purworejo

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa atas nama :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Uswatun Hasanah	3312416007	Ilmu Politik

Telah melaksanakan Penelitian terhitung mulai tanggal 01 Februari 2020 s/d 29 Februari 2020 pada hari kerja

Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purworejo , Februari 2020

An. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS

u.b.

KASUBBAG KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Dra. WIDIYANI
 Penata Tingkat I
 NIP. 19660515 199403 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo Kode Pos 54111
Telp. (0275) 325202 Fax. (0275) 325202 Email : dpmtsp.purworejo@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 562.42/050/2020

I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

II. Menunjuk : B/884/UN37.1.3/LT/2020

III. Bupati Purworejo memberi Surat Keterangan Penelitian untuk melaksanakan Penelitian dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :

- ❖ Nama : USWATUN HASANAH
- ❖ Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
- ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. : 3306096004980003
- ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
- ❖ Program Studi : S1 ILMU POLITIK
- ❖ Jurusan : POLiTIK DAN KEWARGANEGARAAN
- ❖ Alamat : DUSUN III RT.001/RW.003,KEBONDALEM Kec. KUTOARJO Kab. PURWOREJO
- ❖ No. Telp. : 085877686112
- ❖ Penanggung Jawab : Prof. Dr. Wasino, M.Hum
- ❖ Maksud / Tujuan : Penelitian
- ❖ Bidang Penelitian : Sosial Ekonomi Pertanian
- ❖ Judul : PEMBERDAYAAN PETANI PENDERES NIRA MELALUI PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL PEDESAAN OLEH KOPERASI WANITA SRIKANDI (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo)
- ❖ Lokasi : DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO, KOPERASI WANITA SRIKANDI, KEPALA DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO
- ❖ Lama Penelitian : 3 Bulan
- ❖ Jumlah Peserta : 1 orang

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- b. Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 1. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purworejo
 2. Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- c. Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya menyampaikan hasilnya Kepada Yth, Bupati Purworejo Cq. Kepala KESBANGPOL Kab. Purworejo dan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

1. Kepala Kesbangpol Kab. Purworejo;
2. DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO;
3. KOPERASI WANITA SRIKANDI;
4. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG;

Dikeluarkan : Purworejo

Pada Tanggal : 03 Februari 2020

a.n. BUPATI PURWOREJO
PLT. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIS,

FITHRI EDHI NUGROHO, SE, MM.

Pembina

NIP. 19760924 199903 1 008



Lampiran 6. Dokumentasi Kegiatan Pemberdayaan



Sosialisasi *Bankable* oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Purworejo



Meninjau produk UMKM khas Purworejo di Ritel



Kegiatan sosialisasi kepada Petani Penderes Nira



Pelatihan pembuatan pupuk organik



Kegiatan pelatihan pembuatan gula semut



Produk gula semut dari pengepul



Kegiatan uji coba alat pembuat gula cair



Kegiatan pembagian pongkor/bumbung nira